





BERBASIS NILAI BUDAYA LOKAL (LOCAL WISDOM)
MASYARAKAT SULAWESI UTARA

KEWARGANEGARAAN



Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils. M.Pd. Dr. Juliana Margareta Sumilat, S.Pd. M.Pd Kosmas Sobon, S.Fils. M.Pd



Biografi

Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils. M.Pd. Lahir di Taratara 20 April 1983 adalah dosen di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado. Pada Tahun 2007, menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Filsafat pada Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Pada Tahun 2013, menyelesaikan Program Magister Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Pascasarjan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pada tahun 2018, menyesaikan Program Doktoral pada Program Studi Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Merdeka

Program Doktoral pada Program Studi Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Merdeka Malang. Saat ini penulis aktif membina mata kuliah: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Karakter, Filsafat Pancasila, Etika Kewarganegaraan, Pendidikan Civis, Isu-isu Kontemporer PPKn, Perkembangan Mutahir PPKn. Penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang PPKn.

O

Dr. Juliana Margareta Sumilat, MPd., CRP dilahirkan di Manado 21 Januari 1982 merupakan dosen tetap Universitas Negeri Manado semenjak tahun 2015 yang aktif melakukan Tri dharma perguruan tinggi. Juga sebagai Asesor BAN S/M Provisi Sulawesi Utara dan asesor PPG Prajabatan Tahun 2022. Penulis aktif mengajar pada prodi S1 PGSD, S2 PGSD dan Pendidikan Profesi GURU BInga PGSD. Beberapa mata kuliah yang diampuh adalah Pengembangan Kurikulum, Strategi Pembelajaran, media pembelajaran dan Pengembangan Matamatika di Strategi Pembelajaran, media pembelajaran dan

Pengembangan Pembelajaran Matamatika di SD, KOnsep Geometri, pengukuran dan pembelajarannya di SD. Penulis yang menamatkan Kuliah S3 di UNJ Prodi Teknologi Pendidikan pada Tahun 2019 ini juga pernah menulis beberapa buku yang berisbn dan karya ilmiah diantaranya adalah Konsep Dasar Matematika, Media Pembelajaran Pada Masa Pandemi, Book Chapter: Improving the creativity of students throught project based learning, The Utilization of Online Media in Calculation Operations Mathematics Learning in Elementary School Students, Development of Computer-Aided Media Operating Materials Calculate Integers, Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pembelajaran Tematik Siswa Sekolah Dasar, dll.



Kosmas Sobon, S.Fil., M.Pd. Lahir di Bobu, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, pada 02 Maret 1983. Pada tahun 2010, menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Filsafat pada Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, kemudian melanjutkan studi ke jenjang Magister pada Program Sarjana Univesitas Negeri Manado Program Studi S2 PGSD dan lulus pada tahun 2014. Sejak tahun 2016, diangkat menjadi dosen tetap di Universitas Katolik De La Salle Manado pada program studi S1 PGSD Fakultas Ilmu

Pendidikan. Tahun 2018-2022, penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi S1 PGSD Universitas Katolik De La Salle Manado. Adapun beberapa mata kuliah yang diampu: Pengembangan Kurikulum SD, Statistika Pendidikan, Metodologi Penelitian Pendidikan, dan Manajemen Berbasis Sekolah.



0858 5343 1992

eurekamediaaksara@gmail.com

JL Banjaran RT.20 RW.10

Bojongsari - Purbalingga 53362



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS NILAI BUDAYA LOKAL (LOCAL WISDOM) MASYARAKAT SULAWESI UTARA

Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils. M.Pd. Dr. Juliana Margareta Sumilat, S.Pd., MPd., CRP Kosmas Sobon, S.Fils. M.Pd.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS NILAI BUDAYA LOKAL (LOCAL WISDOM) MASYARAKAT SULAWESI UTARA

Penulis : Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils. M.Pd.

Dr. Juliana Margareta Sumilat, S.Pd., MPd., CRP

Kosmas Sobon, S.Fils. M.Pd.

Editor : Darmawan Edi Wiyoto, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-487-228-6

Diterbitkan oleh : EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2022

ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH

NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel: eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama: 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku ini merupakan buah karya dari pemikiran dari para penulis yang diberi judul "Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Berbasis Nilai Budaya Lokal (Local Wisdom) Masyarakat Sulawesi Utara". Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu,penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PERSOALAN KEBERAGAMAN BUDAYA	
DI INDONESIA	1
A. Pendahuluan	1
B. Konflik Suku, Agama, Ras (SARA) di Indonesia	2
C. Sulawesi Utara: Harmonis di antara Keberagaman	3
D. PKn Berorientasi Nilai Budaya Lokal (Local Wisdom)	6
E. Penutup	9
BAB 2 FENOMENA KEKERASAN ATAS NAMA	
AGAMA DI INDONESIA	10
A. Pendahuluan	10
B. Data dan Fakta Kekerasan atas Nama Agama	
di Indonesia	11
C. Akar Kekerasan atas Nama Agama Indonesia	15
1. Kesalahan Interpretasi dan Penafsiran Ayat-ayat Kit	tab
Suci	15
2. Solidaritas Akibat Ketidakadilan	17
3. Ketidakpuasan Ekonomi	17
4. Fundamentalisme Agama	
D. Solusi Mengatasi Kekarasan Atas Nama Agama	20
1. Pendidikan Toleransi	21
2. Dialog Intereligius	23
3.Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan	25
E. Penutup	28
BAB 3 INTERNALISASI NILAI BUDAYA (LOCAL WISDOM)	
MASYARAKAT	29
A. Pendahuluan	29
B. Ruang Lingkup Internalisasi Nilai-Nilai Budaya	29
1. Pengertian Internalisasi	29
2. Pengertian Nilai	32
3. Hierarki Nilai	36

C. Pengertian Budaya	39
1. Kearifan Lokal / Local Wisdom	45
2. Proses Transformasi Budaya	48
3. Pendidikan sebagai Proses Transformasi Budaya	49
D. Penutup	51
BAB 4 NILAI-NILAI BUDAYA SULAWESI UTARA	52
A.Pendahuluan	52
B.Si Tou Timou Tumou Tou (Manusia Hidup Untuk	
Memanusiakan Orang Lain)	53
1. Ruang Lingkup Si Tou Timou Timou Tou	53
2. Taksonomi Nilai Budaya Si Tou Timou Tumou Tou	55
C. Mapalus (Gotong-royong)	60
D. Torang Samua Basudara	64
E. Beberapa Penelitian tentang Budaya	66
F. Penutup	71
BAB 5 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI	
PENDIDIKAN TOLERANSI	72
A.Pendahuluan	72
B. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan	73
1. Sejarah Lahirnya Pendidikan Kewarganegaraan	
(PKn)	73
2. Perkembangan PKn di Indonesia	77
3. Tujuan dan Misi PKn Di Sekolah Menengah Atas	
(SMA)	79
4. Komponen-komponen Pembelajaran PKn	81
C. Sikap Toleransi Siswa	86
D. Penutup	90
BAB 6 ANALISIS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN	
KEWARGANEGARAAN DALAM UPAYA	
INTERNALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL	
SULAWESI UTARA	91
A. Pendahuluan	91
B. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	
di Sekolah	92
Pembelajaran PKn di SD	
,	

2. Pembelajaran PKn di SMP	94
3. Pembelajaran PKn di SMA/K	98
C. Pembelajaran Berbasis Budaya Lokal	102
D. Pembelajaran PKn Berbasis Kearifan Lokal	
Masyarakat Sulawesi Utara	113
E. Penutup	120
BAB 7 PEMBELAJARAN PKn BERBASIS NILAI BUDAYA	
LOKAL (LOCAL WISDOM) DI KOTA TOMOHON-	
SULAWESI UTARA	121
A. Pendahuluan	121
1. Pangaruh Nilai Budaya Si Tou Timou Tumou Tou,	
Mapalus, Torang Samua Basudara terhadap	
Pembelajaran PKn	121
2. Pengaruh Nilai Budaya Si Tou Timou Tumou Tou	
terhadap Pembelajaran PKn	126
3. Pengaruh Nilai Budaya <i>Mapalus</i> terhadap	
Pembelajaran PKn	129
4. Pengaruh Nilai Budaya Torang Samua Basudara	
terhadap Pembelajaran PKn	130
5. Pengaruh Nilai Budaya Si Tou Timou Tumou Tou	
terhadap Sikap Toleransi Siswa	133
6. Pengaruh Nilai Budaya <i>Mapalus</i> terhadap	
Pengembangan Sikap Toleransi Siswa	136
7. Pengaruh Nilai Budaya Torang Samua Basudara	
Terhadap Pengembangan Sikap Toleransi Siswa	137
8. Pengaruh Pembelajaran PKn terhadap Sikap	
Toleransi Siswa	140
9. Pangaruh Nilai Budaya Si Tou Timou Tumou Tou,	
Mapalus, Torang Samua Basudara dan Pembelajaran	
PKn terhadap Sikap Toleransi Siswa	143
B. Penutup	146
DAFTAR PUSTAKA	148
TENTANO DENILII IC	150

BAB

1

PERSOALAN KEBERAGAMAN BUDAYA DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Indonesia ditinjau dari aspek manapun merupakan sebuah bangsa yang majemuk. Kemajemukan ini tampak dalam manifestasi kebudayaan bangsa Indonesia yang tidak "satu." Kemajemukan sosial dan budaya Indonesia ditandai dengan banyaknya budaya dan agama di Indonesia. Sebagai contoh budaya Jawa, Sunda, Minahasa, Batak, dan lain-lain. Dari segi agama di Indonesia terdapat enam agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Tokoh pertama yang melukiskan tentang kemajemukan Indonesia adalah Furnivall. bangsa Furnivall (1939)sebagaimana dikutip oleh Wirutomo, dkk. (2011:20) dalam hal ini melukiskan kemajemukan bangsa Indonesia pada masa Hindia-Belanda yang ditandai oleh perbedaan etnik yang tinggal bersama dalam suatu wilayah, namun tidak membaur dan masing-masing memiliki suatu perangkat pranata sosial (sistem keluarga dan kekerabatan, agama, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya) yang khas; tapi secara formal terpisah dan memenuhi kebutuhannya sendiri (self contained) serta tidak memiliki cita-cita yang sama (common social will). Menurut Nasikun (2006:34-35), struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku-bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

B. Konflik Suku, Agama, Ras (SARA) di Indonesia

Tak bisa dipungkiri, Indonesia memang merupakan suatu bangsa yang terdiri atas berbagai kebudayaan dan adat-istiadat. Sayangnya, implementasi proses kehidupan bermasyarakat di tengah perbedaan dan keanekaragaman ini (suku bangsa, budaya, ras, agama, dan sejenisnya) tidaklah semudah apa yang dipikirkan. Pergeseran antar kelompok agama maupun suku, budaya ataupun adat istiadat yang berbeda seolah menjadi perpecahan horizontal pemicu terjadinya suatu masyarakat yang berlainan tersebut. Sejak tahun 1997 negara kita dilanda berbagai macam konflik. Konflik terjadi di berbagai daerah di Indonesia, misalnya di Ambon, Papua, Kalimantan, Posso, dan di daerah-daerah lain di Indonesia. Konflik antar golongan dalam masyarakat seakan-akan tak terelakkan lagi di berbagai daerah di negara kita ini. Di Ambon misalnya, konflik awalnya hanya terjadi antara sekelompok orang akhirnya berkembang menjadi konflik antar agama dan menyebar ke daerah-daerah sekitar. Konflik yang terjadi di berbagai daerah ini mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan bahkan korban materi. Dengan adanya konflik ini banyak orang dibunuh dan saling membunuh; banyak orang kehilangan tempat tinggal karena dirusak massa, ada pula yang mengungsi ke pulau-pulau lain. Konflik-konflik ini memang sungguh ironis bagi negara Indonesia yang menganut paham Bhinneka Tunggal Ika. Tepatlah apa yang dikatakan Syaqiq A. Mughni bahwa meskipun secara formal bangsa ini mengakui keragaman, namun dalam kenyataannya tidak (Mahfud, 2009:xi).

Menurut Wirutomo, dkk. (2011:114-115) beberapa faktor utama yang memungkinkan konflik etnis muncul ke permukaan atau menjadi konflik terbuka adalah:

Pertama, perubahan konstelasi politik pada masa reformasi dan iklim kebebasan yang dijunjung tinggi menjadi ladang subur untuk mengungkapkan keresahan-keresahan beberapa kelompok etnik yang selama ini menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kedua, tidak meratanya pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia ternyata disadari atau tidak, terpolarisasi berdasarkan kelompok etnik. Perebutan sumber daya yang seharusnya berdasarkan kompetisi yang sehat dengan kriteria universal malah menjadi ladang perbenturan nilai-nilai budaya. Pada titik ini, seperti pada masa kolonial, stratifikasi ekonomi tumpang tindih dengan identitas etnik. Tidak terjadi integrasi fungsional di antara beragam kelompok etnik. Ketiga, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat Indonesia, identitas etnik, dalam hal ini kesukuan termasuk di dalamnya nilai-nilai budaya dan adat istiadat, masih menjadi faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat terutama di pedesaan.

Fenomena-fenomena konflik yang terjadi di Indonesia dewasa ini mengindikasikan kurangnya toleransi; baik toleransi terhadap agama lain maupun terhadap budaya lain. Toleransi pada hakikatnya adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya (Kementrian Pendidikan Nasional, 2010:9).

C. Sulawesi Utara: Harmonis di antara Keberagaman

Kontras dengan apa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang dilanda berbagai konflik horizontal, kerukunan masyarakat Sulawesi Utara justru tetap terjaga dengan baik; masyarakatnya tetap tenang, aman, dan damai dalam keharmonisan. Sulawesi Utara tampak tanpa masalah, padahal warga provinsi ini juga beraneka ragam suku, agama, ras dan bahasa.

Berdasarkan data hasil sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk yang berada di Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 2.270.059 jiwa dengan perincian 1.159.903 laki-laki

dan 1.110.693 berjenis kelamin perempuan. Sulawesi Utara didominasi oleh Suku Minahasa (33,2%), diikuti Suku Sangir (19,8%), Suku Bolaang Mangondow (11,3%), Suku Gorontalo (7,4%) lalu Suku Totemboan (6,8%) dan Tionghoa (3%). Selain itu terdapat pula Suku Jawa, Bali, Batak, Arab, Maluku, Makasar dan sebagainya. Sementara itu dari segi agama: Protestan (75%), Islam (13%), Katolik (10%), Konghuchu (1%), Budha dan Hindhu (1%). Dari data di atas, nampak jelas bahwa Sulawesi Utara sangat beragam dalam hal suku, agama, bahkan ras.

Karena keharmonisan yang ditunjukkan oleh masyarakat Sulawesi Utara di tengah keberagaman suku, agama, ras dan bahasa, maka tidaklah mengherankan jika Sulawesi Utara menjadi barometer dalam hal kerukunan dan dialog antar umat beragama di Indonesia. Banyak pemimpin daerah yang secara khusus datang ke Sulawesi Utara untuk mempelajari secara langsung tentang kerukunan antar umat beragama. Menurut Gara (2009:67) kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara adalah realita. Hal ini diakui baik di tingkat lokal, nasional dan bahkan internasional. Fakta berbicara bahwa ketika daerahdaerah lain di sekitar Sulawesi Utara (SULUT) terbakar emosi untuk berkonflik dengan mengatasnamakan agama (etnis), ternyata SULUT sulit disulut dan tetap hidup dalam kerukunan.

Fenomena kerukunan yang ditampilkan masyarakat Sulawesi Utara memunculkan pertanyaan mendasar: apa faktor yang menyebabkan sehingga Sulawesi Utara yang secara suku, etnis, agama, bahasa beragam bisa hidup dalam situasi harmonis? Nilai-nilai sosial budaya apa saja yang ada di dalam masyarakat SULUT yang menjadi perekat sehingga sulit untuk diprovokasi?

Masyarakat Sulawesi Utara hidup dalam kerukunan ialah kuatnya nilai-nilai sosial budaya lokal (*local wisdom*) yang menjadi perekat masyarakatnya. Nilai-nilai sosial budaya dominan di Sulawesi Utara adalah budaya *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus dan Torang Samua Basudara*. Budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* dan *Mapalus* adalah budaya Minahasa yang paling

menonjol menjiwai hidup masyarakat Sulawesi Utara. Si Tou Timou Tumou Tou (manusia hidup untuk memanusiakan orang lain) merupakan filosofi Sam Ratulangi. Pemikiran filosofis ini mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk hidup dalam kerukunan dengan tujuan untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjadi musuh bagi orang lain (homo homini lupus). Sementara itu budaya Mapalus merupakan sebuah tradisi budaya suku Minahasa, dimana dalam mengerjakan segala sesuatu dilakukan secara bersama-sama atau secara gotong royong (misalnya dalam mengerjakan kebun). Dalam konsep Mapalus yang lebih modern, penerapannya bisa dilihat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan; dimana pada waktu orang Kristen merayakan hari raya Natal atau Paskah yang menjaga gereja-gereja adalah pemuda-pemuda Muslim. Begitu pula sebaliknya ketika orang Muslim merayakan hari raya Lebaran atau Idul Fitri, maka yang ikut menjaga di sekitar Masjid adalah pemuda-pemuda Kristen. Bahkan di Sulawesi Utara ada satu lembaga yang berperan untuk menjaga kerukunan antar agama, yaitu: BKSAUA (Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama). Kedua budaya ini dalam dikombinasikan perkembangannya menjadi semboyan masyarakat Sulawesi Utara Torang Samua Basudara (kita semua bersaudara). Semboyan ini dengan jelas menggambarkan bagaimana masyarakat Sulawesi Utara hidup dalam suasana harmonis, penuh persaudaraan.

Faktor penting yang turut mempengaruhi kuatnya nilainilai budaya lokal (*local wisdom*) Sulawesi Utara adalah pewarisan nilai-nilai budaya secara turun temurun atau yang lebih dikenal dengan proses enkulturasi. Koentjaraningrat (2002:233), menyatakan bahwa "dalam proses enkulturasi seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat-adat, sistem norma, dan peraturan peraturan yang hidup dalam kebudayaannya." Selanjutnya proses enkulturasi dilakukan oleh orang tua atau orang yang dianggap dituakan dalam komunitas itu, seperti pewarisan nilai

tata krama, adat istiadat, keterampilan suatu suku/keluarga yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Proses enkulturasi biasanya terjadi secara formal melalui pendidikan untuk disampaikan kepada orang lain yang belum mengenal, penyampaian informasi sekaligus sebagai bentuk penyadaran akan keberadaan suatu budaya, dan kemudian mengadopsi budaya tersebut untuk dijadikan sebagai budayanya.

D. PKn Berorientasi Nilai Budaya Lokal (Local Wisdom)

Menurut Tilaar (2002:54), salah satu proses yang luas dikenal mengenai kebudayaan adalah transmisi kebudayaan. Artinya kebudayaan itu ditransmisikan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Bahkan banyak ahli pendidikan yang merumuskan proses pendidikan tidak lebih dari proses transmisi kebudayaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kebudayaan dan pendidikan ibarat mata uang yang memiliki dua sisi tapi merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Hidup dan matinya suatu kebudayaan ditentukan oleh pendidikan.

Di Indonesia pendidikan yang berorientasi pada internalisasi nilai-nilai sosial budaya masyarakat secara tersirat telah diamanahkan pada implementasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa "pendidikan diselenggarakan secara demokratis dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa", lebih lanjut dinyatakan bahwa "pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat".

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 37, Pendidikan Kewarganegaraan ditempatkan sebagai nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi. Dalam

bagian penjelasan hal ini dipertegas lagi bahwa "Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air."

Jika kita mencermati pasal 37 dalam UU Sisdiknas tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan memegang peranan sentral dalam mendidik manusia Indonesia menjadi warga negara yang baik yang menghargai perbedaan suku, agama, rasa, dan bahasa. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU Sikdisnas pasal 1 ayat 1:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah sarana yang tepat untuk menginternalisasikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Menurut Winataputra dan Budimansyah (2012:i):

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam "nation and character building." Dalam konteks ini peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bagi keberlangsungan berbangsa dan bernegara sangat strategis. Suatu negara demokratis pada akhirnya harus bersandar pada pengetahuan, keterampilan dan kebajikan dari warga negaranya dan orangorang yang mereka pilih untuk menduduki jabatan publik. Pendidikan kewargangaraan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik (to be good and smart citizens) yang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan kebinnekaan di Indonesia dan mempertahankan integritas nasional.

Selanjutnya menurut Budimansyah dan Suryadi (2008:68), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu yang mengemban misi nasional untuk bidang kajian mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "value-based education". Konfigurasi atau kerangka sistematik PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut: Pertama, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulai, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Kedua, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensidimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks Pancasila, substansi ide, nilai. konsep, dan moral kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Ketiga, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (content embedding values) dan pengalaman belajar (learning experience) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Tujuan yang hendak dicapai lewat internalisasi nilai-nilai budaya Sulawesi Utara dalam konteks pembelajaran PKn di sini adalah untuk pengembangan sikap toleransi siswa agar mereka mampu menyikapi keberagaman secara positif. Sehubungan dengan upaya peningkatan sikap toleransi siswa, Raihani (2011:23) berpendapat:

Education is seen as the most effective means, in the long term, to enable tolerance to flourish amongst people in a diverse society. School as an educational institution plays a pivotal role in promoting tolerance. It is where children learn and internalize values important to their life. Governments, educationists, and researchers have made some

tremendous efforts to ensure that school is a place of effective tolerance education.

Pendidikan dipandang sebagai cara yang paling efektif, dalam jangka panjang, yang memungkinkan berkembangnya toleransi antara orang-orang dalam masyarakat yang beragam. Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam mempromosikan toleransi. Sekolah adalah tempat di mana anak belajar dan menginternalisasikan nilai-nilai penting untuk kehidupan mereka. Pemerintah, pendidik, dan peneliti telah membuat beberapa upaya luar biasa untuk memastikan bahwa sekolah adalah tempat yang efektif untuk pendidikan toleransi.

E. Penutup

Kebudayaan dan pendidikan ibarat mata uang yang memiliki dua sisi tapi merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Hidup dan matinya suatu kebudayaan ditentukan oleh pendidikan. Dalm konteks keberagaman badaya di Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang menanamkan prinsip-prinsip keberagaman dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam membina keberagaman masyarakat Indonesia. Melalui pendidikan, keberagaman tidak menjadi sumber konflik, tetapi menjadi landasan dalam bertoleransi dan saling menghargai keberagaman yang ada demi mewujudkan Negara Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

BAB

2

FENOMENA KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Salah satu gambaran menarik dalam menggambarkan masyarakat Indonesia adalah pluralitas agama yang dianut oleh warganya. Kemajemukan ideologi ditandai dengan keberadaan Indonesia sebagai negara yang multi-religius. Beberapa agama yang dianut sebagian besar penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen (Protestan dan Katolik), Hindu, Budha dan Konghucu. Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 1971 dan tahun 2000, maka diperoleh data bahwa jumlah pendudukan muslim \pm 88%, Kristen \pm 10% \pm 2% Hindu, Budha dan Konghucu. Sementara itu menurut data sensus penduduk tahun 2010 jumlah penganut agama masing-masing agama adalah sebagai berikut: Islam 207.176.162 jiwa, Kristen Protestan 16.528.513 jiwa, Katolik 6.907.873 jiwa, Hindu 4.012.116 jiwa, Budha 1.703.254 jiwa, Khong Hu Chu 117.091 jiwa.

Tak bisa dipungkiri, Indonesia memang merupakan suatu bangsa yang terdiri atas berbagai kebudayaan dan adat-istiadat. Sayangnya, implementasi proses kehidupan bermasyarakat di tengah perbedaan dan keanekaragaman ini (suku bangsa, budaya, ras, agama, dan sejenisnya) tidaklah semudah apa yang dipikirkan. Pergeseran antar kelompok agama maupun suku, budaya ataupun adat istiadat yang berbeda seolah menjadi pemicu terjadinya suatu perpecahan horizontal antar masyarakat yang berlainan tersebut. Sejak tahun 1997 negara kita dilanda berbagai macam konflik. Konflik terjadi di berbagai

daerah di Indonesia, misalnya di Ambon, Papua, Kalimantan, Posso, dan di daerah-daerah lain di Indonesia. Konflik antar golongan dalam masyarakat seakan-akan tak terelakkan lagi di berbagai daerah di negara kita ini. Di Ambon misalnya, konflik awalnya hanya terjadi antara sekelompok orang akhirnya berkembang menjadi konflik antar agama dan menyebar ke daerah-daerah sekitar. Konflik yang terjadi di berbagai daerah ini mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan bahkan korban materi. Dengan adanya konflik ini banyak orang dibunuh dan saling membunuh; banyak orang kehilangan tempat tinggal karena dirusak massa, ada pula yang mengungsi ke pulau-pulau lain. Konflik-konflik ini memang sungguh ironis bagi negara Indonesia yang menganut paham bhinneka tunggal ika.

B. Data dan Fakta Kekerasan atas Nama Agama di Indonesia

Sejarah mencatat bahwa sejak jatuhnya Soeharto pada 28 Mei 1998 membawa Indonesia pada era baru yang dikatakan sebagai era reformasi. Pada masa peralihan kekuasaan itu, masyarakat dihadapkan pada peristiwa terorisme; berlanjutnya konflik-konflik horizontal yang mengobarkan sentimen etniskeagamaan dan tindakan anarkis lainnya. (Kusumadewi dalam Wirutomo, dkk. 2011:152).

Kekerasan atas nama agama di Indonesia telah berlangsung sejak lama. Dalam konteks ini, isu dominan yang berkembang dalam konflik-konflik itu adalah konflik Islam dan Kristen. Menurut laporan dari Dhakidae (2003) sebagaimana dikutip oleh Kusumadewi (2011) menunjukkan jumlah masjid dan gereja yang telah ditutup, dirusak dan dibakar di Indonesia sejak kemerdekaan hingga mencapai puncaknya pada periode 1995 hingga 1999. Selama periode itu tercatat ada 40 masjid dan 370 gereja telah ditutup, dirusak dan dibakar.

Periode	Masjid		Gerej	a
	Jumlah	%	Jumlah	%
1945-1954	0	0	0	0
1955-1964	0	0	2	0,33
1965-1974	1	1,8	46	7,53
1975-1984	6	10,91	89	14 ,57
1985-1994	8	14,55	104	17,02
1995-1999	40	72,73	370	60,56
Total	55	100	611	60,56

Sumber: Dhakidae (2003), Kusumadewi dalam Wirutomo, dkk. (2011:155).

Konflik di Maluku dan Poso pada medio 1999-2002 dapat dikatakan sebagai masa puncak eskalasi konflik antar pemeluk agama. Dua indikator utama untuk mengukur hal ini adalah banyaknya korba jiwa dan insiden kekerasan. Konflik Maluku merupakan rentetan konflik yang bernuansa keagamaan dengan jumlah korban paling besar, sementara jumlah insiden kekerasan pada konflik di Poso termasuk yang besar dan berjalan secara kontinu.

Konflik Ambon pertama kali terjadi pada tanggal 19 Januari 1999. Dalam kerusuhan ini baik pihak Muslim maupun Kristen paling sedikit lima ribu orang menjadi korban dan ribuan lainnya luka-luka. Konflik yang pada awalnya hanya terjadi di kota Ambon, ibukota propinsi Maluku dengan cepat menjalar ke wilayah-wilayah kepulauan Maluku lainnya dan ke propinsi Maluku Utara.

Kerusuhan Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah yang melibatkan kelompok Muslim dan Kristen. Kerusuhan ini dibagi menjadi tiga bagian. Kerusuhan Poso I (25-29 Desember 1998), Poso II (17-21 April 2000), dan Poso III (16 Mei - 15 Juni 2000). Pada 20 Desember 2001 Keputusan Malino ditandatangani antara kedua belah pihak yang bertikai dan diinisiasi oleh Jusuf

Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Poso).

Pada masa-masa selanjutnya, ketika konflik sudah mulai mereda, kekerasan berskala lebih kecil terjadi secara bergantian. Target dari aksi-aksi anarkis yang dilakukan para aktivis Islam radikal semakin bervariasi; tidak saja kepada kelompok Kristen yang dianggap sebagai musuh utama namun juga kepada kelompok agama lainnya. Beberapa peristiwa penyerangan terhadap kelompok agama maupun bangunan fisik milik kelompok agama tertentu dilancarkan. Penyerangan terhadap kelompok Jamaah Ahmadiyah yang dianggap sebagai aliran sesat dalam Islam adalah satu kasus yang terus menerus menjadi pemberitaan media massa. Bulan September 2002, penyerangan dilakukan terhadap kelompok tersebut di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penyerbuan berlanjut pada bulan Desember 2002 di Kuningan-Jawa Barat. Penyerangan terjadi lagi pada Juli 2005 terhadap kampus Mubarok, sebuah gedung universitas milik Ahmadiyah di Parung, Bogor. Perusakan masjid Ahmadiyah lainnya terjadi di Majalengka dan Ciaruten pada Agustus 2005. Menyusul kemudian, penyerbuan terhadap Masjid Kodian dan Majelis Taklim Jamaah Ahmadiyah pada Januari 2006 di Leuwisadeng, Bogor. (Kusumadewi dalam Wirutomo, 2011:158-159).

Setara Institute for Democracy and Peace, misalnya mencatat, dalam setahun (2007) setidaknya 185 tindak pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di mana serangkaian pengrusakan, kekerasan, dan penangkapan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap "sesat" dipertontonkan kepada publik dengan gamblang. Tercatat 108 kasus penutupan, penyerangan, dan perusakan gereja terjadi pada 2004-2007. Rinciannya, pada 2004 terdapat 30 kasus, 2005 ada 39 kasus, 2006 ada 17 kasus, dan 2007 ada 22 kasus. Provinsi yang terbanyak terjadi kasus-kasus tersebut adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Poso, dan Bengkulu. (Togatovo, 2012).

Wahid Institue melaporkan adanya peningkatan kekerasan atas nama agama di Indonesia. Tercatat ada 232 kasus terkait dengan kekerasan atas nama agama di 2009, sedangkan di 2008 dilaporkan ada 197 kasus. (Rizki, 2011).

Sementara itu menurut Setara Insitute, terdapat 91 peristiwa yang termasuk di dalam pelanggaran kebebasan beragama. Beberapa kasus pelanggaran kebebasan beragama yang dicatat Setara Institute antara lain insiden Gereja Huria Kristen Batak Protestan di Desa Ciketing, Bekasi, 12 September 2010. Penolakan atas pembangunan gereja berujung pada penusukan pendeta dan penatua HKBP. Selanjutnya, perusakan rumah dan masjid di Kampung Cisalada, Desa Ciampea Udik, Bogor, 2 Oktober 2010. Di Tasikmalaya, massa menggembok panti asuhan milik Ahmadiyah pada Desember 2010. Dalam aksi tersebut, 10 anak terkunci di dalam panti asuhan, padahal mereka akan mengikuti ujian sekolah. Kasus terakhir, dimana jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, diserang oleh sekelompok orang dan menimbulkan korban jiwa sebanyak tiga orang dan korban luka parah pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011. (Safitri, 2011).

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Indriaswati D Saptaningrum mencatat, sedikitnya ada 21 kasus yang terkait dengan jaminan kebebasan beragama antara Januari hingga April 2012. "Varian kasusnya pun beranekaragam, Elsam mencatat ada 11 varian pelanggaran terhadap jaminan kebebasan beragama dalam periode tersebut," Penutupan tempat ibadah dan kriminalisasi keyakinan menduduki peringkat pertama, yang masing-masing terdapat Berikutnya, berupa tindakan empat kasus. pengrusakan tempat ibadah, penyerangan aktivitas peribadatan, dan pembubaran kelompok kepercayaan yang masing-masing terdapat dua kasus. "Selanjutnya, masing-masing satu kasus berupa pelarangan pendirian tempat ibadah, pelarangan keyakinan, pengusiran karena tuduhan sesat, pembubaran dan pelarangan aktivitas keagamaan," (http://www.hukumonline.

com/berita/baca/lt4fcb8b567941d/kekerasan-atas-namaagama-masih-meningkat)

Masih menurut Indriaswati, persebaran kasusnya pun kian meluas. Bila sebelumnya terkonsentrasi di Jawa, khususnya bagian Barat, sekarang kasus serupa mulai menyeruak ke wilayah-wilayah lain. Indraswati mencontohkan, kasus GKI Yasmin di Bogor masih belum terselesaikan, sekarang muncul kasus serupa di Tambun, Bekasi. Penolakan dan penutupan tempat ibadah juga terjadi di beberapa wilayah lain, seperti Jambi dan Riau.

Sementara itu tindak kekerasan atas nama agama yang masih hangat di benak kita adalah kasus Sampang. Massa membakar pemukiman kaum Syiah, saat terjadi kerusuhan Syiah-Sunni di Desa Karanggayam, Omben Sampang, Jatim, Minggu (26/8). Bentrokan yang melibatkan warga Sunni dan Syiah tersebut dipicu ketidaksenangan warga Sunni terhadap kepulangan sejumlah santri warga Syiah dari Pesantren Yapi, Pasuruan. Akibatnya, seorang meninggal, empat lainnya luka parah, dan 37 rumah dibakar.

C. Akar Kekerasan atas Nama Agama Indonesia

1. Kesalahan Interpretasi dan Penafsiran Ayat-ayat Kitab Suci

Perlu disadari bahwa faktor kekerasan agama tidak hanya dipicu oleh faktor eksternal seperti kepentingan politik, ekonomi dan sosial. Faktor internal juga dapat memberikan kontribusi yang besar. Masalah interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu masalah utama yang bisa mendorong umat beragama melakukan tindak kekerasan. Di dalam sejarah kekristenan banyak tindakan kekerasan yang dilakukan oleh gereja karena kesalahan dalam melakukan penafsiran terhadap Kitab Suci. Orang-orang yang tekstualis memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab secara literal dan menerapkannya di dalam konteks yang berbeda. Proses eksegese yang sebenarnya diabaikan sehingga mereka gagal untuk mendapatkan makna dari apa yang tertulis dan

memusatkan perhatian terhadap teks secara mentah tanpa melakukan penggalian apapun.

Berdasarkan hal di atas agama terkesan merupakan sumber dari kekerasan akan tetapi pemahaman yang tekstualis terhadap Kitab Suci agamalah yang bisa menjadi variabel yang paling signifikan dalam mendorong timbulnya perilaku kekerasan agama. Di samping mendorong perilaku kekerasan agama, tekstualisme dan Islamisme juga berkorelasi positif dengan perilaku kekerasan umum dan kekerasan negara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa agama merupakan sumber identitas yang sangat kuat dalam diri seseorang. Agama profetik seperti Islam dan Kristen, cenderung melakukan kekerasan segera setelah identitas mereka terancam. Persaingan antar agama yang memicu konflik sangat mudah terjadi apabila salah satu kelompok merasa identitasnya terancam. Misalkan bisa kita lihat pada konflik Ambon dan Poso jika dalam konteks dalam negeri.

Potensi ini menjadi semakin besar ketika para pemimpin politik berusaha mengkonstruksi identitas negara berdasarkan agama tertentu yang mayoritas. Di satu sisi itu bisa menimbulkan arogansi dari kelompok pemeluk agama yang mayoritas dan perasaan terancam dan terintimidasi yang dirasakan oleh kelompok minoritas.

Namun demikian, sejarah kekristenan telah membuktikan bahwa semakin dekat gereja secara institusi dengan politik pemerintahan semakin bobrok kondisi keagamaannya. Usaha-usaha untuk mebentuk negara Kristen telah dilakukan dan terbukti gagal. Calvin mencoba menciptakan sebuah kota yang ilahi di Geneva dan tidak berhasil. Demikian juga pada abad ke-4 ketika Konstantinus bertobat dan menyatukan gereja dengan negara, pada akhirnya itu pun mengalami kegagalan baik di dalam sisi pemerintah maupun gereja itu sendiri. Gereja pada akhirnya

terlibat secara aktif dalam tindak kekerasan yang imoral dan melawan ajaran dari agamanya sendiri.

2. Solidaritas Akibat Ketidakadilan

Faktor kedua yang bisa menyebabkan terjadinya kekerasan atas nama agama adalah rasa solidaritas terhadap sesama pemeluk agama karena ketidakadilan yang mereka terima di negara mereka. Lingkungan pergaulan, manapun itu, yang tidak kondusif serta berpotensi menumbuhkan pola pikir sempit atau skeptis bahkan radikal terhadap agama yang ia anut. Sebagai contoh akhir-akhir ini banyak orang-orang Indonesia yang pergi ke Timur Tengah atau Afganistan bahkan beberapa negara lainnya seperti Filipina yang di mana pada awalnya tujuan mereka pergi ke sana ialah untuk studi namun kemudian setelah pulang kembali ke Indonesia mereka berubah menjadi teroris diakibatkan oleh pengaruh lingkungan serta ajaran selama mereka berada di sana dari orang-orang berpola pikir sempit serta radikal. Contoh lainnya ialah di mana tersangka teroris seperti Imam Samudera dan Amrozi yang memang sejak muda sudah dilatih dan tinggal di lingkungan militan teroris di Afganistan sehingga wajar jika begitu pulang ke Indonesia mereka sudah jadi teroris.

3. Ketidakpuasan Ekonomi

Ketidakpuasan ekonomi dan hal-hal yang bersifat material yang dia peroleh dalam hidup, sehingga untuk melampiaskan kekesalan dan ketidakpuasannya dia melakukan aksi teror dengan dalih atas nama agama karena mungkin saja hal itu justru akan mengobati ketidakpuasannya dalam bidang ekonomi tersebut.

4. Fundamentalisme Agama

Aksi-aksi kekerasan yang dipertontonkan kelompokkelompok tertentu atas nama agama jelas menodai cita-cita luhur Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia serta semangat toleransi antar sesama. Bahkan, tindakan-tindakan anarkis itu mencoreng ajaran dan misi suci kehadiran agamaagama, yaitu mengarahkan umat ke jalan yang paling damai. (Abdullah, 2011).

Jika kita mencermati kekerasan atas nama agama yang terjadi selang 10 tahun terakhir ini, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa akar semua kejadian itu adalah Fundamentalisme agama. Fundamentalisme agama telah memicu terjadinya konflik/kekerasan atas nama agama. Menurut Ohoitimur (2004), dalam konteks hubungan antar agama, terdapat sekurang-kurangnya tiga model relasi antarumat beragama, yakni; eksklusivisme, inklusivisme, dan suatu pluralisme. Eksklusivisme adalah paham mengklaim bahwa inti kepercayaan setiap agama bisa benar, ada pengakuan dan penghargaan terhadap tradisi-tradisi agama lain, tetapi semua manusia diselamatkan hanya melalui satu agama tertentu. Setiap agama kecenderungan untuk jatuh ke dalam paham ini. *Inklusivisme* merupakan paham yang lebih ekstrim, di mana paham ini mempunyai pandangan bahwa tidak ada satu pun agama yang menjadi pemilik kebenaran mutlak, karena setiap agama mengandung kebenaran dasar tertentu. Pada setiap agama ada benih kebaikan yang menyelamatkan, dan karena itu setiap agama harus dihormati, namun tidak semua agama bisa disebut sebagai jalan keselamatan yang paripurna. Konsekwensinya, kecenderungan menganggap tertentu lebih unggul dari agama yang lain tetap ada pada inklusivisme religius ini. Pluralisme religius adalah keyakinan bahwa semua agama mempunyai legitimasi yang setara dan bahwa tak satu pun agama bisa mengklaim diri sebagai pemilik kebenaran dan keselamatan mutlak.

Kecenderungan untuk jatuh ke paham *eksklusivisme* menghantar agama-agama jatuh ke dalam suatu fundamentalisme agama. Contoh kongkrit dari kecenderungan ini adalah banyaknya aksi kekerasan di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal

yang mengatas namakan agama tertentu. Menurut Barnes dalam Ohoitimur (2004), akar fundamentalisme agama berasal dari tradisi-tradisi formatif yang menghasilkan harmoni internal yang kemudian menjadi suatu kekuatan untuk menyerang suatu ancaman eksternal. Fundamentalisme agama menyebabkan agama-agama memandang agama lain sebagai musuh yang harus disingkirkan. Menurut Ohoitimur (2002) "... fundamentalisme tidak dimaksudkan keniscayaan memiliki kebenaran-kebenaran agama dalam fundamental yang diyakini sebagai hakikat agamanya. Fundamentalisme agama umumnya bercorak peyoratif dan merupakan suatu gerakan perlawanan terhadap keyakinan yang dianut oleh kebanyakan umat dari suatu agama. Sayangnya, percakapan tentang gerakan-gerakan garis keras dalam lingkungan agama sering kali dikaburkan oleh kegagalan membedakan fundamentalisme agama dari radikalisme agama."

Menurut Assegaf dalam Sumartana (2001) ada beberapa faktor mengapa agama menjadi penyebab kekerasan, yaitu: (1) ekslusivitas dari beberapa pemimpin dan penganut agama, (2) sikap tertutup dan saling curiga antaragama, (3) keterkaitan yang berlebihan terhadap simbol-simbol, (4) agama yang merupakan tujuan berubah menjadi alat, realitas menjadi sekadar kebijaksanaan, dan (5) kondisi politik, sosial, dan ekonomi.

Fundamentalisme agama dalam konteks Indonesia sering dikaitkaan secara erat dengan radikalisme agama. Menurut Azra (2002:112), isitlah "radikal" menurut pengertian kamus secara sederhana mengacu kepada keadaan atau orang atau gerakan tertentu yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara cepat dan menyeluruh yang bukan tidak sering dilakukan dengan menggunakan cara-cara tanpa kompromi dan bahkan kekerasan-bukan dengan cara-cara damai. Fundamentalisme dipandang sebagai suatu paham yang cenderung untuk

memperjuangkan sesuatu yang radikal. Golongan atau orang-orang yang menganut paham fundamentalisme disebut sebagai fundamentalis. Dalam konteks keagamaan orang-orang fundamentalis dimengerti sebagai penganut gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner yang selalu merasa perlu kembali ke ajaran asli seperti tertulis dalam masing-masing Kitab Suci atau sumber-sumber ajaran masing-masing. Lebih jauh lagi, Martin E. Marty dan R. Scott Appley dalam Pangalila (2010) mengatakan bahwa: "gerakan fundamentalisme dan kaum fundamentalis ditandai oleh sikap yang melawan atau berjuang (fight), yakni: (a) melawan kelompok manapun yang mengancam eksistensi dan identitasnya; (b) berjuang untuk menegakkan cita-cita yang meliputi persoalan hidup secara umum, seperti keluarga dan agama; (c) berjuang dengan kerangka nilai dan identitas yang umumnya diambil secara harafiah dari Kitab Suci atau ditafsirkan secara ekslusif; (d) berjuang melawan komunitas manapun yang dianggap menyimpang dari fundamen teologis yang mereka anut; (e) berjuang atas nama Tuhan atau atas nama simbol keagamaan.

Kecenderungan untuk jatuh ke fundamentalisme agama pada intinya menyebabkan kesulitan yang amat besar bagi terwujudnya masyarakat yang harmonis, khususnya masyarakat Indonesia yang multikultural dalam konteks hubungan antar agama-agama. Multikulturalisme yang seharusnya menjadi jaminan bagi penghargaan bagi agama-agama dan demi tercapainya negara Indonesia yang sungguh-sungguh ber-bhineka justru terhambat oleh fundamentalisme agama.

D. Solusi Mengatasi Kekarasan Atas Nama Agama

Franz Magnis Suseno (2012), menyatakan bahwa tugas negara adalah menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk memeluk dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Negara sebagai otoritas netral, yang harus

menjamin kebebasan beragama dan beribadah warga negaranya, tidak boleh menyatakan suatu agama atau kepercayaan itu tidak benar atau sesat. Berikut ini adalah beberapa solusi yang bisa ditempuh dalam mengatasi kekerasan atas nama agama di Indonesia:

1. Pendidikan Toleransi

Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Menurut Raihani (2011:25)"Tolerance literally means patience differences. In some instances, it connotes the attitude of passiveness towards something disliked, and often it means putting up with or enduring something disliked." Toleransi secara harafiah diartikan sebagai kesabaran (penerimaan) terhadap perbedaan. Dalam beberapa kasus, toleransi dikonotasikan sebagai sikap ketidakpedulian terhadap sesuatu yang tidak disukai, dan sering berarti tahan atau menahan sesuatu yang tidak disukai. Sejalan dengan pengertian di atas, Muldon, dkk. (2011:324) mendefiniskan toleransi sebagai berikut:

In its most basic form, tolerance requires that an individual who disapproves of another or of her actions nonetheless refrains from interfering with that other; thus, tolerance can be understood as the act of enduring or putting up with something you disapprove of. John Horton (1996: 32) casts tolerant acts as conflicts of reasons, some of which motivate an individual to disapprove of another and interfere with her actions and some of which motivate an individual to refrain from interfering in spite of his initial disapproval. One tolerates another when the reasons against interference trump the reasons in favor of interference. Similarly, David Heyd (1996: 11) casts tolerant acts as clashes of perspectives. One tolerates another when one ignores considerations of the other's actions and focuses instead on the other as a person. Thus, in Horton's picture, reasons that motivate individuals to tolerate others are reasons that manage to trump one's initial disapproval, while in Heyd's picture, we

are concerned with the relevant aspects of others' personhood that motivate individuals to act tolerantly.

Pendapat Muldon, dkk. di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Dalam bentuknya yang paling dasar, toleransi mensyaratkan bahwa seorang individu yang tidak suka terhadap orang lain atau tindakannya tetap menahan diri dan tidak menggangu orang tersebut, toleransi dapat dipahami sebagai tindakan bertahan atau kompromi dengan tidak disukai. John Horton (1996:32)sesuatu yang mengartikan toleransi sebagai benturan alasan, beberapa di antaranya memotivasi seseorang untuk menyetujui yang lain mencampuri tindakannya dan beberapa memotivasi seseorang untuk menahan diri dari campur tangan meskipun pada awalnya tidak setuju. ... Tidak jauh berbeda, David Hevd (1996:11) mendefinsikan toleransi sebagai benturan cara pandang. Seseorang bersikap toleran terhadap orang lain bukan karena penolakan terhadap tindakan orang tersebut, melainkan pertimbangan dari sisi yang lain, yaitu sebagai seorang manusia. Dengan demikian, dalam gambaran Horton, alasan yang memotivasi individu untuk bersikap toleransi terhadap orang lain adalah mengelola alasan kesetidaksetujuan awal. Atinya Heyd lebih menekankan pada aspek-aspek yang relevan kepribadian orang lain yang memotivasi individu untuk bertindak toleran.

Mengenalkan keberagaman agama, suku, ras, bahasa sejak dini harus menjadi agenda prioritas sekolah. Rasa toleransi terhadap keberagaman itu harus dibangun sejak dini dalam diri anak-anak. Dengan demikian, nantinya, mereka akan hidup dengan pemahaman yang benar akan keberagaman dan bisa menghormati keberagaman dalam interaksi mereka dengan teman-temannya.

Endang (2009:94) mengatakan bahwa; khusus berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan, lembaga pendidikan sekolah merupakan wahana yang paling tepat untuk melatih dan sekaligus menerapkan nilai-nilai ini. Hal ini utamanya disebabkan di dalam lingkungan sekolah siswa memiliki latar belakang yang sangat beragam, baik agama, susku, latar sosial ekonomi, latar pendidikan orang tua, daerah termasuk adat adat istiadat dan budaya. Dalam kondisi keberagaman ini sudah barang tentu akan ditemukan banyak perbedaan dalam sikap dan prilaku siswa. Sekolah dipandang sebagai wahana yang mempercepat impelementasi dari pluralisme melalui berbagai bentuk kegiatan seperti workshop, latihanlatihan dan kegiatan-kegiatan dalam kelompok kecil. Perbedaan-perbedaan inilah yang harus dipahami dan saling dihormati, sehingga memungkinkan tumbuhnya solidaritas dan kebersamaan antar sesama siswa. Menghormati perbedaan tidak berarti menghilangkan identitas diri, karena menghormati perbedaan sesungguhnya adalah memberikan peluuang dan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan karakteristik dirinya.

2. Dialog Intereligius

Tak bisa dipungkiri bahwa tekanan dan ancaman fundamentalisme agama telah menyebabkan pluralisme agama di Indonesia tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang unik dan patut dicermati secara intelektual dan dihargai dalam praksis hidup kongkrit. Kecenderungan ini telah menyebabkan pluralisme agama lebih ditandai oleh pertentangan dan konflik yang kemudian menjurus pada sikap permusuhan dan separatis. Di Indonesia, situasi dan kondisi seperti ini telah menjadi persoalan tersendiri. Isu perbedaan kultur dan agama telah menjadi isu sentral dalam berbagai bidang kehidupan, sebagai contoh; kerusuhan di Ambon, Poso, kasus HKBP, konflik Syiah dan Sunni di Sampang.

Fundamentalisme agama telah menyebabkan kesulitan untuk mempraktekkan toleransi dan kerukuran

antar umat berada di Indonesia. Fundamentalisme agama menyebabkan kurangnya penghargaan akan keunikan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh agama-agama di Indonesia. Menjadi pertanyaan: apa yang harus dilakukan untuk memposisikan kembali keunikan agama di Indonesia, sehingga tercipta toleransi dan kerukunan antar umat beragama?

Menurut Panikkar (1994), dialog yang dialogis antar umat beragama bisa menjadi jaminan bagi terciptanya masyarakat Indonesia yang plural dalam agama. "Dialog yang dialogis itu baru terjadi secara personal dan pluralistik di mana yang satu tidak dapat mereduksi yang lainnya, dan tidak dapat pula dipisahkan satu dari yang lainnya."

Sementara itu menurut Baidhawy (2010); Dialog bukan semata percakapan bahkan pertemuan dua pikiran dan hati mengenai persoalan bersama, dengan komitmen untuk saling belajar dan dapat berubah dan berkembang. "Berubah" artinya dialog terbuka, jujur dan simpatik dapat membawa pada kesepahaman melalui mana prasangka, stereotip, dan celaan dapat dikurangi dan dieliminir. "Tumbuh" karena dialog mengantarkan pada informasi, klarifikasi dari sumber primer dan dapat mendiskusikannya secara terbuka dan tulus. Dialog merupakan pangkal pencerahan nurani dan akal pikiran menuju kematangan cara beragama yang menghargai "kelainan" (the otherness).

Dalam kenyataan hidup beragama, ketika manusia hidup melalui perjumpaan agama-agama, seolah kita mendapatkan pengalaman antarkultur (intercultural experiences). Lewat dialog antar agama-agama, maka kita melibatkan secara kreatif kekuatan-kekuatan besar dalam kehidupan sipil di mana pertempuran ideologi antar agama-agama bisa dihindari. Pengalaman multikultural ini membuat kita mampu bangkit dan sadar dengan perspektif baru yang lebih memadai.

Multikulturalisme agama untuk dialog, bukanlah suatu pertentangan, tetapi merupakan teknologi masa depan yang muncul dari pandangan rasional otentik berbasis wahyu progresif yang merupakan dasar bagi semua pengalaman keagamaan dan kultural. Dialog antar agamaagama membawa bangsa Indonesia pada pandangan dunia keagamaan dan kultural yang tidak parsial atau ideologi sipil yang tidak diskriminatif.

Pada intinya tujuan dialog antara agama adalah pemahaman terhadap agama orang lain. Dialog bukan dimaksudkan untuk mengalahkan agama lain atau untuk mencapai kesepakatan penuh atau pada suatu agama universal, tetapi cita-cita yang hendak dicapai dalam dialog ialah cita-cita komunikasi untuk menjembatani jurang ketidaktahuan dan kesalahpahaman timbal-balik antara budaya dunia yang berbeda-beda, membiarkan mereka bicara dan mengungkapkan pandangan mereka dalam bahasa mereka sendiri. Tetapi tujuan dialog bukan untuk keseragaman bentuk atau mencapai reduksi kebermacaman manusia ke dalam agama, ideologi atau tradisi yang satu-satunya.

Dengan dialog antar agama yang semacam ini, maka fundamentalisme agama yang merupakan rintangan bagi terbentuknya masyarakat Indonesia yang multikultural dalam agama tidak menjadi hisapan jempol semata, tetapi benar-benar menjadi suatu kenyataan.

3. Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan

Solusi berikutnya yang dapat mengurangi kekerasan atas nama agama di Inondesia adalah lewat penguatan Pendidikan Kewarganegaraan dalam semua tingkatan pendidikan (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi). Memang tak bisa dipungkiri bahwa tujuan paling pertama dan terutama dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadikan warga negara suatu bangsa menjadi baik (to be good and smart citizens). Di Indonesia pendidikan yang

berorientasi pada pengembangan sikap toleransi dan saling menghargai secara tersirat telah diamanahkan pada implementasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa "pendidikan diselenggarakan secara demokratis dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa", lebih lanjut dinyatakan bahwa "pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat".

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 37, Pendidikan Kewarganegaraan ditempatkan sebagai nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi. Dalam bagian penjelasan hal ini dipertegas lagi bahwa "Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air."

Jika kita mencermati pasal 37 dalam UU Sisdiknas tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan memegang peranan sentral dalam mendidik manusia Indonesia menjadi warga negara yang baik yang menghargai perbedaan suku, agama, rasa, dan bahasa. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU Sikdisnas pasal 1 ayat 1:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah sarana yang tepat untuk menginternalisasikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Menurut Winataputra dan Budimansyah (2012:i):

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam "nation and character building." Dalam konteks ini peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sangat strategis. Suatu negara demokratis pada akhirnya harus bersandar pada pengetahuan, keterampilan dan kebajikan dari warga negaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk menduduki jabatan publik. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik (to be good and smart citizens) yang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan kebinnekaan di Indonesia dan mempertahankan integritas nasional.

Selanjutnya menurut Budimansyah dan Suryadi (2008:68), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "value-based education". Konfigurasi atau kerangka sistematik PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut: Pertama, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulai, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Kedua, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Ketiga, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (content embedding values) dan pengalaman belajar (learning experience) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

E. Penutup

Berdasarkan hasil studi terhadap fenomena kekerasan atas nama agama di Indonesia yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

- 1. Kekerasan atas nama agama di Indonesia adalah fenomena yang kongkrit dan terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
- Akar kekerasan atas nama agama di Indonesia adalah: kesalahan interpretasi dan penafsiran ayat-ayat Kitab Suci, solidaritas akibat ketidakadilan, ketidakpuasan ekonomi, dan fundamentalisme agama.
- 3. Solusi untuk mengatasi atau mengurangi kekerasan atas nama agama di Indonesia adalah melalui: pendidikan toleransi, dialog interreligius, dan penguatan Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

BAB

3

INTERNALISASI NILAI BUDAYA (LOCAL WISDOM) MASYARAKAT

A. Pendahuluan

Pendidikan sebagai sebuah proses transformasi budaya, berarti suatu bentuk kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Salah satu cara untuk mentransformasikan budaya adalah internalisasi nilai-nilai budaya dalam proses pembelajaran di sekolah. Internalisasi pada hakikatnya adalah sebuah proses menanamkan sesuatu. Sedangkan internalisasi nilai-nilai sosial budaya adalah sebuah proses menanamkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Internalisasi nilai budaya mempunyai manfaat sebagai pengembangan, penyaringan dan perbaikan budaya. Internalisasi budaya dapat berhasil apabila sosialisasi budaya dipahami dan dilakukan dalam kehidupan masyarakat seharihari (Erikson, 1989).

B. Ruang Lingkup Internalisasi Nilai-Nilai Budaya

1. Pengertian Internalisasi

Secara epistemologi kata internalisasi berasal dari kata *intern* atau kata internal yang berarti bagian dalam atau di dalam. Sedangkan internalisasi menunjukkan suatu proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia akhiran *isasi* diartikan sebagai proses. Sehingga internalisasi secara sederhana bisa diartikan sebagai "suatu proses memasukkan ke dalam."

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia internalisasi adalah penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008).

Menurut Mulyana (2004:21) sebagaimana dikutip dari Reber (1988:369) mengatakan internalisasi adalah menyatukan nilai dalam diri seseorang, atau dalam bahasa Psikologi merupakan penyesuaian keyakinan, nilai, sikap, praktik, dan aturan baku pada diri seseorang. Sementara itu menurut Kartono (2000:236) internalisasi adalah pengaturan ke dalam pikiran atau kepribadian, perbuatan, nilai-nilai, patokan-patokan, ide atau praktek-praktek dari orang-orang lain menjadi bagian dari diri sendiri.

Sementara itu Muhaimin (1996:153) mengatakan dalam proses internalisasi yang dikaitkan dengan pembinaan peserta didik atau anak asuh ada tiga tahap yang mewakili proses atau tahap terjadinya internalisasi, yaitu:

- a. Tahap Transformasi Nilai: Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan peserta didik atau anak asuh
- b. Tahap Transaksi Nilai: Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang bersifat interaksi timbal-balik.
- c. Tahap Transinternalisasi: Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi. Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal tapi juga sikap mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini komunikasi kepribadian yang berperan secara aktif.

Sementara itu menurut Al Muchtar (2004:281-182), proses internalisasi sistem nilai (yang terdiri dari seperangkat nilai-nilai) merupakan suatu proses bertahap.

Tahap pertama, manusia mempunyai potensi tentang nilainilai. Sistem nilai itu mengendalikan cara memandang, cara bersikap dan bertingkahlaku sesuai dengan norma yang berlaku. Agar dia tahu dan dapat tahu, antara lain dari "diberi tahu". Dari pemberitahuan itu, yang merupakan salah satu kegiatan pendidikan kelas, dipahami dan diterapkan dalam wujud pertimbangan-pertimbangan etis, yang pada akhirnya terlahir dalam perilaku. Pemberitahuan (informasi, motivasi) ini merupakan salah satu stimulus-stimulus yang merangsang atau menentang sikap atau nilai pada orang itu. Apabila rangsangan itu mengena, maka terbangkitlah perhatian atau minat untuk memperoleh informasi yang lebih luas dan lebih dalam. Ia berminat untuk "lebih tahu". Tahap ini dinamakan tahap motivasi.

Tahap kedua, adalah dimana orang mengadakan penilaian atas rangsangan itu dan membanding-bandingkannya dengan nilai-nilai yang dimilikinya. Sikap yang timbul dapat menolak atau menerima nilai-nilai, yang dianggapnya mempunyai guna, harga, menarik, menyenangkan, memuaskan atau menguntungkan bagi dirinya. Ada kemungkinan ia mencoba-coba dalam bentuk yang kongkrit dan kecil. Tahap ini dapat disebut tahap orientasi. Apabila tahap ini berhasil, maka tiba pada tahap yang berikutnya.

Tahap ketiga, dikenal dengan tahap penerimaan nilai-nilai baru itu, dan diserap dan ditempatkan dalam sistem nilai yang telah ada padanya. Individu yang bersangkutan menginternalisasikan nilai-nilai baru, sehingga tahap ini dapat disebut tahap akseptasi. Tahap orientasi dan tahap akseptasi adalah proses pencernaan yang berlangsung dalam organisme.

Tahap terakhir adalah tahap pengalaman, yang mewujudkan nilai-nilai itu dalam bentuk tingkah laku.

Berdasarkan beberapa tingkatan proses internalisasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam diri setiap individu pada dasarnya sudah memiliki potensi terhadap nilai. Penilaian terhadap nilai yang akan dijadikan pegangan dalam hidupnya tergantung pada penilaiannya terhadap berbagai nilai yang ada.

Menurut Umar (2011:41-43), internalisasi dasarnya merupakan proses belajar. Seseorang belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala pengetahuan, sikap-sikap, perasaan, dan nilai-nilai. Sejak lahir hingga meninggal dunia seseorang belajar dari pola pandangan, tindakan dan berinteraksi dengan segala macam individu dan lingkungan alam yang ada di sekelilingnya. Lingkungan pendidikan baik informal. formal dan nonformal memberikan berbagai pengetahuan, mengembangkan perasaan, emosi, motivasi, kemauan, keterampilan, nilai-nilai untuk menginternalisasikan semua itu dalam kepribadiannya. Internalisasi lebih mengarah pada aspek individu.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka internalisasi pada hakikatnya adalah sebuah proses menanamkan sesuatu. Sedangkan internalisasi nilai-nilai sosial budaya adalah sebuah proses menanamkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, di mana dalam konteks penelitian ini nilai-nilai sosial budaya Minahasa/Sulawesi Utara yang coba diinternalisasikan dalam Pembelajaran PKn di sekolah.

2. Pengertian Nilai

Menurut Mulyana (2004:7), kata value, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi nilai, berasal dari bahasa Latin valere atau bahasa Prancis Kuno valoir (Encyclopedia of Real Estate Terms, 2002). Sebatas arti denotatifnya, valere, valoir, value, atau nilai dapat dimaknai sebagai harga. Djahiri (1996:16), menyatakan bahwa nilai atau value berada dalam diri manusia (suara atau lubuk hati manusia) dengan acuan landasan dan/atau tuntutan nilai moral tertentu yang ada dalam sistem nilai dan sistem keyakinan yang bersangkutan. Oleh karena itu, nilai diartikan sebagai harga yang diberikan

seseorang/sekelompok orang terhadap sesuatu. Harga ini menyangkut dunia afektif manusia.

Menurut Al Muchtar (2004:272), dalam kamus bahasa Indonesia WJS Poerwadarminta dikatakan, bahwa nilai mempunyai arti: mutu, kadar, angka, kepandaian; sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Yang dimaksud dengan nilai ialah sesuatu yang menyenangkan (pleasant), memuaskan (satisfying), menarik (interesting), (useful), menguntungkan berguna (profitable). mengartikan nilai "A Value is a belief upon which a man act by preferences." Nilai adalah kepercayaan yang di atasnya seorang manusia memutuskan untuk bertindak". Maksud dari pengertian nilai menurut Allport ini ialah bahwa nilai merupakan suatu kepercayaan (belief) atau keyakinan yang relatif tahan lama tentang apa yang sepatutnya atau seharusnya diingini, baik yang berhubungan dengan cara bertindak maupun keadaan akhir eksistensi yang secara pribadi atau sosial lebih disukai. Allport menjelaskan bahwa nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Bagi Allport, nilai terjadi pada wilayah psikologis yang disebut keyakinan. Seperti ahli psikologi pada umumnya, keyakinan ditempatkan sebagai wilayah psikologis yang lebih tinggi dari wilayah lainnya seperti hasrat, motif, sikap, keinginan, dan kebutuhan. Karena itu, keputusan benar salah, baik-buruk, indah-tidak indah pada wilayah ini merupakan hasil dari sederetan proses psikologis yang kemudian mengarahkan individu pada tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan nilai pilihannya.

Di sisi lain Rocheah (1980:161) mendefinisikan nilai sebagai: "Value is enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end-state of existence". "Nilai merupakan keyakinan abadi dimana cara perilaku tertentu atau keadaan-akhir yang secara pribadi atau sosial lebih disukai daripada bentuk-bentuk berlawanan atau

kebalikan dari perilaku tertentu atau keadaan akhir." Fraenkel (1977:6) mendefinisikan pengertian nilai sebagai berikut: A value is a idea, a concept, about what someone think is important in life. When a person values something, he or she seems it worth while, worth having, worth doing, or worth trying to obtain. Nilai adalah sebuah ide, konsep, tentang apa yang orang pikir penting dalam hidupnya. Ketika seseorang menilai tentang sesuatu, ia atau dia melihatnya sebagai sesuatu yang berharga, pantas untuk didapat, pantas untuk dilakukan, atau pantas untuk diusahakan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa nilai merupakan suatu ide, konsep dan kepercayaan yang dijadikan patokan untuk menentukan pilihan dalam berpikir dan bertindak tentang sesuatu yang pantas atau tidak pantas. Ruang lingkupnya meliputi seluruh sisi kehidupan sebab tidak ada satu wilayah yang bebas nilai, termasuk dalam pendidikan. Semuanya terikat oleh nilainilai yang diyakini kebenaran dan disepakati bersama.

Sementara itu Elmubarok (2008:7) menyebutkan secara garis besar, nilai dibagi dalam dua kelompok yaitu nilai nurani (*values of being*) dan nilai-nilai memberi (*values of giving*). Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Sedangkan nilai-nilai memberi adalah nilai yang perlu dipraktekkan atau diberikan yang kemudian diterima sebanyak yang diberikan.

Robin M. Williams (1972) dalam Soeleaman (2010:36) mengatakan bahwa ada empat buah kualitas tentang nilainilai, yaitu:

a. Nilai-nilai mempunyai sebuah elemen konsepsi yang lebih mendalam dibandingkan dengan hanya sekedar sensasi, emosi, atau kebutuhan. Dalam hal ini nilai dianggap sebagai abstraksi yang ditarik dari pengalamanpengalaman seseorang.

- b. Nilai-nilai menyangkut atau penuh dengan semacam pengertian yang memiliki suatu aspek emosi. Emosi di sini mungkin diungkapkan sebenarnya atau merupakan potensi.
- c. Nilai-nilai bukan merupakan temuan kongkret dari tindakan, tetapi mempunyai hubungan dengan tujuan, sebab nilai-nilai berfungsi sebagai kriteria dalam memiliki tujuan-tujuan. Seseorang akan berusaha mencapai segala sesuatu yang menurut pandangannya mempunyai nilainilai.
- d. Nilai-nilai merupakan unsur penting, dan tidak dapat disepelekan bagi orang yang bersangkutan. Dalam kenyataan, nilai-nilai berhubungan dengan pilihan, dan pilihan merupakan prasyarat untuk mengambil suatu tindakan.

Berdasarkan kualitas nilai di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan konsepsi pribadi manusia tentang apa yang dianggap berharga dan penting dalam hidupnya. Nilai dalam hal ini menjadi patokan dan pegangan bagi manusia dalam bertindak dan berprilaku dalam masyarakat di mana ia berada.

Soeleaman (2010:37) selanjutnya mengatakan bahwa jenis-jenis nilai, menurut intensitasnya, ada yang disebut nilai-nilai yang tercernakan dan nilai-nilai yang dominan. Nilai-nilai yang tercernakan (*internalized values*) merupakan suatu landasan bagi reaksi yang diberikan secara otomatis terhadap situasi-situasi tingkah laku eksistensi, sedangkan nilai-nilai tercernakan tidak dapat dipisahkan dari si individu, serta membentuk landasan bagi hati nuraninya. Apabila terjadi pemerkosaan terhadap nilai-nilai tersebut, maka akan timbul perasaan malu atau bersalah yang sulit untuk dihapus. Nilai-nilai yang tercernakan bagi individuindividu artinya individu itu menghayati atau menjiwai suatu nilai sehingga ia akan memandang keliru pola perilaku yang tidak sesuai dengan nilai tersebut. Nilai-nilai yang

dominan artinya nilai-nilai yang lebih diutamakan daripada nilai-nilai lain. Fungsi nilai dominan ialah sebagai suatu latar belakang atau kerangka patokan bagi tingkah laku seharihari. Kriteria apakah suatu nilai itu dominan, ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Luas-tidaknya ruang lingkup pengaruh nilai tersebut dalam aktivitas total dari suatu sistem sosial.
- b. Lama-tidaknya pengaruh nilai itu dirasakan oleh kelompok masyarakat.
- c. Gigih-tidaknya (intensitas) nilai tersebut diperjuangkan atau dipertahahankan.
- d. Prestise orang-orang yang menganut nilai, yaitu orang atau organisasi-organisasi yang dipancang sebagai pembawa nilai.

Berdasarkan beberapa pengertian nilai di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi setiap individu. Nilai yang diyakini masing-masing individu dikongkritkan dalam tindakannya setiap hari. Dengan nilai manusia bisa mengukur apakah tindakan yang dilakukan itu bermanfaat atau tidak bagi kehidupannya.

3. Hierarki Nilai

Menurut Kaelan (2010:19-20), terdapat berbagai macam pandangan tentang nilai dalam hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masingmasing dalam menentukan pengertian serta hierarki nilai. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa nilai yang adalah nilai tertinggi material. kalangan berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Banyak usaha untuk menggolong-golongkan nilai tersebut dan penggolongan tersebut amat beranekaragam, tergantung pada sudut pandang dalam rangka penggolongan itu.

Max Scheler (Frondizi, 1963; Driyarkara, 1978; Kaelan, 2010:20). mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Nilai-nilai itu secara nyata ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkat ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakkan dan tidak mengenakkan yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak.
- b. Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkat ini terdapat nilainilai yang penting bagi kehidupan misalnya kesehatan, kesehatan jasmani, kesejahteraan umum.
- c. Nilai-nilai kejiwaan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini ialah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.
- d. Nilai-nilai kerohanian: dalam tingkat ini terdapat model nilai yang suci dan tak suci. Nilai-nilai semacam ini terdiri dari nilai-nilai pribadi.

Walter G. Everet (Kaelan, 2010:201-21) menggolongkan nilai-nilai manusiawi ke dalam delapan kelompok yaitu:

- a. Nilai-nilai ekonomis (ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli).
- b. Nilai-nilai kejasmanian (membantu pada kesehatan, efisiensi dan keindahan dari kehidupan badan).
- c. Nilai-nilai hiburan (nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan).
- d. Nilai-nilai sosial (berasal mula dari pelbagai bentuk perserikatan manusia).
- e. Nilai-nilai watak (keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan).

- f. Nilai-nilai estetis (nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni).
- g. Nilai-nilai intelektual (nilai-nilai pengetahuan dan pengejaran kebenaran).
- h. Nilai-nilai keagamaan.

Selanjutnya Notonagoro dalam Kaelan (2010:21), membagi nilai menjadi tiga macam yaitu:

- Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia, atau kebutuhan material ragawi manusia.
- Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
- c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas empat macam:
 - 1) *Nilai kebenaran,* yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.
 - 2) *Nilai keindahan* atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan (*aesthetis, gevoel, rasa*) manusia.
 - 3) *Nilai kebaikan*, atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak (*will*, *Wollen*, *karsa*) manusia.
 - 4) Nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Berdasarkan hierarki nilai di atas, maka bisa disimpulkan bahwa nilai dalam kehidupan kongkrit setiap individu memiliki tingkatan dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Masing-masing nilai memiliki tingkat prioritasnya masing-masing dalam kehidupan manusia.

C. Pengertian Budaya

Menurut Geertz (1975) budaya adalah: "an historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and their attitudes toward life". Dari definisi ini Geertz menjelaskan bahwa budaya adalah "Pola transmisi historis dari makna yang terkandung dalam simbol-simbol, suatu sistem konsepsi yang diwariskan dan disajikan dalam bentuk simbol-simbol cara manusia berkomunikasi, melestarikan, dan mengembangkan pengetahuan mereka dan sikap mereka terhadap kehidupan." definisinya tentang budaya, Berdasarkan Geertz menegaskan bahwa budaya adalah suatu dimensi yang aktif dan konstitutif dari kehidupan sosial daripada sekedar mekanisme penjamin integrasi sosial. Geertz melihat budaya sebagai "lengkung simbolis" atau "blueprint" yang dengannya seseorang bisa menciptakan dunia mereka yang bermakna dalam dua level sekaligus: emosi dan kognitif (Sutrisno dan Putranto, 2005, 212).

Menurut Kluckhohn dalam Geertz (1975:4-5) budaya dapat diartikan sebagai berikut:

(1) "the total way of life of people of a people"; (2) "the social legacy the individual acquires from his group"; (3) "a way of thinking, feeling, and believing"; (4) "an abstraction from behavior"; (5) a theory on the part of the anthropologist about the way in which a group of people in fact behave; (6) a "store-house of pooleed learning"; (7) "a set of standardized orientations to recurrent problem"; (8) "learned behavior"; (9) a mechanism for the normative regulation of behavior; (10) "a set of techniques for adjusting both the external environment and to other men": (11) "a precipate of history"

Dari pengertian di atas, maka secara garis besar menurut Kluckhohn budaya meliputi: (a). Total cara hidup manusia, (b). Warisan sosial dari individu yang diperoleh dari kelompoknya, (c). Sebuah cara berpikir, perasaan, dan kepercayaan, (d). Sebuah abstraksi dari tingkah laku, (e). Sebuah teori dalam ilmu antropologi tentang bagaimana cara sekelompok orang dalam

kelompok bertingkah laku sebuah gabungan dari apa yang dipelajari, (f). Segenap pedoman dasar untuk menyelesaikan masalah, (g). Tingkah laku yang dipelajari, (h). Sebuah mekanisme peraturan yang baku tentang tingkah laku, (i). Segenap teknik untuk menyesuaikan diri ke lingkungan luar dan ke orang lain, (j). Sebuah penerapan dari sejarah dan berbalik, mungkin dalam keputusasaan, sebagai kiasan, seperti peta, seperti sebuah saringan, dan seperti susunan angka-angka.

Di sisi lain Kroeber dan Kluckhohn sebagaimana dikutip oleh Sutrisno dan Putranto (2005, 8-9) mengatakan bahwa ada enam pokok mengenai budaya, yaitu:

- 1. *Definisi deskriptif*: cenderung melihat budaya sebagai totalitas komprehensif yang menyusun keseluruhan hidup sosial sekaligus menunjukkan sejumlah ranah (bidang kajian) yang membentuk budaya.
- 2. *Definisi historis*: cenderung melihat budaya sebagai warisan yang dialih-turunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya.
- 3. *Definisi psikologis*: cenderung memberikan tekanan pada peran budaya sebagai piranti pemecahan masalah yang membuat orang bisa berkomunikasi, belajar, atau memenuhi kebutuhan material maupun emosionalnya.
- 4. *Definisi struktural*: mau menunjukkan pada hubungan atau keterkaitan antara aspek-aspek yang terpisah dari budaya sekaligus menyoroti fakta bahwa budaya adalah abstraksi yang berbeda dari perilaku konkret.
- 5. *Definisi genetis*: definisi budaya yang melihat asal usul bagaimana budaya itu bisa eksis atau tetap bertahan. Definisi ini cenderung melihat budaya lahir dari interaksi antar manusia dan tetap bisa bertahan karena ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Berdasarkan beberapa definsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa budaya memiliki cakupan yang luas. Budaya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Budaya lahir dalam suatu masyarakat tertentu dan menjadi abstraksi dari perilaku kongkrit masyarakat tersebut.

Sementara itu menurut Koentjaraningrat (2002:181), budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan "budi" atau "akal". Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan: "hal-hal yang bersangkutan dengan akal." Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

Menurut Edward B. Tylor (1871) sebagaimana dikutip oleh Munch dan Smelser (1992:39) bahwa budaya adalah "that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits aquired by man as a member of society". Budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Sementara itu Fallon, dkk (2011:9) mengartikan budaya sebagai berikut:

Culture is the extent to which a group of individuals engage in overt and verbal behavior reflecting shared behavioral learning histories, serving to differentiate the group from other groups, and predicting how individuals within the group act in specific setting conditions. That is, "culture" reflects a collection of common verbal and overt behaviors that are learned and maintained by a set of similar social and environmental contingences (i.e., learning history), and are occasioned (or not) by actions and objects (i.e., stimuli) that define a given setting or context.)

Budaya berkaitan erat dengan kelompok individu, terutama tingkahlaku verbal yang dipelajari secara turun temurun. Bagaimana kelompok tertentu membedakan dirinya dengan kelompok lain dan bagaimana individu itu bertindak dalam situasi yang spesifik. Artinya, "budaya" mencerminkan perkataan dan perilaku-perilaku umum yang dipelajari dari konteks dan lingkungan budaya tertentu secara terus-menerus baik yang disebabkan oleh tindakan atau objek (stimulus) yang didefiniskan sebagai konteks tertentu.

Sementara itu dalam naskah Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa yang dikeluarkan Budava Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Kurikulum Tahun 2010 budaya diartikan sebagai: ".... keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan (belief) manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya. Sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan itu digunakan dalam kehidupan manusia dan menghasilkan sistem sosial. sistem ekonomi, sistem kepercayaan, pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial menjadi penghasil sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan; akan tetapi juga dalam interaksi dengan sesama manusia dan alam kehidupan, manusia diatur oleh sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan yang telah dihasilkannya. Ketika kehidupan manusia terus berkembang, maka yang berkembang sesungguhnya adalah sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, ilmu, teknologi, serta seni. Pendidikan merupakan upaya terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mereka memiliki sistem berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang diwariskan masyarakatnya dan mengembangkan warisan tersebut ke arah yang sesuai untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang."

Berkaitan dengan pengertian di atas, Soemardjan dan Soemardi (Soerjono Soekanto, 1982:151), merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan

kebudayaan, kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka secara singkat kebudayaan itu bisa diartikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Singkatnya kebudayaan atau budaya itu menyangkut totalitas aktivitas manusia dalam kehidupannya yang kongkrit.

Menurut Koentjaraningrat (1974:11) pengertianpengertian tentang budaya itu begitu luas karena dianggap menyangkut totalitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, maka guna keperluan analisis konsep kebudayaan itu perlu dipecah lagi ke dalam unsur-unsurnya. Masih menurut Koentjaraningrat (2002:203-204), unsur-unsur kebudayaan (cultural universals) yang merupakan isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia adalah:

- Bahasa
- 2. Sistem pengetahuan
- Organisasi sosial
- 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi
- 5. Sistem mata pencaharian hidup
- Sistem religi
- 7. Kesenian

Selanjutnya berkaitan dengan wujud kebudayaan, J. J. Honingman (1959:11-12) sebagaimana dikutip oleh Koentjaraningrat (1981:186) menyebutkan bahwa wujud kebudayaan adalah sebagai berikut: (1) *ideas*, (2) *activities*, dan (*artifacts*). Sementara itu Koentjaraningrat sendri menyebut bahwa wujud kebudayaan adalah:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.

- 2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Lebih jauh lagi, menurut Soelaeman (2010:42-43) sebagaimana dikutip dari Kluckhohn, sistem sosial budaya dalam masyarakat di mana pun di dunia, secara universal menyangkut lima masalah pokok kehidupan manusia, yaitu:

- 1. Hakikat hidup manusia (MH). Hakikat hidup untuk setiap kebudayaan berbeda secara ekstrem, ada yang berusaha untuk memadamkan hidup (nirvana = meniup habis), ada pula yang dengan pola-pola kelakuan tertentu menganggap hidup sebagai suatu hal yang baik, "mengisi budaya".
- 2. Hakikat karya manusia (MK). Setiap kebudayaan hakikatnya berbeda-beda, di antaranya ada yang beranggapan bahwa karya bertujuan untuk hidup, karya memberikan kedudukan atau kehormatan, karya merupakan gerak hidup untuk menambah karya lagi.
- 3. *Hakikat waktu manusia (MW)*. Hakikat waktu untuk setiap kebudayaan berbeda-beda, ada yang berpandangan mementingkan orientasi masa lampau, ada pula yang berpandangan untuk masa kini atau yang akan datang.
- 4. Hakikat alam manusia (MA). Ada kebudayaan yang menganggap manusia harus mengekplorasi alam atau memanfaatkan alam semaksimal mungkin, ada pula kebudayaan yang beranggapan bahwa manusia harus harmonis dengan alam dan manusia harus menyerah kepada alam.
- 5. Hakikat hubungan manusia (MM). Dalam hal ini ada yang mementingkan hubungan manusia dengan manusia, baik secara horizontal (sesamanya) maupun secara vertikal (orientasi kepada tokoh-tokoh). Ada pula yang berpandangan individualistis (menilai tinggi kekuatan sendiri).

Dari berbagai macam pengertian budaya di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah suatu hal yang kompleks berkaitan dengan kehidupan manusia. Budaya dekat dengan kehidupan manusia dan budaya adalah hasil karya manusia itu sendiri.

1. Kearifan Lokal / Local Wisdom

Secara etimologis kearifan lokal (*local wisdom*) berasal dari kata kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). *Local* berarti lokal, setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) atau kebijaksanaan. Dari pengertian di atas, maka *local wisdom* (kearifan lokal) dapat diartikan sebagai gagasan-gagasan, nilai, budaya setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. (Syamsiar, 2010:1).

Dalam disiplin ilmu antropologi kearifan lokal (local wisdom) lebih dikenal sebagai local genius. Local genius adalah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Quaritch Wales. Di Indonesia pengertian *local genius* ini dibahas panjang lebar oleh para antropolog, di antaranya Haryati Soebadio yang mengatakan bahwa local genius adalah juga cultural identity, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan tersebut mampu menyerap dan kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Avatrohaedi, 1986:18-19). Moendardjito dalam (Ayatrohaedi, 1986:40-41) mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai local genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciricirinya adalah:

- a. Mampu bertahan terhadap budaya luar.
- b. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar.
- c. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli.
- d. Mempunyai kemampuan mengendalikan.

e. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Kearifan lokal (*local genuine*) adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat lokal di daerah tertentu yang merupakan ciri keaslian dan kekhasan daerah tersebut tanpa adanya pengaruh atau unsur campuran dari daerah lainnya. Secara umum kearifan lokal dibedakan menjadi dua yaitu kerifan lokal yang dapat dilihat dengan mata (*tangible*) seperti objek-objek budaya, warisan budaya bersejarah dan kegiatan keagamaan; dan kearifan lokal yang tidak dapat dilihat oleh mata (*intangible*) yang berupa nilai atau makna dari suatu objek atau kegiatan budaya. (http://rumahpenasihabulfathon.blogspot.com/2012/08/lo cal-genius-cultur-indonesia.html)

Di sisi lain menurut Purba (2002) kearifan atau wisdom dapat dipahami sebagai suatu pemahaman kolektif, pengetahuan dan kebijaksanaan yang mempengaruhi suatu keputusan penyelesaian atau penanggulangan suatu masalah kehidupan. Kearifan dalam hal ini merupakan perwujudan seperangkat pemahaman dan pengetahuan yang mengalami proses perkembangan oleh suatu kelompok masyarakat setempat atau komunitas yang terhimpun dari proses dan pengalaman panjang dalam berinteraksi dalam suatu sistem dan dalam ikatan hubungan yang saling menguntungkan. (Marfai, 2012:33)

Sejalan dengan pendapat di atas, Gobyah (2003), mengatakan bahwa kearifan lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilainilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Sementara itu menurut Caroline Nyamai-

Kisia (2010), kearifan lokal adalah sumber pengetahuan yang diselenggarakan dinamis, berkembang dan diteruskan oleh populasi tertentu yang terintegrasi dengan pemahaman mereka terhadap alam dan budaya sekitarnya. (http://www.psychologymania.com/2012/11/pengertian-kearifan-lokal.html)

Menurut Andi dan Syarifuddin (2007), kearifan lokal merupakan suatu bentuk tata nilai, sikap, persepsi, perilaku dan respon suatu masyarakat lokal dalam berinteraksi pada suatu sistem kehidupan dengan alam dan lingkungan tempatnya secara arif. (Marfai, 2012:34)

Dari beberapa pengertian tentang kearifan lokal di atas, maka dapat dikatakan bahwa kearifan lokal adalah dasar atau patokan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengambil keputusan pada tingkat daerah dalam berbagai bidang termasuk pendidikan dan pengolahan sumber daya alam. Kearifan budaya lokal dengan demikian merupakan pengetahuan lokal yang sudah lama ada dalam masyarakat dan sudah menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama dan bertahan dari terpaan budaya asing.

Sartini (2006) mengatakan bahwa fungsi kearifan lokal adalah sebagai berikut:

- a. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam.
- b. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia.
- c. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
- d. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.
- e. Bermakna sosial misalnya upacara integrasi komunal/kerabat.
- f. Bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian.
- g. Bermakna etika dan moral.

h. Bermakna politik, misalnya upacara *ngangkuk merana* dan kekuasaan *patron client*.

Berdasarkan beberapa pengertian dan fungsi kearifan lokal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan budaya masyarakat setempat yang telah bertahan dalam kehidupan kongkrit masyarakat dan dijadikan patokan dalam bertindak dan berprilaku. Kearifan lokal telah menjadi nilai-nilai budaya yang menjadi perekat sekaligus menjadi jati diri masyarakat di mana mereka berada.

2. Proses Transformasi Budaya

Koentjaraningrat, (2002:233), menyatakan bahwa, proses pembudayaan melalui enkulturasi dilakukan oleh orang tua atau orang yang dianggap dituakan dalam komunitas itu, seperti pewarisan nilai tata krama, adat istiadat, keterampilan suatu suku/keluarga yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Proses akulturasi biasanya terjadi secara formal melalui pendidikan untuk disampaikan kepada orang lain yang belum mengenal, penyampaian informasi sekaligus sebagai bentuk penyadaran akan keberadaan suatu budaya, dan kemudian mengadopsi budaya tersebut untuk dijadikan sebagai budayanya.

Sementara itu menurut Poerwanto (2010:87) manusia merupakan kesatuan kebudayaan yang terpisahkan, dan makhluk manusia merupakan pendukung kebudayaan. Sekalipun makhluk manusia akan mati, tetapi kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan untuk keturunannya, demikian seterusnya. Pewarisan kebudayaan makhluk manusia, tidak hanya terjadi secara vertikal atau kepada anak cucu mereka saja; melainkan dapat pula dilakukan secara horizontal atau manusia yang satu dapat belajar kebudayaan dari manusia lainnya. pengalaman makhluk manusia dalam rangka kebudayaannya, akan diteruskan kepada generasi berikutnya atau dapat dikomunikasikan dengan individu

lainnya karena ia mampu mengembangkan gagasangagasannya dalam bentuk lambang-lambang vokal berupa bahasa; serta dikomunikasikan dengan orang lain melalui kepandaiannya berbicara dan menulis.

Dengan ini jelas bahwa pendidikan dalam konteks kebudayaan atau peradaban sesungguhnya tidak dapat dipisahkan, karena pendidikan menjadi salah satu media yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan kebudayaan dan bahkan menjadi sarana untuk mentransfer kebudayaan dari generasi sekarang ke generasi berikutnya. Dalam proses transformasi kebudayaan atau budaya tersebut, idealnya proses tersebut tidak berjalan secara cepat atau tidak imbang dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena akan menyebabkan masyarakat tidak dapat melakukan *reintegrasi* terhadap pola perubahan (katakanlah modernisasi) yang lebih cepat dibandingkan dengan perubahan kebudayaan yang berubah secara lambat (Evolusi). Untuk menghindari hal tersebut maka harus terjadi transformasi melalui pendidikan sehingga ketertinggalan budaya tidak terjadi. Dengan demikian maka proses perubahan akan seiring dengan pola perubahan kebudayaan masyarakat.

3. Pendidikan sebagai Proses Transformasi Budaya

Pendidikan sebagai sebuah proses transformasi budaya, berarti suatu bentuk kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Pewarisan kebudayaan ini dilakukan dalam tiga bentuk yaitu

a. Nilai-nilai kebudayaan yang sesuai akan diteruskan misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lain-lain.

- Nilai-nilai kebudayaan yang kurang sesuai akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang akan melahirkan bentuk kebudayaan baru
- c. Nilai-nilai kebudayaan yang tidak sesuai akan diganti dengan bentuk kebudayaan baru. (http://elearningpendidikan.com/pengertian-pendidikan-sebagai-proses-transformasi-budaya.html (2011).

Dari proses pewarisan budaya di atas bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat secara terus menerus bertahan karena dianggap sesuai dengan kepribadian masyarakat setempat. Di samping itu nilai-nilai budaya lokal juga mengalami perkembangan dan penyesuaian seiring berjalannya waktu.

Menurut Koentjaraningrat (1978:170), proses transformasi kebudayaan melalui pendidikan tersebut sebenarnya telah diajukan oleh Malinowski dalam teori fungsional tentang kebudayaan bahwa proses belajar sesungguhnya adalah ulangan dari reaksi suatu organisme dari luar dirinya, yang terjadi sedemikian rupa sehingga salah satu kebutuhan naluri dari organisme itu dapat terpenuhi. Dengan demikian proses pembentukan kebudayaan atau mentransfer kebudayaan itu berasal dari proses belajar dari suatu individu atau masyarakat sebagai bentuk penyesuai terhadap kondisi lingkungan masyarakat yang berubah. Karena secara tidak langsung perubahan tersebut membutuhkan kemampuan individu atau kelompok masyarakat untuk mempertahankan eksistensinya. Dan hal ini tentu dapat dilakukan melalui proses belajar.

Berdasarkan pandangan tentang belajar tersebut kemudian Malinowski merumuskan tentang *Learning Theory* yang membahas tentang fungsi unsur-unsur kebudayaan yang sangat kompleks yang intinya adalah bahwa segala aktifitas kebudayaan itu sesungguhnya adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berhubungan dengan

kehidupannya. Kebudayaan diperoleh manusia dengan proses belajar sejak ia dilahirkan (Koentjaraningrat, 1978:75).

Sementara itu menurut Poerwanto (2010:88-89) bahwa dalam banyak konsep, antara lain dikemukakan Kluckhohn, ditekankan bahwa kebudayaan merupakan proses belajar dan bukan sesuatu yang diwariskan secara biologis. Oleh karenanya kebudayaan merupakan pola tingkah laku yang dipelajari dan disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Paling tidak, ada tiga proses belajar kebudayaan yang penting, yaitu dalam kaitannya dengan manusia sebagai makhluk hidup, dan sebagai bagian dalam suatu sistem sosial. Proses belajar kebudayaan yang berlangsung sejak dilahrikan sampai mati, yaitu dalam kaitannya dengan pengembangan perasaan, hasrat, emosi dalam rangka pembentukan kepribadiannya; sering dikenal sebagai proses internalisasi. Karena makhluk manusia adalah bagian dari suatu sistem sosial, maka setiap individu harus selalu belajar mengenai pola-pola tindakan, agar ia dapat mengembangkan hubungannya dengan individu-individu lain di sekitarnya. Proses belajar ini lebih dengan sosialisasi. Selanjutnya, proses kebudayaan lainnya dikenal dengan istilah enkulturasi atau 'pembudayaan', yaitu seseorang harus mempelajari dan menyesuaikan sikap dan alam berpikirnya dengan sistem norma yang hidup dalam kebudayaannya.

D. Penutup

Proses pewarisan budaya berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Proses pewarisan budaya yang paling vital terlaksana dalam proses pendidikan. Budaya dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan keterkaitannya diibaratkan seperti sebuah uang koin yang memiliki dua sisi yang berbeda tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang utuh.

BAB

4

NILAI-NILAI BUDAYA SULAWESI UTARA

A. Pendahuluan

Berdasarkan pengertian nilai dan budaya yang telah dibahas dalam bagian sebelumnya, maka dalam konteks ini nilai budaya bisa diartikan sebagai sesuatu yang secara turuntemurun dianggap berharga oleh suatu masyarakat dan dijadikan patokan atau pedoman dalam bertindak dan kehidupan berprilaku dalam bermasyarakat. Konjtaraningrat (1985) sebagaimana dikutip oleh Budimansyah dan Suryadi (2004:63) mengatakan bahwa untuk menjadi produktif, manusia tidak hanya perlu dibekali dengan kemampuan dalam menguasai cabang-cabang keahlian, keterampilan dalam iptek tetapi juga dengan berbagai nilai dan sikap sebagai pedoman bagi perilakunya, dan sebagai landasan semangat untuk berkarya. Berbagai tata nilai yang mendominasi kelakuan manusia bersumber dari suatu sistem yang disebut 'sistem nilai budaya' (cultural value system) yaitu "... tingkat yang paling abstrak dari adat dan kebiasaan hidup manusia dalam bermasyarakat." Sistem nilai budaya terdiri dari konsepsikonsepsi yang hidup dalam alam-pikiran dari persentase terbesar warga suatu masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam kehidupan

Nilai-nilai budaya Sulawesi Utara yang paling dominan adalah: *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus,* dan *Torang Samua Basudara*. Berikut ini penjelasan masing-masing budaya tersebut:

B. Si Tou Timou Tumou Tou (Manusia Hidup Untuk Memanusiakan Orang Lain)

1. Ruang Lingkup Si Tou Timou Timou Tou

Nilai budaya Sulawesi Utara yang pertama adalah *Si Tou Timou Tumou Tou. Si Tou Timou Tumou Tou* merupakan ungkapan filosofis orang Minahasa terutama sejak Kekristenan masuk ke Tanah Minahasa, kemudian secara intelektual diangkat kembali oleh Sam Ratulangi.

Secara etimologis ungkapan ini menurut Ir. A. O. D. Pangaila sebagaimana dikutip oleh Sondak (2002:17-19), dapat dijelaskan sebagai berikut:

Si adalah "penunjuk orang", Tou adalah "manusia." Kedua kata ini berarti:

- a. "manusia sebagai makhluk hidup, manusia insani, manusia kodrat"
- b. "manusia yang mampu berdiri sendiri secara dewasa dan bertanggung jawab.

Timou: Tou = "manusia" + infiks - im - :

- a. "dilahirkan hidup",
- b. "hidup, hidup sebagai manusia"
- c. "hidup sebagai manusia dewasa, bertanggung jawab dan mandiri"

Tumou: Tou + infiks - um - :

- a. "mendorong, memberi semangat hidup, mendewasakan kehidupan sesama manusia"
- b. "ikut bertanggung jawab atas kehidupan sesama manusia"
- c. "tidak hidup semata-mata untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga memperhatikan sesama manusia"
- d. "turut membentuk kehidupan sesama manusia."

Dari pengertian etimologis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ungkapan *Si Tou Timou Tumou Tou* mengandung pengertian sebagai berikut:

a. Manusia dilahirkan dan hidup sebagai manusia,

- b. Manusia yang hidup, adalah hidup secara dewasa, bertanggung jawab dan mandiri,
- c. Manusia dewasa, bertanggung jawab dan mandiri ditandai oleh "pengabdiannya" untuk "membentuk dan melahirkan" manusia-manusia baru yang dewasa (melalui proses pendidikan), bertanggung jawab dan mandiri kelak di kemudian hari, untuk selanjutnya manusia baru yang telah terbentuk itu melanjutkan lagi tugas pengabdiannya dalam rangka "memanusiakan" manusia sesamanya. (Sondak, 2002:19-20).

Konsep Si Tou Timou Tumou Tou merupakan nilai budaya masyarakat Sulawesi Utara dan secara khusus orang Minahasa yang diwariskan secara turun temurun. Dalam konsep ini terkandung nilai-nilai dasar dalam kehidupan yang bisa berfungsi sebagai pendorong, pengendali kehidupan, baik dalam mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup, maupun untuk pengembangan dirinya. Oleh karena itu menurut Tilaar (1988:11) ungkapan Si Tou Timou Tumou Tou ini merupakan konsep yang unggul. Keunggulan konsep ini oleh Tilaar diuraikan secara ringkas sebagai berikut: Pertama, konsep tersebut lahir dari budaya Minahasa yang menunjukkan sifat dinamika. Hidup itu bukan statis. Manusia itu menjadi. Manusia itu suatu proses yang menjadi sesuatu. Si tou Minahasa harus menjadi "Si Tou Minahasa." Antara "si tou" dengan "Tou" ada perbedaan eksistensial. Kedua, konsep tersebut mengandug kadar elan vital manusia Minahasa. Budaya dan masyarakat Minahasa mempunyai dorongan hidup yang kuat karena tidak mengenal sekat-sekat sosial pembatas seperti dalam struktur sosial feodalisme. *Keempat*, konsep tersebut seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa hidup manusia itu bukan hanya sekedar hidup tetapi mengarah kepada sesuatu: Suatu konsep teleologis. Kelima, konsep yang dinamis dan futuristik-teleologis tersebut mempunyai arah mendunia, artinya realistik. "Si tou timou" bukan hanya

sekedar hidup, ia tumbuh atau "tumou" menjadi "tou" atau seorang yang kongkrit realistik. *Keenam*, konsep tersebut mengacu kepada suatu konsep manusia seutuhnya, atau suatu konsep integralistik mengenai manusia. *Ketujuh*, konsep "*Si Tou Timou Tumou Tou*", disamping merupakan konsep yang integralistik, juga tidak melebur nilai individual dalam kebersamaan yang anonim. *Kedelapan*, konsep ini mengimplikasikan bahwa dalam proses untuk menjadi Manusia Minahasa, adalah merupakan suatu proses me-Minahasa dalam budaya minahasa. Proses me-Minahasa tidak terjadi dalam ruang kosong tetapi dalam ruang lingkup budaya Minahasa.

2. Taksonomi Nilai Budaya Si Tou Timou Tumou Tou

Berikut ini adalah taksonomi nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* sebagaimana dijelaskan oleh Tilaar (2000:14-17):

a. Dimensi

Konsep Si Tou Timou Tumou Tou mengandung 4 dimensi. Dimensi si tou (St) menunjukkan bahwa manusia Minahasa / Sulawesi Utara itu ada. keberadaannya itu sekedar menyatakan bahwa dia ada, sekurang-kurangnya dalam peta dan statistik, juga dalam sejarah. Dimensi kedua ialah si tou timou (St2) yang menunjukkan bahwa adanya manusia Minahasa itu bukan sekedar berada di suatu tempat, ia juga bertumbuh. Dimensi ketiga ialah si tou timou tumou (St3) menunjukkan bahwa pertumbuhan seorang Minahasa / Sulawesi Utara itu bukan sekedar hanya bertumbuh, berkembang, dan kemudian mati, tetapi pertumbuhan itu mempunyai arah atau tujuan, atau adanya suatu "eschaton". Yang terakhir ialah dimensi si tou timou tumou Tou (St3T). perhatikan bahwa Tou yang berakhir ditulis dalam huruf besar karena menunjukkan perbedaan esensial dengan tou sebagai adanya. Inilah wujud atau citra manusia Minahasa / Sulawesi Utara.

b. Proses

Di dalam dimensi perkembangan citra manusia Minahasa / Sulawesi Utara tampak dengan jelas adanya suatu proses. Dari seseorang yang potensial menuju kepada seseorang Minahasa / Sulawesi Utara yang mendukung suatu citra tertentu. Setiap mengandung arah dalam proses perwujudannya. Dalam si tou (St) yang penting adalah keberadaan manusia Minahasa / Sulawesi Utara, sekurang-kurangnya dalam peta atau statistik, sedangkan dalam si tou timou (St2) diasumsikan bahwa proses bertumbuh itu terjadi dalam lingkungan tertentu ialah lingkungan budaya Minahasa / Sulawesi Utara. Pada dimensi si tou timou Tumou (St3) arah pertumbuhan itu semakin meluas horizonnya yaitu mendudukkan proses tersebut dalam usaha menjadikan manusia Minahasa / Sulawesi Utara sebagai anggota dalam masyarakat Indonesia. Dan akhirnya dimensi si tou timou tumou Tou (St3T) mengandung proses ke arah manusia Minahasa / Sulawesi Utara yang Pancasilais. Perlu kiranya berkesinambungan atau lebih tepat bersifat siklikal dan konsentris, artinya proses itu akan berulangulang dan semakin mendalam namun tetap berpusat pada manusia Minahasa / Sulawesi Utara itu atau si tou (St).

c. Eshatologi

Setiap dimensi dan proses menjadi manusia Minahasa / Sulawesi Utara ada serangkaian nilai yang sekiranya dominan. Dalam si tou (St), nilai-nilai budaya Minahasa / Sulawesi Utara yang positif seperti ingin maju, berdiri sendiri, ingin tahu, kesamaan citra manusia, dan sebagainya dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip penentu. Pada si tou timou (St2) antara lain nilai persaingan yang sehat, dan dalam si tou timou (St3) nilai kerjasama atau Mapalus dapat menjadi nilai yang dominan, sedangkan dalam si tou timou tumou Tou (St3T) nilai integralistik menjadi pedoman. Termasuk dalam

nilai integralistik ini nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi dalam budaya Minahasa / Sulawesi Utara.

d. Wawasan

Baik dalam proses maupun dalam sistem nilai, proses memanusia itu terikat dengan wawasan, mulai dari wawasan lokal sampai ke wawasan nasional bahkan universal. Wawasan lokal dari proses itu tentunya dimulai dalam wawasan Minahasa / Sulawesi Utara yang semakin meluas ke arah budaya Nusantara. Yang penting dalam hal ini ialah adanya adanya lingkungan budaya yang terpelihara dan berkembag. Oleh sebab wawasan pertama proses si tou (St) itu adalah lingkungan keluarga, maka budaya Minahasa / Sulawesi Utara itu pun perlu dihidupkan dan dihidupi di dalam keluarga.

e. Lingkungan Budaya

Seperti yang telah dijelaskan di atas, proses memanusia terjadi dalam suatu kondisi interaksi dengan sesama manusia yang berbudaya. Betapa bahayanya seseorang yang dibesarkan dalam suatu lingkungan tanpa budaya. Budaya adalah wadah dimana seseorang dapat menemukan jati dirinya atau identitasnya. Seseorang yang tercabut dari kebudayaannya sulit untuk dapat menentukan arah hidupnya atau mengembangkan kepribadiannya secara penuh.

f. Kualitas Manusia

Akhirnya, hasil akhir dari proses memanusia ini ialah manusia Minahasa / Sulawesi Utara yang berkualitas tertentu, yang telah memiliki, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai budaya Minahasa / Sulawesi Utara dengan dimensi nasional. Pada akhirnya pengembangan manusia Minahasa / Sulawesi Utara atau si tou Minahasa / Sulawesi Utara adalah manusia Indonesia seutuhnya yang dapat menyumbangkan nilai-nilai yang terbaik orang Minahasa / Sulawesi Utara bagi pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Tabel Taksonomi "Si Tou Timou Tumou Tou"

Dimensi	Proses	Eshatologi	Wawasan	Lingkungan Budaya	Kualitas Manusia
1	2	3	4	5	6
Si tou (St)	- Eksistensi manusia - Keberadaan manusia Minahasa/ Sulawesi Utara	- Ingin maju (achievement motive) - Ingin tahu - Kesamaan, bukan feodalisme - Budaya malu	Lokal	Budaya Minahasa/ Sulawesi Utara	- Mengenal budaya Minahasa/ Sulawesi Utara
Si tou-timou (St2)	- Me-Minahasa - Menjadi seseorang	- Budaya Mapalus - Ingin bersaing	Lokal dengan dimensi nasional	Budaya Minahasa/ Sulawesi Utara	- Memiliki dan menginternalisasikan budaya Minahasa / Sulawesi Utara

Si tou timou	- Ada hidup dan	- Kerjasama	Nasional	- Budaya	- Menghayati dan
tumou (St3)	kehidupan	- Kebersamaan		Indonesia	mengamalkan dan
	- Meng-Indonesia				mengembangkan
					budaya Minahasa /
					Sulawesi Utara yang
					berdimensi nasional
Si tou timou	- Manusia	- Manusia	Nasional-	- Budaya	- Manusia Minahasa /
tumou Tou	Minahasa /	Indonesia	universal	nasional	Sulawesi Utara yang
(St3T)	Sulawesi Utara	seutuhnya	Manusia	dengan	berkualitas: Manusia
	Pancasila	- Integralistik	Minahasa	dimensi	Indonesia seutuhnya
			dalam	universsal	
			masyarakat		
			Pancasila		

Sumber: Tilaar (2000:17

C. Mapalus (Gotong-royong)

Budaya dominan masyarakat Sulawesi Utara berikutnya adalah, budaya Mapalus. Mapalus dalam arti yang sederhana berarti bentuk kerjasama atau gotong rovong mengerjakan suatu pekerjaan. Istilah Mapalus itu sendiri merupakan gabungan dari kata ma (saling) dan palus (tuang, tumpah). Jadi secara etimologis Mapalus berarti saling menumpah atau saling menuang. Konsep "Si Tou Timou Tumou Tou" dalam realitas kehidupan manusia Minahasa / Sulawesi Utara, sejak dini sekali muncul dalam wujud ethos kerja *Mapalus* (Maendo dalam Bahasa Tountemboan). Mapalus dapat dianggap sebagai aktualisasi yang paling kongkrit tentang makna hakiki "Si tou timou tumou tou." Nilai budaya Mapalus dalam prakteknya secara jelas dapat dilihat dari 4 (empat) asas pelaksanaanya (kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, kerjasama dan keagamaan), dan 5 (lima) prinsip dalam segi pengelolaan kehidupan Mapalus itu (tolong menolong, keterbukaan, disiplin kelompok, kebersamaan, dan daya gunahasil guna). Dalam mengahadapi proses modernisasi akibat kemajuan teknologi dengan kemungkinan terjadinya proses the humanisasi sebagai akibat proses industrialisasi, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Mapalus, dapat menjadi pembendung efektif (http://happycristian.blogspot.com/2012/03/ makna-di-balik-ungkapan-sitou-timou.html).

Mapalus adalah suatu sistem atau teknik kerjasama untuk kepentingan bersama dalam budaya Minahasa / Sulawesi Utara. Menurut Turang (1997:5) Mapalus merupakan suatu sistem kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, sebagai suatu aktualisasi hakekat manusia sebagai makhluk kerja bersama, berke-Tuhan-an, dan taat pada kaedah sistem nilai masyarakat. Secara fundamental, Mapalus adalah suatu bentuk gotong-royong tradisional yang memiliki perbedaan dengan bentuk-bentuk gotong royong modern, mis: perkumpulan atau asosiasi usaha. Mapalus bukan sekedar suatu "kerjasama" (cooperation) yang bekerjasama untuk suatu kepentingan belaka,

melainkan suatu keutuhan hidup "kerja bersama" (working togetherness) dalam bidang ekonomi, budaya, organisasi dan manajeman kerja bersama, masyarakat, keagamaan, pertahanan dan keamanan. Secara filosofis, Mapalus mengandung makna dan arti yang sangat mendasar. Mapalus sebagai Local Spirit and Local Wisdom masyarakat Minahasa / Sulawesi Utara yang terpatri dan berkohesi di dalamnya: 3 (tiga) jenis hakekat dasar pribadi manusia dalam kelompoknya, yaitu: Touching Hearts, Teaching Mind, and Transforming Life. Mapalus adalah hakekat dasar dan aktivitas kehidupan orang Minahasa / Sulawesi Utara yang terpanggil dengan ketulusan hati nurani yang mendasar dan mendalam (touching hearts) dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menjadikan manusia dan kelompoknya (teaching mind) untuk saling menghidupkan dan mensejahterakan setiap orang dan kelompok komunitasnya (transforming life). Sebagai sebuah sistem kerja memiliki nilai-nilai etos seperti, etos resiprokal, etos partisipatif, solidaritas, responsibilitas, gotong royong, good leadership, disiplin, transparansi, kesetaraan dan trust (Umbas, 2011).

Seiring dengan berkembangnya fungsi-fungsi organisasi sosial yang menerapkan kegiatan-kegiatan dengan asas *Mapalus*, saat ini, *Mapalus* juga sering digunakan sebagai asas dari suatu organisasi kemasyarakatan di Minahasa.

Mapalus berasaskan kekeluargaan, keagamaan, dan persatuan dan kesatuan. Bentuk Mapalus, antara lain:

- 1. Mapalus tani
- 2. Mapalus nelayan
- 3. Mapalus uang
- 4. Mapalus bantuan duka dan perkawinan; dan,
- 5. *Mapalus* kelompok masyarakat.

Dalam penerapannya, *Mapalus* berfungsi sebagai daya tangkal bagi resesi ekonomi dunia, sarana untuk memotivasi dan memobilisasi manusia bagi pemantapan pembangunan, dan merupakan sarana pembinaan semangat kerja produktif untuk keberhasilan operasi mandiri, *mis: program intensifikasi dan*

ekstensifikasi pertanian. Prinsip solidaritas yang tercermin dalam Mapalus terefleksi dalam perekonomian masyarakat di Minahasa, yaitu dikenalkannya prinsip ekonomi Tamber (Senduk, 2010). Prinsip ekonomi Tamber merujuk pada suatu kegiatan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, atau warga sewanua (sekampung) secara sukarela dan cuma-cuma, tanpa menghitung-hitung atau mengharapkan balas jasa. Prinsip ekonomi Tamber berasaskan kekeluargaan. Dari segi motivasi adat, prinsip ini mengandung suatu makna perekat kultural (cagar budaya) yang mengungkapkan juga kepedulian sosial, bahkan indikator keakraban sosial.

Menurut Umbas (2011) dari ciri, struktur dan sifatnya, Mapalus pada akhirnya dapat kita katakan sebagai sebuah sistem nilai yang menyatu dalam keterikatan (interelation) masingmasing nilai, yakni antara resiprokal, responsibilitas, disiplin, kesetaraan, partisipatif, solidaritas, keadilan sosial, pluralisme, dan kasih. Sebagai perwujudan kebudayaan Minahasa / Sulawesi Utara, Mapalus merupakan sistem etika sekaligus sistem sosial, dulunya dimaksudkan sebagai suatu wahana dari masyarakat Minahasa dalam upaya produksi, tetapi dengan adanya bahwa usaha produksi merupakan suatu proses produksi sosial, maka Mapalus sebenarnya telah berkembang dan melakukan semua unsur ekonomi, yaitu proses produksi sekaligus distribusi dan konsumsi. Asas dan prinsip Mapalus dalam lingkup proses produksi ini, dipandang oleh banyak pihak dikandung oleh nilai-nilai yang dapat diangkat di konteks yang lebih luas.

Menurut Inkiriwang (1993:2-3), makna yang terkandung dalam *Mapalus* adalah sebagai berikut:

- 1. *Ma* (saling): menggambarkan pekerjaan/kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara timbal balik atau berbalasan. Ini berarti bahwa terdapat sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lainnya untuk maksud tertentu.
- 2. *Palus* (tuang, tumpah): mengandung makna dari yang berisi ke yang kosong; yang ada mengisi pada yang kosong.

Adapun ukuran berapa besar atau banyaknya tidak dapat ditakar karena dilaksanakan dengan tidak segan-segan atau spontan secara sukarela.

Kesimpulannya bahwa kata *Mapalus* itu tidak lain ialah bentuk kerja sama tolong-menolong yang timbul secara spontan atau sukarela di antara sejumlah orang tertentu. Kerjasama tolong-menolong tersebut walalupun secara sukarela akan tetapi mengandung prinsip timbal-balik (*principle of reciprocity*).

Menurut Turang (1997:5-6), Mapalus merupakan suatu sistem kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, sebagai suatu aktualiasi hakekat manusia sebagai makluk kerja bersama, berke-Tuhan-an dan taat pada kaedah sistem nilai masyarakat. Oleh karenanya, tempo dulu Mapalus sangat dihormati oleh masyarakat Minahasa. Mapalus bukan suatu "kerjasama" (cooperation) yang bekerjasama untuk suatu kepentingan belaka, melainkan suatu keutuhan hidup "kerja bersama" (working togetherness) dalam bidang ekonomi, budaya, organisasi dan manajemen kerja bersama, masyarakat, keagamaan, pertahanan dan keamanan. Ada 5 (lima) azas Mapalus, yaitu:

- 1. Azas religious
- 2. Azas kekeluargaan
- 3. Azas musyawarah dan mufakat
- 4. Azas kerja bersama
- 5. Azas persatuan dan kesatuan.

Dewasa ini konsep *Mapalus* bagi masyarakat Sulawesi Utara, secara khusus Minahasa telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Saat ini *Mapalus* telah mengakar menjadi nilai budaya masyarakat yang nampak jelas dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara kongkrit budaya *Mapalus* dapat dilihat lewat kegiatan-kegiatan bersama masyarakat tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, dan bahasa. Sebagai contoh: kegiatan saling menjaga tempat ibadah ketika perayaan-perayaan besar agama.

Menurut Umbas (2011)nilai budaya Mavalus mengandung beberapa nilai kehidupan yang penting, yaitu: Pertama, nilai-nilai yang memerdekakan (to deliberate). Prinsip utama dari kegiatan *Mapalus* agar anggota atau siapapun yang terlibat akan dibebaskan dari beban-beban manusiawi yang kadang-kadang tidak dapat dipikul sendiri. Kemerdekaan yang dimaksud di sini adalah kebebasan dari belenggu keterbatasan individu. lebih mengedepankan karena itu Mapalus kemerdekaan adalah kolektivisme. Sehingga kerelaan memberikan diri untuk kepentingan bersama di mana individu di dalamnya terbebas dari belenggu keterbatasannya. Kedua, nilai-nilai yang mensejahterakan (to wellfare), adalah harapan dan cita-cita untuk dicapai demi kesejahteraan bersama. Tidak ada dalam kamus Mapalus vang berharap terjadi kemelaratan. Ketiga, nilai-nilai yang memanusiakan (to humanity) di atas dari semua itu, Mapalus memiliki cita-cita luhur agar masyarakat secara luar mampu menjadikan manusia sebagai makhluk yang patut ditempatkan secara bermartabat. Karena itulah gagasan Si Tou Timou Tumou Tou menjadi sumber inspirasi bagi pelaksanaan Mapalus.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Mapalus* sebagai nilai budaya lokal masyarakat Sulawesi Utara menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dengan sesama manusianya. Lewat *Mapalus* manusia menemukan kepenuhan eksistensinya sebagai manusia dalam relasinya dengan orang lain.

D. Torang Samua Basudara

Torang Samua Basudara merupakan semboyan yang dicetuskan oleh tokoh nasional asal Sulut E. E. Mangindaan ketika beliau menjabat sebagai Gubernur Propinsi Sulawesi Utara. Semboyan Torang Samua Basudara sejak lama telah tumbuh dan berkembang sebagai nilai budaya masyarakat Sulawesi Utara. Semboyan ini dihayati dan diimplementasikan

sepenuhnya oleh warga Nyiur Melambai/Sulawesi Utara, sehingga menjadi sebuah kearifan lokal yang kokoh dan penangkal dari berbagai potensi konflik, terutama konflik sosial tahun 1998-2000. *Torang Samua Basudara* telah menjadi slogan yang sangat popular di Bumi Nyiur Melambai / Sulawesi Utara. Slogan ini bukan hanya slogan kosong, tetapi telah menjadi bagian hidup dari masyarakat Sulawesi Utara. Ini terbukti dari kondusifnya keamanan, kerukunan, dan harmoni masyarakat Sulawesi Utara. Prinsip *Torang Samua Basudara* menjadi identitas masyarakat Sulawesi Utara yang secara perlahan telah menjadi perhatian secara nasional dan internasional.

Prinsip Torang Samua Basudara mengedepankan supremasi toleransi yang merupakan fondasi paling mendasar untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan masyarakat. Masyarakat Sulawesi Utara merupakan masyarakat multi dimensi yang terbentuk dari berbagai kepercayaan, suku, dan budaya yang berbeda. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai corak, dan sifat yang berbeda sesuai dengan tingkat pendidikan, pergaulan dan pengalamannya. pengalaman, pendidikan, budaya membentuk karakter setiap orang. Adalah tidak mungkin memaksakan selera kita kepada orang lain. Yang mungkin adalah setiap pribadi menyesuaikan diri dengan orang lain.

Nilai budaya *Torang Samua Basudara* secara jelas menjadi alat pemersatu dan penjaga kerukunan hidup masyarakat Sulawesi Utara. Fakta berbicara bahwa ketika daerah-daerah lain di sekitar Sulawesi Utara (SULUT) terbakar emosi untuk berkonflik dengan mengatasnamakan agama, ternyata SULUT sulit disulut dan tetap hidup dalam kerukunan.

Secara mendalam nilai budaya *Torang Samua Basudara* mengandung dimensi-dimensi sebagai berikut:

- 1. Menjadikan nilai *Torang Samua Basudara* sebagai *the way of life* (cara dan pandangan hidup).
- 2. Menjunjung tinggi rasa toleransi.

- 3. Rasa hormat kepada orang tanpa memandang ras, agama dan keyakinan
- 4. Siap membantu sesama tanpa memandang latar belakang.
- Menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mengedepankan demokrasi (http://sirwayans.wordpress.com/2012/05/23/torangsamua-basudara/).

Dari berbagai pengertian dan dimensi nilai budaya *Torang Samua Basudara* di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Sulawesi Utara dalam kehidupan setiap hari tidak pernah memandang perbedaan agama, suku, bahasa sebagai halangan untuk berelasi dengan orang lain. Masyarakat dari latar belakang apa pun dianggap saudara yang harus dihargai hakikatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

E. Beberapa Penelitian tentang Budaya

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Penelitian Th. Wawointana (2001) dengan judul: Pelestarian Mapalus Di Minahasa dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan Nasional: Suatu Tinjauan tentang Sistem Gotong-Royong pada Masyarakat di Kabupaten Minahasa menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, sistem budaya Mapalus hidup baik dalam masyarakat Minahasa sejak zaman nenek moyang hingga dewasa ini. Kehidupannya itu berlangsung turun-temurun sebagai konvensi masyarakat. Dalam kehidupannya yang turun-temurun itu, berlangsunglah Mapalus di berbagai bidang. Bidang-bidang itu adalah bidang pertanian, perikanan, pembangunan rumah, peristiwa kedukaan, dan penggunaan uang.

Kedua, Kualitas dan kuantitas Mapalus akhir-akhir ini mengalami kemerosotan dan tidak sekuat prinsip semula. Tapi dibalik itu muncul pula kesadaran dari pihak-pihak tertentu akan perlunya pelestarian nilai budaya Mapalus yang perlu

dilestarikan.

Ketiga, faktor-faktor penyebab merosotnya Mapalus ada dua segi utama, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern penyebab merosotnya Mapalus terkategori secara fisik dan psikis. Secara fisik adalah berubahnya sistem organisasi Mapalus, jumlah anggota, tingkat sosial ekonomi anggota yang bergeser, dan lingkungan tempat Mapalus itu hidup. Faktor psikis adalah perubahan pola pikir anggota masyarakat. Sementara itu faktor ekstern penyebab kemerosotan Mapalus adalah pengaruh sikap hidup, nilai-nilai kehidupan dan normanorma kemasyarakatan, dan cara berpikir manusia.

Keempat, dengan melihat realitas pelaksanaan atau praktek Mapalus di Minahasa dewasa ini, dapat ditentukan langkah atau upaya yang tepat dalam pelestariannya. Mapalus perlu dilestarikan karena sistem gotong-royong tolong-menolong ini merupakan satu titik mosaik budaya nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan nasional.

Penelitian Lexi A. Lonto (2001) dengan judul: *Peran Elit Agama dalam Membina Kerukunan Hidup Antarumat Beragama di Kota Manado* menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, realitas kehidupan antar umat beragama di Kota Manado (Sulawesi Utara) menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Masyarakat Manado, yang memeluk beraneka macam agama, yaitu Kristen, Islam, Katolik, Budha, dan Hindhu dapat hidup rukun dalam beraktivitas di berbagai bidang kehidupan. Kerukunan hidup antarumat beragama di Manado terwujud dengan tidak terlepas dari peran elite agama. Peran elite agama ini terkoordinasi melalui organisasi BKSAUA (Badan Kerja Sama Antara Umat Beragama). Melalui badan ini, para elite agama saling berembug dan mengkoordinasikan diri dengan para umatnya agar hidup rukun dan seiya-sekata dalam beraktivitas di berbagai bidang kehiduupan, misalnya bidang sosial budaya, ekonomi, politik, dan keamanan. Dalam bidang

sosial budaya, misalnya, peran elite agama lebih kokoh lagi dengan dilatarbelakanginya kehidupan masyarakat Manado melalui semboyan *Torang Samua Basudara*, yang artinya kita semua bersaudara. Semboyan ini lebih bermakna luas bahwa masyarakat Sulawesi Utara adalah saudara tanpa membedabedakan adat-istiadat, suku bangsa, dan agama. Tidak hanya itu, masih ada semboyan lagi bernama *Mapalus*, yang artinya bekerja sama dengan semangat gotong-royong tanpa pamrih. Dengan semboyan ini pun, kerukunan mereka tercipta, sekalipun agama yang dianutnya berbeda. Kedua semboyan masyarakat Manado, yaitu *torag samua basudara* dan *Mapalus* ini didayakan oleh para elite agama dalam merukunkan umatnya dalam beraktivitas di berbagai bidang kehidupan.

Kedua, elite agama berperan dalam memperkokoh kerukunan hidup umat beragama, peran mereka itu terwujud dalam bentuk-bentuk berikut ini. Dialog merupakan cara yang jitu bagi mereka untuk berkomunikasi antarumat yang berbeda agama. Dengan dialog yang bersifat terbuka dan dengan sikap toleran yang tinggi, jika terdapat perbedaan visi dan misi bermasyarakat, perberdaan itu dapat dengan mudah dipahami dan saling diterima. Dengan saling mengakui adanya perbedaan, justru perbedaan itulah yang menjadi kekuatan mereka untuk bermusyawarah.

ada faktor yang mendukung terciptanya Ketiga, kerukunan hidup antar umat beragama di Kota Manado. Faktor itu adalah sebagai berikut: Faktor tradisi, misalnya yang terwujud dalam kegiatan sosial berupa rukun tetangga, rukunrukun warga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, hal ini menjadi media bagi terciptanya kerukunan hidup antarumat beragama. Sikap diri yang terbuka, yang tidak membiasakan diri bersikap saling curiga kepada sesama, juga menjadi faktor pendukung terciptanya kerukunan hidup antarumat beragama. Melalui sikap terbuka demikian ini, masyarakat Manado merupakan masyarakat yang mudah menerima menyesuaikan diri dengan adanya perbedaan sesama. Terlebih

lagi, dengan dibekali pemahaman ajaran agama masing-masing yang dianutnya, kuatnya iman dan takwa mereka itu memperkokoh kerukunan hidup antarumat beragama. Tentu saja, semua ini juga tidak terleas dari peran elite agama sebagai benang merah faktor pengikatnya. Alasannya adalah elite agama berperan kuat sebagai figur panutan umat. Dengan kuatnya figur mereka sebagai anutan umat, dengan demikian, umat mudah mencontoh sepak terjang elite agama dan mengikuti arahan-arahannya. Dalam posisi demikian, elite agama yang bergabung dalam BKSAUA berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyukseskan program-program yang dicanangkannya. Koordinasi kedua belah pihak ini baik karena dilandasai baiknya kebersamaan mereka dalam membina umat.

Penelitian Engelbert Lumowa (2000) dengan judul: Pola Pembinaan Generasi Muda Dalam Upaya Peningkatan Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Ketahanan Nasional: Suatu Studi di Kotamadia Manado Propinsi Sulawesi Utara menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pembinaan generasi muda, oleh lembaga pemerintah, dalam hal ini Kanwil Depdiknas Propinsi Sulawesi Utara dan Camat, cukup baik dan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya gejolak sosial yang dilakukan oleh generasi muda, sehingga kerukunan masyarakat dapat ditingkatkan dan dibina serta terpelihara dengan baik.

Kedua, Hubungan antar umat beragama di Kotamadia Manado memang tergolong baik, terbukti dengan adanya kerukunan hidup, terpeliharanya stabilitas keamanan masyarakat. Suasana rukun dan damai boleh tercipta karena masyarakat dari golongan agama dan etnik yang ada dapat mempraktekkan nilai-nilai budaya nasional seperti: saling menghargai, menghormati, toleransi, kebersamaan, gotongroyong, musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan. Nilai-nilai ini boleh terwujud dengan semangat persaudaraan, sebagaimana yang tercermin dalam semboyan "Torang Samua

Basudara", yang sekarang ini sudah menjadi falsafah atau pandangan hidup masyarakat di Propinsi Sulawesi Utara. Nilai persaudaraan atau kekerabatan, baik yang terjadi karena keturunan darah maupun karena perkawinan adalah nilai budaya luhur yang menyatukan dan mengikat segenap anggota masyarakat dalam pola hidup yang terbuka dan penuh pengertian.

Ketiga, dilihat dari proses integrasi sosial, pada masyarakat di Kota Manado tidak menunjukkan adanya gejala disintegrasi. Hal ini dapat dilihat dari dari bentuk-bentuk kelompok sosial yang ada, baik yang terbentuk berdasarkan: kekerabatan akibat pertalian darah, perkawinan, mata pencaharian, dan lingkungan tempat tinggal. Keberadaan semua kelompok sosial dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda, dianggap sebagai wadah pertemuan dan wahana komunikasi untuk memperkokoh solidaritas bangsa dengan didasari oleh rasa kebersamaan, kerukunan, senasib sepenanggungan, dan rasa sebangsa.

Keempat, Pemeluk masing-masing agama di Sulawesi Utara mengakui perbedaan dan persamaan sebagai manusia yang mempunyai komitmen bersama dalam usaha peningkatan martabat manusia yang mempunyai komitmen bersama dalam usaha peningkatan martabat manusia yang universal, tanpa memandang perbedaan suku atau etnik, agama, dan asal-usul, karena baik dalam Kristen Protestan dan Katolik maupun dalam Islam, Buddha dan Hindu, komitmen kemanusiaan itu adalah bagian tak terpisahkan dari ibadah.

Kelima, Perbedaan yang ada dalam masyarakat majemuk di Manado tidak lagi menjadi penyebab konflik atau ketidakrukunan, tetapi menjadi rahmat bagi seluruh umat beragama.

Keenam, Situasi dan kondisi masyarakat Manado selama ini diakui tidak lepas dari peran aktif dan kerja keras disertai rasa tanggung jawab moral dari Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama mulai dari tingkat kotamadya, kecamatan sampai desa dan kelurahan, untuk menghimpun tokoh-tokoh dan pemimpin agama, pemuda, masyarakat bersama pemerintah daerah serta instansi-instansi terkait, untuk menyikapi dan menanggapi berbagai masalah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hubungan antar umat beragama dan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.

Ketujuh, pembinaan generasi muda yang efektif dan berhasil meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama; sedangkan kerukunan yang mantap dan kuat akan menjamin adanya stabilitas dan ketahanan nasional yang tangguh.

F. Penutup

Nilai-nilai yang berperan untuk mempromosikan toleransi meliputi budaya (1) *Si Tou Timou Tumou Tou*, (manusia hidup untuk memanusiakan orang lain), yang berasal dari masyarakat Minahasa, selanjutnya diadopsi sebagai nilai dasar. Hal ini berfungsi sebagai penggerak, dan pengontrol kehidupan, baik dalam mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup, maupun dalam aspek pengembangan diri. (2) *Mapalus*, sistem penghidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yang ditandai dengan aktualisasi fitrah manusia, ketuhanan, dan ketaatan pada sistem nilai suatu masyarakat. (3) *Torang Samua Basudara*, artinya kita semua bersaudara, begitu pula dengan tata kehidupan di Sulawesi Utara.

BAB

5

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN TOLERANSI

A. Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pelajaran yang dipelajari oleh setiap pelajar di Indonesia. Adanya pendidikan kewarganegaraan memang penting untuk menciptakan masyarakat yang memiliki wawasan kenegaraan. Selain itu, tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kecerdasan dalam kewarganegaraan secara intelektual, sosial, dan emosional serta kecerdasan kewargaan secara spiritual. Dengan pendidikan kewarganegaraan, atau disingkat juga dengan PKn, akan membantu menumbuhkan dan menanamkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral bangsa bagi pelajar sejak dini. Bahkan, pendidikan kewarganegaraan dalam perguruan tinggi menjadi mata kuliah yang wajib ada. Pendidikan PKn memiliki peran penting bagi para generasi muda yang akan menjadi warga negara sepenuhnya. Sebab PKn mengajarkan sikap saling menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif, dan kreatifitas. Selain daripada itu juga sebagai suatu metode pendidikan (Sumario, dkk.).

B. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

1. Sejarah Lahirnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Menurut Sumantri (2008:2) sebagaimana dikutip dari Encyclopedia Americana (1981) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan: "the promotion of good citizens that can be considered the major all pervading purpose of education" atau bisa diartikan sebagai promosi kewarganegaraan yang baik yang bisa dianggap sebagai faktor utama yang meresapi tujuan pendidikan. Selanjutnya Sumantri (2008:2) mengatakan bahwa:

"Several terms have been used to mean "citizenship education" according to the aims of educational system in every country, every period of time or fashio, and every step of national development, or according to the culture and need of a certain country in promoting educational programs. Frequently used term form ancient Greece to the current time ara: civics, political education, civic education, public affairs education, and teaching democracy, or moral and value education. These terms also have different logical meangings, but share one aim."

Pendapat di atas dapat dijelaskan sebagai berikut; beberapa istilah telah digunakan untuk mengartikan "pendidikan kewarganegaraan" sesuai dengan tujuan sistem pendidikan di setiap negara, setiap periode waktu atau zaman, dan setiap tahap pembangunan nasional, atau sesuai dengan budaya dan kebutuhan negara tertentu dalam mempromosikan program-program pendidikan. Istilah yang sering digunakan dari Yunani Kuno sampai sekarang adalah: civics, pendidikan politik, pendidikan civics (Civic Education), pendidikan kewarganegaraan (Citizenship pendidikan urusan publik, dan pendidikan demokrasi, atau pendidikan nilai dan moral. Istilah-istilah ini juga memiliki arti logis yang berbeda-beda, namun menyebar dalam satu tujuan.

Menurut Budimansyah dan Suryadi (2008:2), secara historis-epistemologis, Amerika Serikat (USA) dapat dicatat

sebagai negara perintis kegiatan akademis dan kurikuler dalam pengembangan konsep dan paradigma "citizenship education" dan "civic education". Untuk pertama kalinya, yakni pada pertengahan tahun 1880-an di USA mulai diperkenalkan mata pelajaran "Civics" sebagai mata pelajaran di sekolah yang berisikan materi mengenai pemerintahan (Allen:1960). Menurut Somantri (1976:31), secara historis Civic Education dapat digambarkan pertumbuhannya sebagai berikut:

- a. Civics (1790)
- b. Community Civics (1907, A.W. Dunn).
- c. Civic Education (1901, Harold Wilson).
- d. Civic-Citizenship Education (1945, John Mahoney).
- e. Civic-Citizenship Education (1971, NCSS).

Perkembangan konsep pendidikan Kewarganegaraan di atas selanjutnya dalam disertasi Komalasari (2008:33-35) sebagaimana dikutip dari Winataputra (2001) dijelaskan sebagai berikut:

Pada pertengahan tahun 1880-an di USA mulai diperkenalkan mata pelajaran di sekolah yang berisikan materi mengenai pemerintah (Allen, 1960:10). Seorang ahli bernama Chresore (1886), pada waktu itu mengartikan civics sebagai the science of citizenship atau ilmu kewarganegaraan yang isinya mempelajari hubungan antar individu dan antar individu dengan negara. Selanjutnya pada tahuan 1990-an, berkembang mata pelajaran Civics yang diisi dengan materi mengenai struktur pemerintahan negara bagian dan federal (Gross dan Zeleny, 1958:247). Berikutnya, Dunn (1915) mengembangkan gagasan new civics yang menitikberatkan pada community living atau kehidupan masyarakat. Istilah civics dalam hal ini digunakan untuk menunjukkan bidang pengajaran yang lebih khusus, yakni vocational civics, community civics, dan economy civics (Gross dan Zeleny, 1958:247) atau kewarganegaraan yang berkenaan dengan mata pencaharian, kemasyarakatan, dan perekonomian.

Selain istilah *civics*, pada tahun 1900-an juga mulai diperkenalkan istilah *citizenship education*, yang digunakan untuk menunjukkan suatu bentuk pendidikan watak/karakter dan atau pendidikan etika dan kebajikan (Best, 1960:59). Lebih lanjut menurut Dimond (1953:42) mengemukakan pendapatnya mengenai *citizenship*, yang mempunyai dua makna. Pertama, berkenaan dengan peran dan fungsi warga negara dalam kegiatan publik, dan kedua, berkenaan dengan kualitas pribadi yang didambakan dari warga negara, sebagaimana dicerminkan dalam kegiatannya sehari-hari.

Selanjutnya Gross dan Zeleny (1958:247), mengaitkan penggunaan istilah *civics* dan *citizenship education* sebagai berikut. *Civics* pada dasarnya berkenaan dengan pembahasan mengenai pemerintahan demokrasi dalam teori dan praktek. Sedangkan *citizenship education*, berkenaan dengan keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam masyarakat. Kedua aspek ini biasnya diajarkan dalam satu mata pelajaran. Sehingga penggunaan istilah *civics* dan *citizenship education* digunakan secara bertukar-pakai sebagai suatu studi mengenai pemerintahan yang diberikan di sekolah.

Pada tahun 1900-an juga muncul istilah civic education sebagai istilah baru yang digunakan secara bertukar-pakai dengan istilah citizenship education. Menurut Mahoney (Somantri, 1972:8) civic education merupakan suatu proses pendidikan yang mencakup proses pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan siswa, proses administrasi, dan pembinaan dalam upaya pengembangan warganegara yang baik. Di lain pihak, Allen (1960:10 melihat citizenship education lebih luas lagi, yakni sebagai produk dari keseluruhan program pendidikan persekolahan, dimana mata pelajaran civics merupakan unsur yang paling utama dalam upaya mengembangkan warga negara yang baik. Sejalan dengan pendapat tersebut The National Council for the Social Studies atau NCSS (Somantri, 1972:9) menekankan bahwa *citizenship education*, sesungguhnya mencakup segala macam dampak yang datang baik dari pendidikan formal maupun informal.

(1994)menjernikan Cogan dan mempertegas pengertian "civic education" dan "citizenship education. "Civic Education" bagi Cogan (1994:4) dalam Budimansyah, (2012:11) "... the foundational course work in school yang dirancang untuk mempersiapkan ...young citizens for an active role in their communities in thier adult lives." Hal ini mengandung makna bahwa "civic education" merupakan mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para pemuda warganegara untuk dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat, kelak setelah mereka dewasa. "citizenship education" atau Sedangkan "education for citizenship" dipandang sebagai "...the more inclusive term and encompasses both these in-school experiences as weel as out-ofschool or 'non-formal/informal' learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media etc, which help to shape the totality of the citizen." Artinya, "citizenship education" atau "education for citizenship" merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media. Oleh karena itu oleh Cogan (1995:5) dalam Budimansyah (2012:11) menyimpulkan bahwa "...education for citizenship is the larger overarching concept here while civic education is but one part, albeit a very importantbeit a very important part, of one's development as citizen." Dengan kata lain "citizenship education" atau "education for citizenship" merupakan suatu konsep yang lebih luas di mana "civic education" termasuk bagian penting di dalamnya.

Menurut Kerr (Winataputra dan Budimansyah, 2012:4), mengemukakan bahwa *Citizenship education or civics education* didefinisikan sebagai berikut:

"Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (trough schooling, teaching, and learning) in that preparatory process."

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.

Indonesia, Dalam konteks Depdiknas (2003:7)mengatakakan: "Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945"

2. Perkembangan PKn di Indonesia

Wahab dan Sapriya (2011:290) mengatakan bahwa: perjalanan sejarah Bangsa Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan formal secara tradisional telah disiapkan melalui salah satu wahana untuk mempersiapkan warga negara yang sesuai dengan cita-cita nasional melalui, disiplin ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum. Upaya itu nampak dari lahirnya berbagai nama untuk pendidikan kewarganegaraan (PKn) sejalan dengan perkembangan dan pasang surutnya perjalanan politik Bangsa Indonesia.

Sejalan dengan hal ini menurut Dept. P&K (1962) sebagaimana dikutip oleh Budimansyah (2010, 113-114), perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia secara formal dimulai dengan munculnya mata pelajaran 'civics' dalam kurikulum SMA tahun 1962. Mata pelajaran ini berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia

berdasarkan Undang-Undang Dasar. Di sisi lain menurut (1969:7),pada Somantri saat itu. Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklasai hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang perserikatan bangsa-bangsa. Istilah 'Civics' secara formal tidak dijumpai dalam Kurikulum 1957 maupun 1946. Namun secara material dalam Kurikulum SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajaran tata negara dan tata hukum yang didalamnya dibahas konsep kewarganegaraan khususnya mengenai status legal warganegara dan syarat-syarat (Soemantri:2001). kewarganegaraan Adapun kurikulum 1946 terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan mengenai pemerintah. Di dalam kurikulum tahun 1968 dan 1969 istilah 'civics' dan pendidikan kewargaan negara yang digunakan secara bertukar-pakai. Misalnya dalam kurikulum SD 1968 digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang digunakan sebagai nama mata pelajaran, yang di dalamya tercakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan 'civics' (yang diterjemahkan sebagai pengetahuan kewargaan negara). Di dalam kurikulum SMP 1968 digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang berisikan sejarah Indonesia dan Konstitusi termasuk UUD 1945. Sedangkan di dalam kurikulum SMA 1968 mata pelajaran kewargaan negara berisikan materi terutama yang berkenaan dengan UUD 1945. Sementara itu dalam kurikululm SPG 1969 mata pelajaran pendidikan kewargaan negara terutama berkenaan sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan dan hak asasi manusia (Dept. P&K 1968a; 1968b; 1968c; 1969).

Dalam perubahan Kurikulum Sekolah tahun 1968 menjadi Kurikulum Sekolah tahun 1975 yang ditandai dengan penggabungan sejumlah mata pelajaran sejenis menjadi bidang studi, menghasilkan bahan-bahan mata pelajaran yang menyangkut Pancasila dan UUD 1945 dipisahkan dari mata pelajaran yang bersangkutpaut diantaranya mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Hal-hal yang menyangkut Pancasila dan UUD 1945 berdiri sendiri sebagai Bidang Studi (BS) Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sedangkan gabungan mata pelajaran Sejarah, Ilmu Ekonomi menjadi Bumi dan mata pelajaran Pengetahuan Sosial (IPS) yang juga dikenal dengan nama Studi Sosial (social studies). Hal yang sama masih tetap berlaku saat diberlakukannya Kurikulum 1984 sebagai kurikulum yang disesuaikan. Dalam perkembangan selanjutnya nama mata pelajaran PMP, karena terjadi berbagai perubahan dalam segala aspek kehidupan dan berbagai pertimbangan maka disesuaikanlah mata pelalaran tersebut dengan disusunnya kurikulum 1994. Nama mata pelajaran pun diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang terutama didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Wahab dan Sapriya, 2011:297-298). Selanjutnya dengan disahkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, nama pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dirubah lagi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

3. Tujuan dan Misi PKn Di Sekolah Menengah Atas (SMA)

Tak bisa dipungkiri bahwa tujuan paling pertama dan terutama dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadikan warga negara suatu bangsa menjadi baik (to be good and smart citizens). Di Indonesia menurut winataputra (2001) Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengertian sebagai citizenship education, secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Menurut Winataputra dan Budimansyah (2011:73) sampai

saat ini Pendidikan Kewarganegaraan sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta praktis pendidikan nasional dalam lima status:

Pertama, sebagai mata palajaran di sekolah. Kedua, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. Keempat, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau sejenisnya yang pernah dikelolah oleh Pemerintah sebagai suatu *crash program*. Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individu dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Menurut Somantri (2001) sebagaimana dikutip oleh Wahab dan Sapriya (2011:312), pernah mengemukakan bahwa tujuan PKn hendaknya dirinci dalam tujuh kurikuler yang meliputi: (1) Ilmu Pengetahuan, yang mencakup fakta, konsep, dan generalisasi; (2) Keterampilan intelektual, dari keterampilan sederhana sampai keterampilan kompleks, dari penyelidikan sampai kesimpulan yang sahih, dari berpikir kritis sampai berpikir kreatif; (3) Sikap, meliputi nilai, kepekaan, dan perasaan; dan (4) Keterampilan sosial.

Menurut Wahab dan Sapriya (2011: 315), dalam sistem pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan saat ini, tujuan PKn mengacu pada standar isi mata pelajaran PKn sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Permendiknas nomor 22/2006. Tujuan PKn untuk jenjang SD, SMP, Dan SMA tidak berbeda. Semuanya berorientasi pada pengembangan kemampuan/ kompetensi peserta didik yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kejiwaan dan intelektual, emosional, dan sosialnya. Secara rinci, mata

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Mata pelajaran PKn memiliki visi, yaitu "terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (nation and character building) dan pemberdayaan warga negara". Upaya pembinaan watak/karakter bangsa merupakan ciri khas dan sekaligus amanah yang diemban oleh mata pelajaran PKn atau Civic Education pada umumnya. Sedangkan misi mata pelajaran PKn, yaitu "membentuk warga negara yang baik yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara, dilandasi oleh kesadaran politik, kesadaran hukum, dan kesadaran moral".

4. Komponen-komponen Pembelajaran PKn

Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien (Komalasari, 2011:3). Berdasarkan penjelasan tentang arti pembelajaran di atas, maka berikut ini adalah penjelasan tentang komponen-komponen pembelajaran PKn.

a. Materi Pembelajaran PKn

Menurut Komalasari (2011:28) materi pembelajaran merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai kompetensi dasar dan standar kompetensi. Materi pembelajaran (*instructional materials*) adalah bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran.

Sejalan dengan pengertian di atas, maka materi pembelajaran PKn dalam Kurikulum 2006 meliputi aspekaspek sebagai berikut:

- 1) Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda. keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keterbukaan dan jaminan keadilan.
- 2) Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
- 3) Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- 4) Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat,

- kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
- 5) Konstitusi negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- 6) Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintah desa dan kecamatan, pemerintah daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
- 7) Pancasila, meliputi: Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- 8) Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

Berdasarkan isi kurikulum 2006 di atas, maka secara garis besar materi pembelajaran PKn terdiri dari 8 aspek pokok. Kedelapan aspek pokok ini dalam pembelajaran PKn dikongkritkan oleh guru-guru PKn dalam bentuk, silabus, RPP dan perangkat pembelajaran lainnya.

b. Metode Pembelajaran PKn

Metode mengajar adalah suatu cara/jalan yang harus dilalui di dalam mengajar (Slameto, 2003:65). Sementara itu menurut Djamarah dalam Anggraeni (2009:55), metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan pembelajaran, metode, diperlukan oleh

guru dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai setelah pembelajaran berakhir.

Menurut Komalasari (2011:56),metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran termasuk (di dalamya pembelajaran PKn), diantaranya: (1) ceramah, (2) demonstrasi, (3) diskusi, (4) simulasi, (5) laboratorium, (6) pengalaman lapangan, (7), brainstorming, (8) debat, (9) simposium, dan sebagainya.

c. Media Pembelajaran PKn

Adapun jenis media yang bisa digunakan dalam setiap mata pelajaran, termasuk pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah:

- 1) *Media audio,* yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, *casette recorder*, dan piringan hitam.
- 2) Media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. Media ini ada yang menampilkan gambar diam seperti foto, gambar, lukisan, dan sebagainya, ada pula media visual yang menampilkan gambar bergerak seperti film bisu dan film kartun.
- 3) *Media audiovisual,* yaitu media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua (Djamar dan Zain, 2002:141; Anggraeni, 2009:57).

d. Sumber Pembelajaran PKn

Menurut Association for Educational Communications and Technology (AECT, 1997; Banks, 1990; Komalasari, 2011:108), sumber pelajaran adalah segala sesuatu atau

daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran.

Selanjutnya menurut Komalasari (2011:108) komponen sumber belajar (termasuk pembelajaran PKn) itu meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan lingkungan/latar.

- 1) Pesan, adalah ajaran atau informasi yang akan disampaikan oleh komponen belajar lain yang dapat berupa ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Dalam sistem persekolahan, maka pesan ini berupa seluruh pelajaran yang disampaikan kepada siswa.
- 2) Orang adalah manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolah dan penyaji pesan. Contohnya: guru, dosen, pustakawan, petugas laboratorium, instruktur, widyaiswara, pelatih olah raga, tenaga ahli, dan masih banyak lagi, bahkan termasuk siswa itu sendiri.
- 3) Bahan merupakan perangkat lunak (*software*) yang mengandung pesan-pesan belajar, yang biasanya disajikan menggunakan peralatan tertentu. Contohnya: buku teks, modul, transparansi (OHT), kaset program audio, kaset program video, program slide, film.
- 4) Alat, adalah perangkat keras (*hardware*) yang digunakan untuk menyajikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Contohnya: OHP, tape recorder, video player, proyektor slide, proyektor film, komputer.
- 5) Teknik, yaitu prosedur atau langkah-langkah tertentu yang disiapkan dalam menggunakan bahan, alat, lingkungan, dan orang untuk menyampaikan pesan. Misalnya: demonstrasi, diskusi, praktikum,

- pembelajaran mandiri, sistem pendidikan terbuka/jarak jauh, tutorial tatap muka, dll.
- 6) Latar/lingkungan adalah situasi di sekitar terjadinya proses belajar mengajar di mana pembelajar menerima pesan. Lingkunan dibedakan menjadi dua macam, vaitu lingkkungan fisik dan lingkungan nonfisik. Contoh lingkkungan fisik: gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, aula, pasar, kebuk, bengkel, pabrik, dll. Contoh lingkungan nonfisik: tata belajar, ventilasi udara. ruang cuaca. kebisingan/ketenangan lingkungan belajar, dll.

Beberapa sumber pembelajaran PKn di atas merupakan elemen penting bagi berlangsungnya proses pembelajaran di kelas. Di samping itu dibutuhkan kemampuan guru PKn dalam memperkaya sumber belajar agar pembelajaran PKn berjalan menarik dan tidak membosankan bagi para siswa.

e. Evaluasi Pembelajaran PKn

Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengampil keputusan (Depdiknas, 2003:20). Menurut Wahab dan Sapriya (2011:351), penilaian mata pelajaran PKn adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik dalam mata pelajaran PKn. Hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran PKn.

C. Sikap Toleransi Siswa

Menurut Wikepedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Tolerance) "Tolerance or toleration a fair, objective, and permissive attitude toward those whose opinions, practices, race, religion,

nationality, etc., differ from one's own; freedom from bigotry." Toleransi adalah sikap yang objektif, adil, dan sikap permisif terhadap mereka yang berbedah pendapat, praktek, ras, agama, kebangsaan dengan kita, orang yang berbeda dari kita, dan bebas dari sikap fanatik. Pengertian tentang toleransi ini sejalan dengan apa yang dikemukana oleh Kementrian Pendidikan Nasional (2010:9) yang mengatakan bahwa toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

Menurut Endang (2009:92), toleransi sesungguhnya berkembang dalam kerangka adanya keberagaman, utamanya adalah keberagaman agama dan budaya termasuk di dalamnya kebiasaan-kebiasaan, tradisi atau adat istiadat yang menyertainya. Oleh sebab itu semakin besar keberagaman suatu bangsa atau suatu masyarakat, maka akan semakin besar pula tuntutan bagi keharusan pengembangan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat dan individu, sehingga akan dapat terwujud keserasian dan keharmonisan hidup, jauh dari konflik-konflik dan ketegangan-ketegangan sosial, lebih-lebih lagi pertentangan dan permusuhan antar sesamanya dalam masyarakat.

Sementara itu menurut Raihani (2011:25) "Tolerance literally means patience with differences. In some instances, it connotes the attitude of passiveness towards something disliked, and often it means putting up with or enduring something disliked." Toleransi secara harafiah diartikan sebagai kesabaran (penerimaan) terhadap perbedaan. Dalam beberapa kasus, toleransi dikonotasikan sebagai sikap ketidakpedulian terhadap sesuatu yang tidak disukai, dan sering berarti tahan atau menahan sesuatu yang tidak disukai. Sejalan dengan pengertian di atas, Muldon, dkk. (2011:324) mendefiniskan toleransi sebagai berikut:

In its most basic form, tolerance requires that an individual who disapproves of another or of her actions nonetheless refrains from interfering with that other; thus, tolerance can be understood as the act

of enduring or putting up with something you disapprove of. John Horton (1996: 32) casts tolerant acts as conflicts of reasons, some of which motivate an individual to disapprove of another and interfere with her actions and some of which motivate an individual to refrain from interfering in spite of his initial disapproval. One tolerates another when the reasons against interference trump the reasons in favor of interference. Similarly, David Heyd (1996: 11) casts tolerant acts as clashes of perspectives. One tolerates another when one ignores considerations of the other's actions and focuses instead on the other as a person. Thus, in Horton's picture, reasons that motivate individuals to tolerate others are reasons that manage to trump one's initial disapproval, while in Heyd's picture, we are concerned with the relevant aspects of others' personhood that motivate individuals to act tolerantly.

Pendapat Muldon, dkk. di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam bentuknya yang paling dasar, toleransi mensyaratkan bahwa seorang individu yang tidak suka terhadap orang lain atau tindakannya tetap menahan diri dan tidak menggangu orang tersebut, toleransi dapat dipahami sebagai tindakan bertahan atau kompromi dengan sesuatu yang tidak disukai. John Horton (1996: 32) mengartikan toleransi sebagai benturan alasan, beberapa di antaranya memotivasi seseorang untuk menyetujui yang lain dan mencampuri tindakannya dan beberapa yang memotivasi seseorang untuk menahan diri dari campur tangan meskipun pada awalnya tidak setuju. ... Tidak jauh berbeda, David Hevd mendefinsikan toleransi sebagai benturan cara pandang. Seseorang bersikap toleran terhadap orang lain bukan karena penolakan terhadap tindakan orang tersebut, melainkan pertimbangan dari sisi yang lain, yaitu sebagai seorang manusia. Dengan demikian, dalam gambaran Horton, alasan yang memotivasi individu untuk bersikap toleransi terhadap orang lain adalah mengelola alasan kesetidaksetujuan awal. Artinya Heyd lebih menekankan pada aspek-aspek yang relevan dari kepribadian orang lain yang memotivasi individu untuk bertindak toleran.

Dalam pengertian yang luas toleransi lebih terarah pada pemberian tempat yang luas bagi keberagaman dan perbedaan yang ada pada individu atau kelompok-kelompok lain. Oleh sebab itu pada awal pembahasan ini perlu penekanan kembali bahwa tidak benar bilamana toleransi dimaknai sebagai pengebirian hak-hak individu atau kelompok tertentu untuk disesuaikan dengan kondisi atau keadaan orang atau kelompok lain, atau sebaliknya mengorbankan hak-hak orang lain untuk dialihkan sesuai dengan keadaan atau kondisi kelompok tertentu. Toleransi justru sangat menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing individu atau kelompok tersebut, namun di dalamnya diikat dan disatukan dalam kerangka kebersamaan untuk kepentingan yang sama. Toleransi adalah penghormatan, penerimaan dan penghargaan tentang keragaman yang kaya akan kebudayaan dunia kita, bentuk ekspresi kita dan tata cara sebagai manusia. Hal itu dipelihara oleh pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, dan kebebasan pemikiran, katahati dan kepercayaan. Toleransi adalah harmoni dalam perbedaan (UNESCO APNIEVE, 2000:54 dalam Endang, 2009).

Mengenalkan keberagaman agama, suku, ras, bahasa sejak dini harus menjadi agenda prioritas sekolah. Rasa toleransi terhadap keberagaman itu harus dibangun sejak dini dalam diri anak-anak. Dengan demikian, nantinya, mereka akan hidup dengan pemahaman yang benar akan keberagaman dan bisa menghormati keberagaman dalam interaksi mereka dengan teman-temannya.

Endang (2009:94) mengatakan bahwa; khusus berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan, lembaga pendidikan sekolah merupakan wahana yang paling tepat untuk melatih dan sekaligus menerapkan nilai-nilai ini. Hal ini utamanya disebabkan di dalam lingkungan sekolah siswa memiliki latar belakang yang sangat beragam, baik agama, suku, latar sosial ekonomi, latar pendidikan orang tua, daerah termasuk adat istiadat dan budaya. Dalam kondisi keberagaman

ini sudah barang tentu akan ditemukan banyak perbedaan dalam sikap dan prilaku siswa. Sekolah dipandang sebagai wahana yang mempercepat impelementasi dari pluralisme melalui berbagai bentuk kegiatan seperti workshop, latihanlatihan dan kegiatan-kegiatan dalam kelompok kecil (Joan T, 1992:5 dalam Endang, 2009). Perbedaan-perbedaan inilah yang harus dipahami dan bahkan saling dihormati, sehingga memungkinkan tumbuhnya solidaritas dan kebersamaan antar siswa. perbedaan sesama Menghormati tidak berarti menghilangkan identitas diri, karena menghormati perbedaan sesungguhnya adalah memberikan peluang dan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan karakteristik dirinya.

Dari beberapa pengertian tentang sikap toleransi di atas, maka karakteristik sikap toleransi siswa dalam penelitian ini adalah sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kementrian Pendidikan Nasional (2010:9) yang mengatakan bahwa toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik sikap toleransi siswa adalah (a). menghargai perbedaan agama, (b). Menghargai perbedaan etnis/suku, (c). Menghargai perbedaan bahasa, (d). menghargai perbedaan pendapat, sikap dan tindakan.

D. Penutup

Pendidikan PKn memiliki peran penting bagi para generasi muda yang akan menjadi warga negara sepenuhnya. Sebab PKn mengajarkan sikap saling menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif, dan kreatifitas. Selain daripada itu juga sebagai suatu metode pendidikan

BAB

6

ANALISIS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM UPAYA INTERNALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL SULAWESI UTARA

A. Pendahuluan

Indonesia saat ini sedang mengalami persoalan besar berkaitan dengan karakter kebangsaan. Permasalah karakter kebangsaan ini bermuara pada semakin melemahkan pemahan generasi mudah tentang nilai-nilai luhur Pancasila yang bersumber dari kearifan lokal (local genius) masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai kearifan lokal masyarakat kurang dibahas oleh guru, apalagi dikaitkan dengan materi pembelajaran yang sedang diajarkan. Guru dalam menyampaikan materi pembelajaran lebih terfokus pada materi yang secara eksplisit tertuang dalam kurikulum pembelajaran. Tujuan penelitian tahun pertama ini adalah mendeskripsikan proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dan mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara yang bisa dijadikan sumber dalam pembelajaran PKn di tingkat SD, SMP dan SMA. Fokus penelitian ini adalah identifikasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara tingkat kebutuhan pengembangan pendidikan PKn berbasis budaya lokal masyarakat Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah guru di tingkat SD, SMP dan SMA di Sulawesi Utara. SD Katolik St. Clara Tomohon, SD Katolik 02 Don Bosco Paniki Bawah, SD Negeri 2 Tataaran, SMP Negeri 4 Tomohon, SMP Negeri 6 Manado, SMP Negeri 1 Tondano, SMK Negeri 1 Tomohon, SMA Negeri 1 Manado, dan SMA Negeri 3 Tondano. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru-guru yang berada di sembilan sekolah yang dijadikan lokasi penelitian. Pengumpulan data melaluli googleform, wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data. reduksi data. data conclusion. drawing/verification. Di dalam pengujian keabsahan data, maka peneliti akan menggunakan validitas internal (credibility) pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya ditinjau dari validitas eksternal (*transferability*), dan realibilitas (*dependability*) pada aspek konsistensi, serta obyektivitas (confirmability) pada aspek naturalis. Penelitian ini menemukan bahwa proses pembelajan PKn dipersiapkan dengan baik oleh guru, dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap evaluasi. mendesak mengembangkan kebutuhan untuk pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara. Adapun luaran akhir penelitian untuk tahun petama ini adalah deskripsi pembelajaran PKn di SD, SMP dan SMA/K dan deskripsi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara. Disamping itu juga luaran penelitian ini adalah artikel yang akan dipublish para prosiding internasional (Atlantis Press) dan jurnal internasional.

B. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah

1. Pembelajaran PKn di SD

Hakikat Pendidikan Kewarnegaraan di Sekolah Dasar adalah sebagai program pendidikan yang berdasarkan nilainilai Pancasila untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari hari. Pelajaran yang dalam pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial, budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan

mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (1).

Berdasarkan hakikat Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar, maka menurut **Afke Syeane Suak, S.Pd.**, guru di sekolah SD Katolik 02 Don Bosco Paniki Bawah bahwa:

Sebelum memulai pembelajaran saya selalu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Saya selalu mempersiapkan RPP sebelum masuk kelas.

Sejelan dengan pendapat di atas, **Martha Sewow, S.Pd**. guru di SD Katolik St. Clara Tomohon menjelaskan bahwa:

RPP dipersiapkan guru sebelum pembelajaran. Pembuatan RPP mengacu pada Silabus, KDD, Tujuan, Materi, Metode, KBM, Sumber belajar dan penilaian. RPP hendaknya mengacu pada silabus dan kemampuan siswa. Oleh karena itu RPP harus unik karena menyesuaikan keadaan siswa. Setiap sekolah memiliki karakteristik siswa yang berbeda. Sehingga sudah sewajarnya RPP dibuat khusus sesuai keaadaan.

Selanjutnya, acuan yang digunakan oleh guru untuk menentukan materi pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran PKn, yakni kurikulum. Kriteria materi pembelajaran yang dipilih dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran PKn di kelas, yakni Tematik. Guru memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran PKn. Guru merencanakan sumber belajar PKn selain dari buku wajib juga dari sumber lain seperti jurnal, buku referensi. Guru mengembangkan materi pembelajaran PKn yang disajikan di kelas dijabarkan melalui kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan hal ini, **Dolly Y. Pangemanan, S.Pd.,** guru di SD Negeri 2 Tataaran menjelaskan:

Pembelajaran PKn di SD lebih kepada tematik dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Pengemanan lebih lanjut menjelaskan guru dalam menentukan model pembelajaran PKn dalam perencanaan pembelajaran memakai Model pembelajaran kontekstual.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tiga orang guru yang mengajar di SD, maka dapat dilihat bahwa pembelajaran PKn di SD merupakan mata pelajaran yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain karena pembelajaran di SD merupakan pembelajaran Tematik. Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pembelajaran di SD berdasarkan sistem tematik, jadi semua mata pelajaran dijadikan dalam satu tema. Mata pelajaran yang diajarkan di SD adalah Matematika, Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani, Agama, Kesenian, IPA, IPS, Mulok dan PKn.

Hakikat Pendidikan Kewarnegaraan di Sekolah Dasar adalah sebagai program pendidikan yang berdasarkan nilainilai Pancasila untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari hari. Pelajaran yang dalam pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial, budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (1).

2. Pembelajaran PKn di SMP

Pembelajaran adalah proses interaksi antarpeserta didik, antara peserta didik dengan tenaga pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi dan pembangunan karakter setiap peserta didik sebagai hasil dari sinergi antara pendidikan yang berlangsung di sekolah,

keluarga dan masyarakat. (Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014).

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 20 disebutkan Pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono disebutkan Pembelajaran merupakan aktivitas pendidik atau guru secara terprogram melalui desain instruksional agar peserta didik dapat belajar secara aktif dan lebih menekankan pada sumber belajar yang disediakan. Menurut Slavin Pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku seseorang individu yang disebabkan oleh sebuah pengalaman.

Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar (guru kelas) di SD/MI dan untuk guru mata pelajaran yang diampunya untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Pengembangan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai, namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara mandiri dan/atau berkelompok di sekolah/madrasah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah/madrasah

Pengembangan RPP dapat juga dilakukan oleh guru antarsekolah secara berkelompok atau antarwilayah difasilitasi, dikoordinasi, dan disupervisi oleh pendidikan atau kantor kementerian agama setempat Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar (guru kelas) di SD/MI dan untuk guru mata pelajaran yang diampunya untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Pengembangan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai, namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara mandiri dan/atau berkelompok di sekolah/madrasah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah/madrasah).

Sehubungan proses pembelajaran di SMP, **Christi Rafael Lumi, S.Pd.,** guru PKn di SMP Negeri 4 Tomohon mengatkaan bahwa:

Sebagai seorang guru ia mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum mengajar. Setiap mulai pembelajaran selalui menyediakan RPS sebagai bagian dari perangkat pembelajaran.

Guru mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pertama-tama memperhatikan kalender Pendidikan, dari situ disusun program tahunan, program semester. Dalam mempersiapakan RPP selalu melihat Silabus, KDD, Tujuan, Materi, Metode, KBM, Sumber belajar dan penilaian. Juga memperhatikan kemampuan siswa dan sarana prasarana.

Acuan yang guru gunakan untuk menentukan materi pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran PKn yakni mengacu pada Silabus yang sudah tertata berdasarkan kurikulum yang disesuaikan dengan kurikulum darurat/ada penyerdanaan.

Berkaitan dengan hal ini, **Olvi Linda Rampen, S.Pd.,** guru di SMP Negeri 1 Tondano juga menegaskan bahwa:

Pembelajaran PKn sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendikbud No 22 thn 2016 sebagai acuan penyusunan dan pengembangan materi. Kriteria materi pembelajaran yang dipilih dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran PKn di kelas disesuaikan dengan silabus dan memperhatikan jumlah jam pelajaran yang ada. Misalnya 1 KD punya banyak indikator.

Guru memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran PKn. Lingkungan sekolah, masyarakat dan lingkungan siswa menjadi sampel yang dibahas sesuai dengan materi yang diajarkan. Contoh gotong royong. Guru merencanakan sumber belajar PKn selain dari buku wajib. Sumber belajar yang sering digunakan di luar buku adalah memanfaatkan masyarakat, museum di dinas Pendidikan. Kiat guru untuk mengembangkan materi pembelajaran PKn yang disajikan di kelas yakni untuk mengembangkan materi agar menjadi menarik. Selain pembelajaran tatap muka dilaksanakan lewat blended leaning. Intinya tidak bersumber dari buku paket. Guru menentukan model pembelajaran PKn dalam perencanaan pembelajaran. Model disesuaikan materi. K 13 pendekatan scientific dengan diintegrasikan dengan materi. Model yang diterapakan sesuai dengan kemampuan siswa di sekolah.

Pembelajaran adalah proses interaksi antarpeserta didik, antara peserta didik dengan tenaga pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi dan pembangunan karakter setiap peserta didik sebagai hasil dari sinergi antara pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga dan masyarakat. (Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014).

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 20 disebutkan Pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono disebutkan Pembelajaran merupakan aktivitas pendidik atau guru secara terprogram melalui desain instruksional agar peserta didik dapat belajar secara aktif dan lebih menekankan pada sumber belajar yang disediakan. Menurut Slavin Pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku seseorang individu yang disebabkan oleh sebuah pengalaman (8).

Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar (guru kelas) di SD/MI dan untuk guru mata pelajaran yang diampunya untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, dan

SMK/MAK. Pengembangan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai, namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara mandiri dan/atau berkelompok di sekolah/madrasah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah/madrasah

Pengembangan RPP dapat juga dilakukan oleh guru secara berkelompok antar sekolah atau antarwilayah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh pendidikan atau kantor kementerian agama setempat Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar (guru kelas) di SD/MI dan untuk guru mata pelajaran yang diampunya untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Pengembangan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai, namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara mandiri dan/atau berkelompok di sekolah/madrasah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah/madrasah (9).

3. Pembelajaran PKn di SMA/K

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk menciptakan pembelajaran di SMK yang efisien dan menyenangkan diperlukan berbagai keterampilan. Diantaranya adalah keterampilan membelajarkan atau keterampilan mengajar. Pembelajaran di SMK harus fleksibel, dan tidak kaku, serta perlu menekankan pada kreativitas, rasa ingin tahu, bimbingan dan arahan ke arah kedewasaan. Metode pembelajaran harus dipilih dan dikembangkan untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa SMK. PKn secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara (2).

PKn adalah aspek pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. PKn lebih dari sekedar bidang studi karena PKn mengambil bagian dari pengaruh positif dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa yang telah dipelajari tentang materi-materi PKn di sekolah, diharapkan dapat dengan baik diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat.

PKn memuat isu-isu dan fenomena jaman seperti demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, dan globalisasi. Seiring dengan berkembangnya cakupan materi yang dipelajari, pembelajaran yang dilaksanakan diharapkan dapat mengantar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas dan memperoleh hasil yang maksimal. Bila dilihat kembali fungsi dan tujuan dari PKn jelas bahwa fungsi PKn adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 (1).

Scherwin J. Makal, S.Pd., guru di SMK Negeri 1 Tomohon mengatakan bahwa:

Sebagai seorang guru dia selalau mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum mengajar dan disesuikan dengan materi yang akan diajarkan.

Guru mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan silabus yang ada. Analisis KI dan KD dalam pemberlakuan kurikulum darurat juga dilakukan. Acuan yang digunakan untuk menentukan materi pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran PKn.

Acuan dalam pembelajaran adalah buku paket dan sumber-sumber dari internet. Kriteria materi pembelajaran yang dipilih dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran PKn di kelas disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan.

Menurut Willem Xaverius Yamreway bahwa:

Penuyusunan RPP dimulai dari pembuatan silabus dengan mengacu pada pemberlakuan kurikulum darurat dimasa pandemi covid 19. Setelah itu setelah disiapkan prota dan prosem serta analisis KI dan KD juga analisa hitungan hari efektif dan langsung menyususn RPP sesuai sistematika dan muatan nilai baik nilai karakter maupun pembelajaran Abad 21 serta penentuan model dan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa dan lingkup materinya termasuk juga penilaiannya.

Sintje Katotje Rori dari SMK Negeri 1 Manado melihat bahwa pembelajaran PKn di SMK didahului dengan pembuatan RPP yang mengacu pada silabus. Materi yang dipilih sesuai dengan kompetensi dasar dan materi yang esensial. Guru juga memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran PKn disesuaikan dengan materi yang diajarkan.

Guru merencanakan sumber belajar PKn selain dari buku wajib. Bisa dari buku paket dan internet dan sumber lain. Kiat guru untuk mengembangkan materi pembelajaran PKn yang disajikan di kelas disesuaikan dengan perkembangan zaman, masalah-masalah sosial yang up to date. Yamreway lebih banyak memakai materi yang tematik dan berorientasi pada pemahaman dan aktualisasi sikap berkewarganegaraan yang baik. Wajib menentukan materi ajar dari berbagai sumber yang ada baik kumpulan referensi buku wajib maupun dari internet disesuaikan dengan

cakupan materi, terlebih khusus pengembagan modul bahan ajar dan video pembelajarannya.

Guru menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Guru menentukan model pembelajaran PKn dalam perencanaan pembelajaran. Model pembelajaran menyesuaikan dengan situasi/materi yang diajarkan. Penentuan model pembelajaran ditentukan dengan kesesuaian tujuan pembelajar dengan materinya dengan menganalisis sintak dalam pilihan model pembelajaran.

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk menciptakan pembelajaran di SMK yang efisien menyenangkan diperlukan berbagai keterampilan. adalah Diantaranya keterampilan membelajarkan atau keterampilan mengajar. Pembelajaran di SMK harus fleksibel, dan tidak kaku, serta perlu menekankan pada kreativitas, rasa ingin tahu, bimbingan dan arahan ke arah kedewasaan. Metode pembelajaran harus dipilih dan dikembangkan untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa SMK. PKn secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara (2).

PKn adalah aspek pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. PKn lebih dari sekedar bidang studi karena PKn mengambil bagian dari pengaruh positif dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa yang telah dipelajari tentang materi-materi PKn di

sekolah, diharapkan dapat dengan baik diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat.

C. Pembelajaran Berbasis Budaya Lokal

Pembelajaran berbasis budaya/kearifan lokal merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan budaya dalam proses pembelajaran serta salah satu bentuknya adalah menekankan belajar dengan budaya. Beladar dengan budaya dapat menjadikan siswa tidak terasing dari budaya lokalnya serta meningkatkan apresiasi siswa terhadap budaya lokal. Dalam konteks pembelajaran di sekolah, terutama pembelajaran PKn berdasarkan hasil temuan di lapangan diperoleh data bahwa guru berupaya menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal walaupun belum maksimal. Pembelajaran PKn memanfaatkan budaya lokal dan bahasa daerah dengan mengintegrasikan dalam materi pembelajaran. Integrasi ini penting karena sebagai dasar hidup masyarakat di mana para siswa hidup. Agar siswa terbiasa dan memahami budaya lokal daerahnya. Menurut Martha Sewow, S.Pd., dari SD Katolik St. Clara Tomohon:

Menurutnya ada nilai-nilai budaya lokal/kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara yang guru bisa integrasikan dalam pembelajaran PKn. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan local Si tou timou tumou tou, mapalus dan torang samua basudara dapat diintegrasikan dalam pembelajaran PKn. Selain nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal Si tou timou tumou tou, mapalus dan torang samua basudara, menurutnya ada kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara lainnya yang nilai-nilainya bisa diintegrasikan dalam pembelajaran PKn seperti Toleransi, Gotong-royong/mapalus.

Sejalan dengan pendapat di atas, **Sintje Katotje Rori** dari SMK Negeri 1 Manado mengatakan bahwa:

Ada nilai-nilai budaya lokal/kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara yang guru integrasikan dalam pembelajaran PKn. Budaya mapalus/tolong menolong, saling membantu satu sama lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan local *Si*

tou timou tumou tou, mapalus dan torang samua basudara dapat diintegrasikan dalam pembelajaran PKn.

Dalam mengintegrasikan nilai budaya dalam pembelajaran PKn, materi pembelajaran harus disesuaikan dengan KD dan indikator materi yang akan diajarkan. Selain nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan local Si tou timou tumou tou, mapalus dan torang samua basudara. Guru menilai ada kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara lainnya yang nilainilainya bisa diintegrasikan dalam pembelajaran PKn, misalnya saja: budaya mahtombombolan, mah sigi-sigian. Guru menilai penting untuk mengembangkan model Pembelajaran PKn Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Sulawesi Utara. Karena bagian dari penguatan nilai-nilai budaya local masyarakat. Pendekatan local dalam pembelajaran penting untuk mendekatkan diri dengan para siswa.

Sejalan dengan hal ini, **Olvi Linda Rampen, S.Pd** menjelaskan juga bahwa:

Dalam mengembangkan pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal memudahkan siswa mengerti dan memahani yg kita jelaskan dengan melihat dilingkugan sekitar. Syenie Oosye Palilingan SPd dari SMP Negeri 6 Manado juga menjelaskan pentingnya budaya local supaya siswa memahami dengan jelas budaya local yang ada di daerahnya.

Nilai-nilai budaya local/kearifan local masyarakat Sulawesi Utara yang guru integrasikan dalam pembelajaran PKn dijadikan sebagai sumber belajar seperti gotong royong/mapalus. Materi kelas XII yakni kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, bisa dintegrasikan nilai kearifan lokal sitou tumou tou sebagai pemahaman untuk penanggulangan kasus pelanggaran hak dan penginggkaran kewajiban warga negara. Dengan memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan warga daerah dimana dia berada, kesadaran berbangsa tidak hanya untuk dirinya tetapi ada tanggung jawab juga untuk kebaikan bagi orang lain.

Guru memandang nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan local *Si tou timou tumou tou, mapalus dan torang samua basudara* boleh diintegrasikan dalam pembelajaran PKn disesuaikan dengan materi yang dibahas. Pengintegrasian juga melihat kesesuaian nilai nilai KL dengan materi dan tujuan pembelajaran.

Selain nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan local Si tou timou tumou tou, mapalus dan torang samua basudara, menurut guru terdapat kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara lainnya yang nilai-nilainya bisa diintegrasikan dalam pembelajaran PKn, seperti nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, Kerjasama dengan orang lain. Selain itu kearifan lokal Tulude dan pengucapan syukur perlu dimuat dalam materi pembelajaran.

Guru menilai penting untuk mengembangkan model Pembelajaran PKn Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Sulawesi Utara karena bagian dari pengembangan pembelajaran dan penguatan nilai-nilai budaya lokal. Sejauh tidak keluar dari materi yang ada.

Menurut Sintje Katotje Rori:

Dalam melakukan penilai penting berkaitan dengan rasa kebersamaan dan dalam mengembangkan serta melestarikan dan tetap terpelihara nilai-nilai budaya yang ada di daerah/kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara.

Sejalan dengan pendapat di atas, **Wiliam Yamreway** mengatakan:

Konsep kewarganegaraan tidak terlepas dari siswa memahami konsep dia warga setempat dengan pemberlakuan norma adat Dan kebudayaan dimana dia tinggal sehingga kesadaran berbangsa nantinya bisa ditopang dengan nilai nilai KL yang ada. Kedua, menjadikan warga negara yang baik senantiasa sejalan dengan filosofi dari nilai KL yang ada dalam masyarakat setempat, sehingga perlu ada wadah dan konsep untuk pengintegrasian keduanya dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dari tingakat SD, SMP dan SMA di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya masyarakat, terutama masyarakat Sulawesi Utara dalam pembelajan PKn. Berdasarkan hasil wawancara dengan para guru mereka mengakui bahwa dalam konteks pembelajaran PKn, nilai-nilai budaya Sulawesi Utara seperti Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, dan Torang Samua Basudara kurang apalagi dikaitkan dengan dibahas oleh guru, materi pembelajaran PKn yang sedang diajarkan. Guru dalam menyampaikan materi pembelajaran PKn lebih terfokus pada materi yang secara eksplisit tertuang dalam kurikulum pembelajaran PKn. Oleh karena itu menurut mereka ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan model pembelajaran berbasis kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara.

Pada hakekatnya pendidikan adalah usaha sadar dan direncanakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif. Pemberian pendidikan kepada peserta didik dengan bertujuan pemupukan nilai-nilai sikap dan kepribadian sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalam sila-sila Pancasila. Dalam lingkup Pendidikan Nasional, Pendidikan Kewarganegaraan dijadikan sebagai suatu wadah untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting diterapkan berkembangnya potensi pikiran peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan sila pertama Pancasila, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap dalam berkreatifitas, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bisa bertanggung jawab (3)

Tantangan pendidikan politik dengan paradigma baru adalah mengembangkan pendidikan demokrasi dengan tiga fungsi utama: pengembangan kecerdasan warga negara, pengembangan kemampuan warga negara, dan pengembangan

pengembangan pribadi warga negara. Selain itu, pembangunan masyarakat demokratis melalui pendidikan politik memerlukan pendekatan misi dan pembelajaran khusus yang mengikuti paradigma baru pendidikan politik. Manfaatkan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan melalui penggunaan metode pembelajaran yang menitikberatkan pada aktivitas belajar siswa aktif dan pendekatan eksploratif (4)

Metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma baru memiliki ciri-ciri: (1) Membelajarkan dan melatih siswa berpikir kritis dalam menanggapi masalah, (2) Membawa siswa mengenal, memilih dan memecahkan masalah, (3) Melatih siswa dalam berpikir sesuai dengan metode ilmiah, (4) Melatih siswa untuk berpikir dengan ketrampilan sosial lain yang sejalan dengan pendekatan inkuiri.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan sangatlah baik sekali. Untuk itu sebagai guru sekolah dasar para guru juga ikut berpartisipasi dalam meningkatkan perkembangan mutu pendidikan di Indonesia. Terlebihnya kita harus menjadi pendidik yang profesional yang bisa memberikan pendidikan karakter yang baik pada siswa sekolah dasar. Melatih siswa-siswa untuk aktif dalam proses belajar mengajar, tanggap dengan materi yang diajarakan.

Dengan adanya paradigma baru dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, maka memunculkan suatu proses pembelajaran baru. Karena masalah utama dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ialah penggunaan metode pembelajaran yang terkesan sulit dipahami siswa, kurang fleksibel, kurang demokratis, dan cenderung lebih dominan menggunakan satu metode. Aktivitas guru lebih dominan daripada siswa, akibatnya guru seringkali mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai, sikap, dan tindakan (5)

Tujuan paling pertama dan terutama dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadikan warga negara suatu bangsa menjadi baik (to be good and smart citizens). Di menurut Winataputra Indonesia (2001)Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengertian sebagai citizenship education, secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang Pendidikan (6). Kewarganegaraan sudah menjadi bagian inheren instrumentasi serta praktis pendidikan nasional dalam lima Pertama, sebagai mata palajaran di sekolah. Kedua, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. Keempat, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau sejenisnya yang pernah dikelolah oleh Pemerintah sebagai suatu crash program. Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individu dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, dan keempat (6).

Menurut Somantri (2001) sebagaimana dikutip oleh (7), pernah mengemukakan bahwa tujuan PKn hendaknya dirinci dalam tujuh kurikuler yang meliputi: (1) Ilmu Pengetahuan, yang mencakup fakta, konsep, dan generalisasi; (2) Keterampilan intelektual, dari keterampilan sederhana sampai keterampilan kompleks, dari penyelidikan sampai kesimpulan yang sahih, dari berpikir kritis sampai berpikir kreatif; (3) Sikap, meliputi nilai, kepekaan, dan perasaan; dan (4) Keterampilan sosial.

Dalam sistem pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan saat ini, tujuan PKn mengacu pada standar isi mata pelajaran PKn sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Permendiknas nomor 22/2006. Tujuan PKn untuk jenjang SD, SMP, Dan SMA tidak berbeda. Semuanya berorientasi pada pengembangan kemampuan/ kompetensi peserta didik yang

disesuaikan dengan tingkat perkembangan kejiwaan dan intelektual, emosional, dan sosialnya [12]. Secara rinci, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1). Berpikir secara kritis. rasional. dan kreatif dalam menanggapi kewarganegaraan. (2).Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. (4). Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Wahab & Sapriya, 2011.

Mata pelajaran PKn memiliki visi, yaitu "terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan bangsa (nation and character building) pemberdayaan warga negara". Upaya pembinaan watak/ karakter bangsa merupakan ciri khas dan sekaligus amanah yang diemban oleh mata pelajaran PKn atau Civic Education pada umumnya. Sedangkan misi mata pelajaran PKn, yaitu "membentuk warga negara yang baik yakni warga negara yang melaksanakan hak dan kewajibannya kehidupan bernegara, dilandasi oleh kesadaran politik, kesadaran hukum, dan kesadaran moral".

Keberadaan kearifan lokal memiliki nilai dan makna, serta akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat setempat. Kearifan masyarakat dikembangkan untuk menopang dan menopang kehidupan sesuai dengan keadaan, kondisi, keterampilan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Oleh karena itu, kearifan lokal menjadi bagian dari cara hidup masyarakat untuk menyelesaikan segala permasalahan hidup masyarakat. Kearifan daerah melihat dari sisi sendiri, juga sisi baik orang lain, mempertimbangkan kepentingan orang lain dan aspek lain,

lingkungan sosial, dan memperhatikan kondisi dan kondisi lingkungan meningkat (10).

Kearifan lokal bertindak sebagai panduan tindakan untuk memungkinkan kita membuat keputusan tentang kehidupan masyarakat yang beradab. Kearifan lokal juga berfungsi sebagai kekuatan sistem pengetahuan masyarakat untuk hidup berdampingan secara dinamis dan damai. Kearifan lokal merupakan identitas yang sesungguhnya menentukan harkat dan martabat manusia dalam masyarakat (masyarakat dan lingkungan). Selain itu, kearifan lokal dapat berfungsi sebagai nasehat, kepercayaan, sastra, pantangan untuk konservasi dan konservasi sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan, sosial, politik, etika dan moral

Si Tou Timou Tumou Tou

Si Tou Timou Tumou Tou adalah sistem kepercayaan, ide dan konsip yang mempengaruhi cara bertindak berkaitan dengan hal yang patut dan tidak patut dilakukan. (11). Si Tou Timou Tumou Tou mengandung nilai yang mengilhami masyarakat Sulawesi Utara dalam bersikap toleran kepada siapa saja yang berbeda dari segi suku, agam, buday, ras serta bahasa. (12). Si Tou Timou Tumou Tou bermakna bahwa dalam kehidupan setiap ini masing-masing orang memiliki tugas untuk menjadikan orang lain manusia yang seutuhnya. Si Tou Timou Tumou Tou adalah filosofi suku Minahasa yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Kekristen dan dimaknai secara intelektual oleh oleh Sam Ratulangi (11). Si Tou Timou Tumou Tou tercermin dari sikap orang Minahasa yang tidak membeda-bedakan latar belakang agama, suku, serta memiliki jiwa terbuka bagi orang lain. Si Tou Timou Tumou Tou menjadi landasan berpikir dan berpijak bagi orang Minahasa. Orang Minahasa dalam hidupnya dijiwai dan dididik mengikuti makna dan nilai dari Si Tou Timou Tumou Tou dan telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Minahasa dan Sulawesi Utara pada umumnya.

Si Tou Timou Tumou Tou merupakan suatu, ide, konsep dan kepercayaan tentang bagaiman menjadi orang baik dalam kehidupan setiap hari. Si Tou Timou Tumou Tou di dalamnya mengandung nilai dasar yang telah mendorong masyarakat Minahasa menjadi pribadi yang menghargai orang lain.

Mapalus

Mapalus berarti gotong royong atua bentuk kerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan bersama. (13,14). Mapalus berasal dari kata bahasa Tombulu ma (saling) dan palus (tuang, tumpah). Mapalus dalam arti etimologis diartikan sebagai saling menuang. Mapalus merupakan pengejawantahan secara kongrit dari "Si Tou Timou Tumou Tou." Mapalus teraktualisasi dalam praktek: kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, kerjasama dan keagamaan). Disamping itu Mapalus mengandung nilainilai; tolong menolong, keterbukaan, disiplin kelompok, hasil guan-daya guna, dan kebersamaan (15).

Mapalus begitu kental dalam kehidupan sehari-hari, misalnya semangat saling menolong, berkumpul bersama dalam kerukunan-kerukunan marga dan kerukuan sosial lainnya. Mapalus adalah sebuah sistem nilai kehidupan masyarakat yang teraktualisasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia sebagai aktualiasi hakekat manusia sebagai makhluk kerja. Mapalus inilah membuat orang Minahasa menjadi begitu toleran terhadap orang-orang pendatang.

Torang Samua Basudara

Torang Samua Basudara dipolulerkan oleh Sulut E. E. Mangindaan. Torang Samua Basudara merupakan pengejawantahan Si Tou Timou Tumou Tou dan Mapalus secara kongkrit. Mapalus diimplementasikan dan dijalankan oleh orang Sulawesi Utara. Mapalus menjadi kearifan lokal terbukti menjadi benteng yang kokoh ketika terjadi konflik tahun 1998-2000. Torang Samua Basudara merupakan slogan andal bagi masyarakat Sulawesi Utara. Torang Samua Basudara yang merukana identitas kultural di Sulawesi Utara dalam perkembangannya mulai diadopsi secara nasional sebagai

bentuk kearifan lokal yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. (16). *Torang Samua Basudara* berintikan toleransi yang mampu menjadi landasaan, benteng dalam proses menciptakan suasana yang harmonis di dalam masyarakat. *Torang Samua Basudara* adalah hakikat dasar dalam menciptakan masyarakat yang toleran, harmonis dan rukun.

Berdasarakan deskripsi tiga kearifan lokal masyarakat Sulawesi di atas, maka berikut ini deskripsi *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus* dan *Torang Samua Basudara* (17)

Local Wisdom	DIMENSIONS	VALUES DESCRIPTION
1	2	4
Si Tou	1. Si tou (st)	1.1. Manusia secara historis
Timou	2. Si Tou Timou (St2)	ada (bereksistensi)
Титои	3. Si Tou Timou Tou	1.2. Manusia ciptaan Tuhan
Тои	(St3)	1.3. Manusia ada dan
	4. Si Tou Timou	bertumbuh
	Tumou Tou (St4)	1.4. Manusia hidup dalam
		suatu masyarakat
		1.5. Manusia hidup dengan
		tujuan
		1.6. Manusia tidak sekedar
		bereksistensi
		1.7. Manusia hidup
		bersama orang lain
		1.8. Manusia adalah
		makhluk sosial
		1.9. Manusia hidup untuk
		memanusiakan orang
		lain
		1.10. Manusia saling
		tergantung satu sama
		lain

Local Wisdom	DIMENSIONS	VALUES DESCRIPTION
1	2	4
Mapalus	 Azas religious Azas 	1.1. Menghormati pemeluk agama lain
	kekeluargaan	1.2. Dialog antar umat
	3. Azas	beragama
	musyawarah dan	1.3. Membantu
	mufakat	mengamankan
	4. Azas kerja	perayaan besar agama
	bersama	lain
	5. Azas persatuan	1.4. Menyelesaikan
	dan kesatuan.	persoalan dengan jalan
		kekeluargaan
		1.5. Saling membantu antar
		sesama warga
		1.6. Menyelesaikan
		persoalan
		kemasyarakat secara
		bersama-sama
		1.7. Bersama-sama
		menciptakan
		kerukunan antar warga
		1.8. Bergaul tanpa
		memandang latar
		belakang suku, agama,
		bahasa.
		1.9. Tanggung jawab
		bersama dalam menjaga
		persatuan dan kesatuan

Local Wisdom	DIMENSIONS	VALUES DESCRIPTION
1	2	4
Torang	1. The way of life 1	1.1. Sesama adalah saudara
Samua	(cara dan 1	1.2. Manusia sama di
Basudara	pandangan	hadapan Tuhan
	hidup)	1.3. Menghargai orang lain
	2. Menjunjung	1.4. Menghargai pemeluk
	tinggi rasa	agama lain
	toleransi 1	1.5. Bergaul degan siapa
	3. Rasa hormat	saja
	kepada orang 1	1.6. Menghormati orang
	tanpa	yang beda agama
	memandang ras,	dengan kita
	agama dan 1	1.7. Menghormati orang
	keyakinan	yang berasal dari latar
	4. Siap membantu	belakang yang berbeda
	sesama tanpa	dengan kita
	memandang latar 1	1.8. Membantu orang yang
	belakang.	mengalami kesulitan
	5. Mengedepankan 1	1.9. Saling tolong menolong
	demokrasi 1	1.10. Menyelesaikan masalah
		secara bersama-sama
	1	1.11. Dialog antar umat
		beragama

D. Pembelajaran PKn Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Sulawesi Utara

Nilai budaya Si Tou Timou Tumo Tou mengandung makna filosofis dan pengakuan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Manusia diciptakan setara dalam eksistensinya. Nilai budaya ini sejalan dengan sila ke-2 Pancasila "kemanusian yang adil dan beradab." Nilai budaya ini sangat relevan jika dijadikan sumber pembelajaran PKn. Oleh karena itu, guru harus meninggalkan paradigma umum yang dipegang oleh

guru PKn di Indonesia saat ini yang mengajar hanya berdasarkan materi atau konten yang secara eksplisit ada dalam kurikulum atau buku teks yang ada. Harus ada inisiatif dari guru untuk mengekplorasi nilai-nilai yang terkandung dalam nilai budaya masyarakat, secara khusus nilai budaya Masyarakat Sulawesi Utara.

Nilai budaya *Mapalus* mengandung makna nilai dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dengan nilai budaya ini masyarakat hidup dalam suasana penuh gotong-royong dan saling tolong menolong. Oleh karena itu, agar nilai yang terkandung dalam budaya *Mapalus* ini memiliki pengaruh signifikan terhadap pembelajaran PKn, maka guru PKn perlu mengeksplorasi makna di balik nilai budaya *Mapalus* sebagai sumber pembelajaran PKn.

Nilai budaya *Torang Samua Baudara* atau diartikan sebagai "Kita Semua Bersaudara" mengandung nilai luhur bahwa semua manusia yang mendiami bumi Indonesia ini adalah saudara yang harus diperlakukan dengan baik dan hak dan kewajibannya harus dihormati serta diperlakukan secara adil. Oleh karena itu, nilai yang terkandung dalam nilai budaya *Torang Samua Basudara* harus dieksplorasi oleh guru PKn dan dijadikan sumber pembelajaran PKn di sekolah.

Masyarakat Sulawesi Utara hidup dalam suasana harmonis dan penuh toleransi. Keharmonisan dan sikap toleransi masyarakat Sulawesi Utara diilhami oleh nilai budaya dominan seperti: Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, Torang Samua Basudara. Dalam 3 nilai budaya ini terkandung makna filosofis yang amat luhur dimana ada pengakuan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan dan memiliki eksistensi yang sama sebagai manusia. Nilai-nilai budaya ini merupakan nilai luhur yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Oleh karena itu, dalam konteks pembelajaran PKn guru perlu mengakomodir nilai-nilai luhur yang terkandung dalam nilai budaya tersebut sebagai sumber pembelajaran. Guru

harus berinovasi untuk mengolah materi pembelajaran dan hanya terpaku pada materi yang secara eksplisit ada dalam kurikulum atau yang ada dalam buku-buku teks PKn.

Nilai Budaya Si Tou Timou Tumou Tou adalah nilai luhur masyarakat Sulawesi Utara yang bermakna bahwa kita sebagai manusia hidup di dunia ini untuk memanusiakan orang lain/sesama kita dan bukan menjadi musuh bagi sesama kita. Nilai filosofis yang terkandung dalama nilai budaya Si Tou Timou Tumou Tou mengandung pengakuan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dan hidup bersama dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu semakin tinggi pemahaman siswa terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam nilai budaya Si Tou Timou Tumou Tou maka semakin tinggi pula sikap toleransi siswa terhadap sesamanya; menghargai orang yang berasal dari latar belakang agama, suku, ras, bahasa yang berbeda.

Nilai budaya *Mapalus* atau gotong-royong mengandung makna filosofis yang mendalam bahwa manusia bukan makhluk individual, tetapi makhluk sosial yang hidup saling ketergantungan dengan orang lain. Dalam nilai budaya *Mapalus* tercermin sikap saling tolong menolong antar sesama warga masyarakat Sulawesi Utara; baik kerjasama antar individu, individu dengan masyarakat luas, antar suku, antar agama dan antara seluruh lapisan elemen masyarakat. Oleh karena itu, semakin tinggi pemahaman siswa terhadap nilai budaya *Mapalus*, maka akan semakin tinggi pula sikap toleransi.

Nilai budaya *Torang Samua Basudara* mengandung pengertian dasar bahwa semua manusia itu adalah saudara dan tidak boleh ada sikap membeda-bedakan berdasarkan suku, ras, agama, bahasa dan latar belakang sosial lainnya. Semboyan ini terbukti mampu menjadi pelindung masyarakat Sulawesi Utara untuk tidak berkonflik mengikuti daerah-daerah sekitar seperti Ambon, Posso, Palu yang berkonflik. Oleh karena itu, pembelajaran PKn sebagai benteng dalam pembentukan

karakter bangsa (*National and Character* Building) harus selalu mengakomodir esensi nilai-nilai budaya lokal.

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) pelajaran yang memfokuskan merupakan mata pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945". Pendidikan Kewarganegaraan beresensikan pendidikan nilai, sehingga Pendidikan Kewarganegaraan harus memberikan perhatiannya kepada pengembangan nilai, moral, dan sikap perilaku siswa. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang merupakan salah satu kajian yang mengemban misi nasional mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "value-based education." Oleh karena itu, semakin pembelajaran PKn di sekolah dipersiapkan dengan baik dan mengakomodir sumber-sumber yang relevan, terutama nilai budaya masyarakat setempat, semakin tinggi pula perkembangan sikap toleransi siswa/masyarakat (6,18).

Nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, Torang Samua Basudara* dan pembelajaran PKn adalah elemen penting dalam pengembangan sikap toleransi siswa. PKn sebagai pendidikan berbasis nilai sangat relevan jika mengakomodir nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam *local genius* masyarakat Indonesia yang plural.

Berikut ini contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara:

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : SMP Negeri 4 Tomohon

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : VII/Ganjil

Materi Pokok : Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Tahun Pelajaran : 2022/2023

Alokasi Waktu : 3 x 40 Menit (1 Pertemuan)

A. Kompetensi Dasar:

Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

- Mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Sidang BPUPKI.

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti proses belajarn mengajar maka peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Sidang BPUPKI.

D. Media Pembelajaran

- Laptop/Hp
 Zoom Cloud Metting
- WhatsApp Group / Messenger

E. Materi Pembelajaran

Mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Sidang BPUPKI.

F. Sumber Belajar

- Buku Siswa dan Guru Kelas VII, Kemdikbud 2017
- Google / Internet
- Sumber lain yang relevan

G. Metode Pembelajaran

Pendekatan : Pendekatan Saintific Metode : Diskusi Kelompok

H. Kegiatan Pembelajaran

	,	NILAI BUDAYA DAN
	PEMBUKAAN	KARAKTER BANGSA
• (Guru membuka proses belajar	
C	dengan salam dan doa bersama	
((PPK) Penguatan Pendidikan	
]	Karakter Religius	
• (Guru mengecek kehadiran dan	
1	keadaan siswa	
• (Guru memberikan motivasi	(Si tou timou tumou tou)
1	meyampaikan keterkaitan	Manusia adalah
1	materi dengan kehidupan	makhluk sosial
5	sehari hari (STEAM-Science)	
• (Guru menyampaikan KD dan	
t	tujuan pembelajaran serta	
1	ruang lingkup penilaian	
	KEGIATAN INTI	
• (Guru membagikan materi	(Mapalus) Asas kerjasama
1	Mendeskripsikan perumusan	Saling membantu
I	Pancasila sebagai Dasar Negara	dalam hal ini guru
(dalam Sidang BPUPKI. <i>Share</i>	memberi ilmu materi
1	Power Point (STEAM -	kepada siswa
7	FECHNOLOGY)	
• I	Peserta didik menyimak	(Torang samua basudara)
1	penjelasan guru (Saintifik-	Rasa hormat kepada
1	mengamati)	orang lain dalam hal ini
		siswa mendengarkan
		dan menghargai guru
		yang menjelaskan

 Peserta didik diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan (Menanya - Critikal Thinking) Di dalam kelompok, peserta didik membaca dari sumber lain untuk menjawab pertanyaan yang diberikan (Mengumpulkan Informasi) Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi tentang jawaban yang sudah (Torang samua basudara) Mengedepankan demokrasi Dialog antar siswa (Mapalus) Asas bekerjasama Dalam kelompok saling membantu dalam mencari jawaban dari sumber lain (Torang samua basudara) Menyelesaikan masalah secara bersama sama
pertanyaan (Menanya – Critikal Thinking) Dialog antar siswa (Mapalus) Asas didik membaca dari sumber lain untuk menjawab pertanyaan yang diberikan (Mengumpulkan Informasi) Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi demokrasi (Mapalus) Asas bekerjasama Dalam kelompok saling membantu dalam mencari jawaban dari sumber lain (Torang samua basudara) Menyelesaikan masalah
 Critikal Thinking) Dialog antar siswa Mapalus) Asas bekerjasama Dalam kelompok saling membantu dalam mencari jawaban dari sumber lain Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi Dialog antar siswa (Mapalus) Dalam kelompok saling membantu dalam mencari jawaban dari sumber lain (Torang samua basudara) Menyelesaikan masalah
Di dalam kelompok, peserta didik membaca dari sumber lain untuk menjawab pertanyaan yang diberikan (Mengumpulkan Informasi)
didik membaca dari sumber lain untuk menjawab pertanyaan yang diberikan (Mengumpulkan Informasi) mencari jawaban dari sumber lain • Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi bekerjasama Dalam kelompok saling membantu dalam mencari jawaban dari sumber lain (Torang samua basudara) Menyelesaikan masalah
lain untuk menjawab pertanyaan yang diberikan (Mengumpulkan Informasi) Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi Dalam kelompok saling membantu dalam mencari jawaban dari sumber lain (Torang samua basudara) Menyelesaikan masalah
pertanyaan yang diberikan (Mengumpulkan Informasi) Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi membantu dalam mencari jawaban dari sumber lain (Torang samua basudara) Menyelesaikan masalah
(Mengumpulkan Informasi)mencari jawaban dari sumber lain• Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi(Torang samua basudara) Menyelesaikan masalah
 Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi Sumber lain (Torang samua basudara) Menyelesaikan masalah
menyampaikan hasil diskusi Menyelesaikan masalah
, I
tentang jawahan yang sudah secara bersama sama
teritaris ja viasari yang sadari
dibuat (Mengkomunikasikan)
Peserta didik mengolah (Torang samua basudara)
masukan, memberikan Menghargai pendapat
tanggapan (Mengasosiasi - orang lain
HOTS)
PENUTUP
Bersama sama guru dan peserta (Si tou timou tumou tou)
didik menyimpulkan materi Manusia hidup untuk
yang didapat (4C- memanusiakan orang
Comunication-Collaboratif) lain
Guru memberikan tugas
kepada peserta didik dan
mengarahkan untuk mencatat
semua point penting dalam
pembelajaran (PPK) Mandiri
Guru menyampaikan rencana
belajar pada pertemuan
selanjutnya
Kegiatan pembelajaran ditutup
dengan doa bersama (PPK-
Religius)

I. PENILAIAN

1. Pengetahuan : Penugasan

2. Sikap : Lembar observasi (Selama Kegiatan

Daring)

3. **Keterampilan** : Pengamatan (Kemampuan bertanya dan

menjawab dalam pembelajaran daring)

Tomohon, 1 Agustus 2022

Mengetahui,

Kepala SMP Negeri 4 Tomohon Guru Mata Pelajaran

 Meiny Senduk, SS
 Christy Rafael Lumi, S.Pd

 NIP. 19730531 200902 2 001
 NIP. 19911125 201903 1 011

E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

- 1. Dalam proses pembelajaran PKn di tingkat SD, SMP dan SMA di Sulawesi Utara guru mempersiapkan seluruh perangkat pembelajaran dengan baik. Guru mempersiapkan RPS dan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar.
- Pengembangan model pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara merupakan suatu hal yang urgen. Model pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan pemahaman para siswa tentang nilainilai budayanya.
- 3. Nilai kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara yang bisa dijadikan sumber belajar PKn adalah *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, Torang Samua Basudara.*

BAB

7

PEMBELAJARAN PKn BERBASIS NILAI BUDAYA LOKAL (LOCAL WISDOM) DI KOTA TOMOHON-SULAWESI UTARA

A. Pendahuluan

Faktor penting yang turut mempengaruhi kuatnya nilainilai budaya lokal (local wisdom) Sulawesi Utara adalah pewarisan nilai-nilai budaya secara turun temurun atau yang lebih dikenal dengan proses enkulturasi. Koentjaraningrat (2002:233), menyatakan bahwa "dalam proses enkulturasi seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat-adat, sistem norma, dan peraturanperaturan yang hidup dalam kebudayaannya." Selanjutnya proses enkulturasi dilakukan oleh orang tua atau orang yang dianggap dituakan dalam komunitas itu, seperti pewarisan nilai tata krama, adat istiadat, keterampilan suatu suku/keluarga yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Proses enkulturasi biasanya terjadi secara formal melalui pendidikan untuk disampaikan kepada orang lain yang belum mengenal, penyampaian informasi sekaligus sebagai bentuk penyadaran akan keberadaan suatu budaya, dan kemudian mengadopsi budaya tersebut untuk dijadikan sebagai budayanya.

1. Pangaruh Nilai Budaya Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, Torang Samua Basudara terhadap Pembelajaran PKn

Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, Torang Samua Basudara,* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelajaran PKn baik secara gabungan maupun secara parsial. Perhitungan statistik menunjukkan bahwa 98,1%

pembelajaran PKn dipengaruh oleh faktor lain di luar penelitian ini. Temuan penelitian ini tentunya sangat mencengangkan karena asumsi awal dalam penelitian ini adalah ada pengaruh nilai-nilai budaya Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, dan Torang Samua Basudara terhadap pembelajaran PKn.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para siswa diperoleh keterangan bahwa dalam konteks pembelajaran PKn, nilai-nilai budaya Sulawesi Utara seperti *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus*, dan *Torang Samua Basudara* kurang dibahas oleh guru, apalagi dikaitkan dengan materi pembelajaran PKn yang sedang diajarkan. Guru dalam menyampaikan materi pembelajaran PKn lebih terfokus pada materi yang secara eksplisit tertuang dalam kurikulum pembelajaran PKn.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh pendapat Winarno (2010:18) dalam tulisannya tentang "PKn Berbasis Budaya Lokal" yang mengatakan bahwa sudah sering dikemukakan akan pentingnya pembelajaran yang menyertakan nilai-nilai budaya atau karakter dalam suatu proses pendidikan. Nilai-nilai budaya tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk tujuan pengajaran maupun sebagai tujuan pengiringnya. Namun dalam prakteknya memang kurang dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena selama ini guru dalam melakukan proses Pembelajaran PKn lebih menekankan materi atau konten yang tertera dalam kurikulum dan kurang mengkaitkan atau menggali nilai-nilai budaya lokal.

Selanjutnya Winarno menjelaskan bahwa salah satu penyebab kurangnya nilai budaya atau nilai karakter dalam pembelajaran PKn ialah lalainya perencanaan pembelajaran (guru, dosen atau instruktur) menuliskan sejumlah karakter (nilai budaya) tersebut sebagai bagian penting dalam suatu rencana pembelajaran. Mungkin hal ini dianggap masalah sepele dan kecil, namun proses ini menjadi penting, oleh karena bagaimana guru mampu membelajarkan sejumlah

nilai budaya (nilai karakter) jika ia sendiri tidak merencanakan mana nilai-nilai budaya/karakter yang akan ia masukkan dalam perangkat pembelajaran. Bahkan dapat terjadi guru yang sudah menuliskan nilai budaya/karakter pun belum tentu mengingat dan mengajarkan pada siswa, apalagi yang tidak merumuskannya.

Dalam konteks ini juga hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan siswa terhadap nilai-nilai budaya lokal masyarakat Sulawesi Utara berada dalam kategori tinggi. Jika dikaitkan dengan komponen-komponen moral knowing, moral feeling, dan moral action dari Lickon, maka bisa dijelaskan bahwa sebenarnya siswa memiliki moral knowing, moral feeling, dan moral action terhadap nilai budaya Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, dan Torang Samua Basudara, tapi guru kurang mengakomodir potensi yang dimiliki siswa dalam pembelajaran PKn. Padahal Thomas Lickona meyakini bahwa komponen-komponen ini seharusnya dikembangkan untuk membantu perkembangan moral siswa, demi kebaikan mereka dan demi kebaikan masyarakat di sekitar mereka.

Dalam konteks pembelajaran PKn memang perlu ditekankan juga bahwa tidak semua nilai budaya itu relevan untuk diajarkan, tetapi ada baiknya jika nilai-nilai budaya itu dikaitkan dengan nilai budaya bangsa (18 nilai karakter bangsa yang diusulkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat Wahab dan Sapriya (2011:316) yang mengatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah bidang kajian yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan yang bersifat interdisipliner/multidisipliner/multidimensional. Jadi seharusnya guru PKn memiliki inisiatif untuk mengkaitkan isi materi pembelajaran PKn dengan bidang-bidang lain, termasuk nilai-nilai budaya seperti Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, dan Torang Samua

Basudara walaupun hal ini hanya sebagian kecil dari materi atau konten Pembelajaran PKn.

Selajan dengan hal ini, Soemantri (2001) dalam Wahab dan Sapriya, (2011:316) mengatakan bahwa objek studi Civics Civic Education adalah warga negara hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan dan negara. Dari pernyataan ditekankan bahwa dengan jelas kajian kebudayaan merupakan salah satu aspek dari objek kajian pendidikan kewarganegaraan. Hal ini secara tidak langsung membutuhkan kemampuan atau kompetensi guru untuk mengaitkan materi Pembelajaran PKn dengan konteks budaya setempat.

Selanjutnya bisa dilihat pula bahwa pembelajaran PKn dalam Kurikulum 2006 meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Persatuan dan Kesatuan bangsa
- b. Norma, hukum dan peraturan
- c. Hak asasi manusia
- d. Kebutuhan warga negara
- e. Konstitusi negara
- f. Kekuasaan dan Politik
- g. Pancasila
- h. Globalisasi

Jika dianalisis dari isi materi Pembelajaran PKn sesuai dengan kurikulum di atas, maka dengan jelas juga bisa ditemukan bahwa materi tentang nilai budaya adalah bagian materi pembelajaran PKn di Indonesia dan membutuhkan kemampuan guru untuk mengelaborasikannya menjadi materi dan konten pembelajaran, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan karakter bangsa yang salah satu sumber utamanya adalah budaya. Budaya sebagaimana yang tercantum naskah Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Naasional Badan Penelitian dan Pengembangan Kurikulum Tahun 2010 diartikan sebagai keseluruhan

sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan (belief) manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya. Sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan itu digunakan dalam kehidupan manusia dan menghasilkan sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial menjadi penghasil sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan; akan tetapi juga dalam interaksi dengan sesama manusia dan alam kehidupan, manusia diatur oleh sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan yang telah dihasilkannya.

Jika ditinjau dari lebih jauh, maka bisa dilihat juga bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah diamanahkan bahwa "pendidikan diselenggarakan secara demokratis dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa", lebih lanjut dinyatakan bahwa "pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat".

Sejalan dengan amanah UU Sisdiknas di atas, Winataputra dan Budimansyah (2012:i) mengatakan bahwa pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam "nation and character building." Dalam konteks ini peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sangat strategis. Suatu negara demokratis pada akhirnya harus bersandar pada pengetahuan, keterampilan dan kebajikan dari warga negaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk menduduki jabatan publik. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik (to be good and smart citizens) yang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan kebhinekaan di Indonesia dan mempertahankan integritas nasional.

Selanjutnya menurut Budimansyah dan Suryadi (2008:68) mengatakan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "value-based education". Konfigurasi atau kerangka sistematik PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut: Pertama, PKn secara kurikuler dirancang subjek pembelajaran yang bertujuan mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Kedua, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Ketiga, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (content *embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experience*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide. nilai. konsep, dan moral Pancasila. kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

2. Pengaruh Nilai Budaya Si Tou Timou Tumou Tou terhadap Pembelajaran PKn

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembelajaran PKn karena nilai koefisien korelasi hanya sebesar sebesar -0.05 (sangat rendah).

Sementara pengaruhnya hanya sebesar -0.081 (tidak signifikan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama ini pembelajaran PKn yang dilaksanakan di sekolah kurang mengakomodir nilai-nilai yang terkandung dalam budaya *Si Tou Timou Tumou Tou*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa diperoleh keterangan bahwa dalam proses pembelajaran PKn guru kurang mencoba untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan nilai budaya yang ada. Guru lebih terpaku pada materi yang ada dalam kurikulum dan tidak berusaha untuk menggali nilai-nilai budaya masyarakat Sulawesi Utara, seperti nilai budaya Si Tou Timou Tumou Tou.

Jelas bahwa hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam tataran praksis misi pendidikan kewarganegaraan (PKn) untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "value-based education" kurang dilaksanakan dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa dalam konteks pembelajaran PKn di persekolah, para guru mengajar lebih terfokus pada materi dan konten yang secara eksplisit tertulis dalam kurikulum atau buku-buku teks pembelajaran.

Realita yang ditemukan dalam penelitian ini tentunya kontras dengan pendapat Koentjaraningrat (2002:233) yang mengatakan bahwa "dalam proses enkulturasi seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat-adat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya." Selanjutnya proses enkulturasi dilakukan oleh orang tua atau orang yang dianggap dituakan dalam komunitas itu, seperti pewarisan nilai tata krama, adat istiadat, keterampilan suatu suku/keluarga yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Proses enkulturasi biasanya terjadi secara formal melalui pendidikan untuk disampaikan kepada orang lain yang belum mengenal, penyampaian informasi sekaligus sebagai bentuk penyadaran akan keberadaan suatu budaya, dan

kemudian mengadopsi budaya tersebut untuk dijadikan sebagai budayanya.

Di samping itu hasil penelitian ini juga tidak sejalan pendidikan sebagaimana pengertian disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Kurikulum Tahun 2010 yang mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan adalah juga suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Keberlangsungan itu ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan juga proses pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang. Dalam proses pendidikan budaya dan karakter bangsa, secara aktif peserta didik dirinya, mengembangkan potensi melakukan proses internalisasi. penghayatan dan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat.

Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Kurikulum Tahun 2010 juga mengatakan bahwa ... pendidikan budaya dan karakter bangsa dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warganegara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif. Atas dasar pemikiran itu, pengembangan pendidikan budaya dan karakter sangat

strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa mendatang. Pengembangan itu harus dilakukan melalui perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai, dan metode belajar serta pembelajaran yang efektif. Sesuai dengan sifat suatu nilai, pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah usaha bersama sekolah; oleh karenanya harus dilakukan secara bersama oleh semua guru dan pemimpin sekolah, melalui semua mata pelajaran, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya sekolah.

3. Pengaruh Nilai Budaya Mapalus terhadap Pembelajaran PKn

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengaruh nilai budaya *Mapalus* tidak signifikan terhadap pembelajaran PKn karena nilai koefisien korelasinya hanya sebesar 0.053 (sangat rendah) dan pengaruhnya hanya sebesar -0.018 (tidak signifikan). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pembelajaran PKn yang dilaksanakan selama ini masih kurang mengakomodir nilai-nilai yang terkandung dalam nilai budaya *Mapalus*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa diperoleh keterangan bahwa dalam proses pembelajaran PKn guru kurang mencoba untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan nilai budaya yang ada. Guru lebih terpaku pada materi yang ada dalam kurikulum dan tidak berusaha untuk menggali nilai-nilai budaya masyarakat Sulawesi Utara, seperti *Mapalus*.

Hasil penelitian ini kontras dengan pendapat Tilaar (2002:54) yang mengatakan bahwa salah satu proses yang luas dikenal mengenai kebudayaan adalah transmisi kebudayaan. Artinya kebudayaan itu ditransmisikan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Bahkan banyak ahli pendidikan yang merumuskan proses pendidikan tidak lebih dari proses transmisi kebudayaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kebudayaan dan pendidikan ibarat mata uang yang memiliki dua sisi tapi merupakan satu

kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Hidup dan matinya suatu kebudayaan ditentukan oleh pendidikan.

Hasil penelitian ini juga bertentangan Kementerian Pendidikan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kurikulum Tahun 2010 yang mengatakan bahwa semakin kuat seseorang memiliki dasar pertimbangan, semakin kuat pula kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang baik. Pada titik kulminasinya, norma dan nilai budaya secara kolektif pada tingkat makro akan menjadi norma dan nilai budaya bangsa. Dengan demikian, peserta didik akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki wawasan, cara berpikir, cara bertindak, dan cara menyelesaikan masalah sesuai dengan norma dan nilai ciri Indonesiaannya. Hal ini sesuai dengan fungsi utama pendidikan yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas, "mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa". Oleh karena itu, aturan dasar yang mengatur pendidikan nasional (UUD 1945 dan UU Sisdiknas) sudah memberikan landasan yang kokoh untuk mengembangkan keseluruhan potensi diri seseorang sebagai anggota masyarakat dan bangsa.

4. Pengaruh Nilai Budaya *Torang Samua Basudara* terhadap Pembelajaran PKn

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, diperoleh hasil bahwa nilai budaya *Torang Samua Basudara* pengaruhnya tidak signifikan terhadap pembelajaran PKn karena nilai koefisien korelasinya hanya sebesar 0.118 (sangat rendah) dan pengaruhnya hanya sebesar 0.170 (tidak signifikan). Hasil ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran PKn guru belum banyak mengakomodir nilainilai yang terkandung dalam budaya *Torang Samua Basudara*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa diperoleh keterangan bahwa dalam proses pembelajaran PKn guru kurang mencoba untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan nilai budaya yang ada. Guru lebih terpaku pada materi yang ada dalam kurikulum dan tidak berusaha untuk menggali nilai-nilai budaya masyarakat Sulawesi Utara, seperti *Torang Samua Basudara*.

Sama dengan pengaruh nilai budaya Si Tou Timou Tumou Tou dan Mapalus, Torang Samua Basudara sebagai nilai luhur masyarakat Sulawesi Utara juga kurang diakomodir oleh para guru dalam pembelajaran PKn. Dan hal ini juga bertentangan dengan amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasionl No. 20 Tahun 2003 yang mengisyaratkan bahwa pembelajaran apapun wajib mengakomodir nilai budaya lokal yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Hasil ini juga bertentangan dengan pendapat Winataputra, Budimansyah, dan Suryadi yang menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam "nation and character building" dan memiliki misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "value-based education."

Hasil ini juga memperlihatkan kegagalan guru dalam mengaplikasikan apa yang telah diatur oleh Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Kurikulum Tahun 2010 yang mengatakan bahwa proses pengembangan nilai-nilai yang menjadi landasan dari karakter itu menghendaki suatu proses yang berkelanjutan, dilakukan melalui berbagai mata pelajaran yang ada dalam kurikulum (kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, bahasa Indonesia, IPS, matematika, agama, pendidikan jasmani dan olahraga, seni, serta ketrampilan). Dalam mengembangkan pendidikan karakter bangsa, kesadaran akan siapa dirinya dan bangsanya adalah bagian yang teramat penting. Kesadaran tersebut hanya dapat terbangun dengan baik melalui sejarah yang memberikan pencerahan dan penjelasan mengenai siapa diri bangsanya di masa lalu yang menghasilkan dirinya dan bangsanya di masa kini. Selain itu, pendidikan harus membangun pula kesadaran, pengetahuan, wawasan, dan nilai berkenaan dengan lingkungan tempat diri dan bangsanya hidup (geografi), nilai yang hidup di masyarakat (antropologi), sistem sosial yang berlaku dan sedang berkembang (sosiologi), sistem ketatanegaraan, pemerintahan, dan politik (ketatanegaraan/politik/ bahasa Indonesia kewarganegaraan), dengan berpikirnya, kehidupan perekonomian, ilmu, teknologi, dan seni. Artinya, perlu ada upaya terobosan kurikulum berupa pengembangan nilai-nilai yang menjadi dasar pendidikan budaya dan karakter bangsa. Dengan terobosan kurikulum yang demikian, nilai dan karakter dikembangkan pada diri peserta didik akan sangat kokoh dan memiliki dampak nyata dalam kehidupan diri, masyarakat, bangsa, dan bahkan umat manusia.

Di samping itu hasil penelitian ini berlawanan dengan Al-Muchtar (2004:281-182) pendapat tentang internalisasi nilai (yang terdiri dari seperangkat nilai-nilai) yang merupakan suatu proses bertahap. Tahap pertama, manusia mempunyai potensi tentang nilai-nilai. Sistem nilai itu mengendalikan cara memandang, cara bersikap dan bertingkahlaku sesuai dengan norma yang berlaku. Agar dia tahu dan dapat tahu, antara lain dari "diberi tahu". Dari pemberitahuan itu, yang merupakan salah satu kegiatan pendidikan kelas, dipahami dan diterapkan dalam wujud pertimbangan-pertimbangan etis, yang pada akhirnya terlahir dalam perilaku. Pemberitahuan (informasi, motivasi) ini merupakan salah satu stimulus-stimulus merangsang atau menentang sikap atau nilai pada orang itu. Apabila rangsangan itu mengena, maka terbangkitlah perhatian atau minat untuk memperoleh informasi yang lebih luas dan lebih dalam. Ia berminat untuk "lebih tahu". Tahap ini dinamakan tahap motivasi. Tahap kedua, adalah dimana orang mengadakan penilaian atas rangsangan itu dan membanding-bandingkannya dengan nilai-nilai yang dimilikinya. Sikap yang timbul dapat menolak atau menerima nilai-nilai, yang dianggapnya mempunyai guna, menarik, menyenangkan, memuaskan bagi dirinya. Ada kemungkinan menguntungkan mencoba-coba dalam bentuk yang kongkrit dan kecil. Tahap ini dapat disebut tahap orientasi. Apabila tahap ini berhasil, maka tiba pada tahap yang berikutnya. Tahap ketiga, dikenal dengan tahap penerimaan nilai-nilai baru itu, dan diserap dan ditempatkan dalam sistem nilai yang telah ada padanya. Individu yang bersangkutan menginternalisasikan nilai-nilai baru, sehingga tahap ini dapat disebut tahap akseptasi. Tahap orientasi dan tahap akseptasi adalah proses pencernaan yang berlangsung dalam organisme. Tahap terakhir adalah tahap pengalaman, yang mewujudkan nilai-nilai itu dalam bentuk tingkah laku.

5. Pengaruh Nilai Budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* terhadap Sikap Toleransi Siswa

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* terhadap sikap toleransi siswa memiliki koefisien korelasi sebesar 0.476 dan berada pada kategori sedang, sementara itu pengaruhnyanya adalah sebesar 2,82%. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka didapat kesimpulan bahwa nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* memiliki pengaruh signgifikan terhadap pengembangan sikap toleransi siswa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman siswa tentang konsep manusia yang mencakup dirinya dan sesamanya, maka semakin tinggi pula sikap toleransi siswa.

Hasil penelitian ini juga mempertegas teori nilai dari Rocheah (1980:161): "Value is enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end-state of existence". Di mana nilai dalam konteks penelitian ini adalah nilai budaya Si Tou Timou Tumou Tou dipandang sebagai suatu ide, konsep dan kepercayaan yang dijadikan patokan untuk menentukan pilihan dalam berpikir dan bertindak tentang sesuatu yang pantas atau tidak pantas. Nilai yang terkandung dalam budaya Si Tou Timou Tumou Tou telah mendorong para siswa bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk bersikap toleran terhadap orang yang berbeda latar belakang agama, suku, ras, budaya, dan bahasa.

Di sisi lain penelitian ini juga mempertegas pendapat Geertz (1975) yang mengatakan bahwa budaya adalah: "an historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and their attitudes toward life". Dari definisi ini Geertz menjelaskan bahwa budaya adalah "Pola transmisi historis dari makna yang terkandung dalam simbol-simbol, suatu sistem konsepsi yang diwariskan dan disajikan dalam bentuk simbol-simbol cara manusia berkomunikasi. melestarikan, dan mengembangkan pengetahuan mereka dan sikap mereka terhadap kehidupan." Berdasarkan definisinya tentang budaya, Geertz mau menegaskan bahwa budaya adalah suatu dimensi yang aktif dan konstitutif dari kehidupan sosial daripada sekedar mekanisme penjamin integrasi sosial. Geertz mau menegaskan bahwa budaya adalah suatu dimensi yang aktif dan konstitutif dari kehidupan sosial daripada sekedar mekanisme penjamin integrasi sosial. Geertz melihat budaya sebagai "lengkung simbolis" atau "blueprint" yang dengannya seseorang bisa menciptakan dunia mereka yang bermakna dalam dua level sekaligus: emosi dan kognitif (Sutrisno dan Putranto, 2005, 212).

Sementara itu Soelaeman (2010:42-43) sebagaimana dikutip dari Kluckhohn mengatakan bahwa sistem sosial budaya dalam masyarakat di mana pun di dunia, secara universal menyangkut lima masalah pokok kehidupan manusia, vaitu: *Hakikat hidup manusia (MH)*. Hakikat hidup untuk setiap kebudayaan berbeda secara ekstrem, ada yang berusaha untuk memadamkan hidup (nirvana = meniup habis), ada pula yang dengan pola-pola kelakuan tertentu menganggap hidup sebagai suatu hal yang baik, "mengisi budaya". Hakikat karya manusia (MK). Setiap kebudayaan berbeda-beda, di antaranya beranggapan bahwa karya bertujuan untuk hidup, karya memberikan kedudukan atau kehormatan, meruupakan gerak hidup untuk menambah karya lagi. Hakikat waktu manusia (MW). Hakikat waktu untuk setiap ada kebudayaan berbeda-beda, yang berpandangan mementingkan orientasi masa lampau, ada pula yang berpandangan untuk masa kini atau yang akan datang. Hakikat alam manusia (MA). Ada kebudayaan yang menganggap manusia harus mengekplorasi alam atau memanfaatkan alam semaksimal mungkin, ada kebudayaan yang beranggapan bahwa manusia harus harmonis dengan alam dan manusia harus menyerah kepada alam. Hakikat hubungan manusia (MM). Dalam hal ini ada yang mementingkan hubungan manusia dengan manusia, baik secara horizontal (sesamanya) maupun secara vertikal (orientasi kepada tokoh-tokoh). Ada pula yang berpandangan individualistis (menilai tinggi kekuatan sendiri).

Pendapat Soeleman di atas dalam konteks nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Manusia dilahirkan dan hidup sebagai manusia,
- b. Manusia yang hidup, adalah hidup secara dewasa, bertanggung jawab dan mandiri,

c. Manusia dewasa, bertanggung jawab dan mandiri ditandai oleh "pengabdiannya" untuk "membentuk dan melahirkan" manusia-manusia baru yang dewasa (melalui proses pendidikan), bertanggung jawab dan mandiri kelak di kemudian hari, untuk selanjutnya manusia baru yang telah terbentuk itu melanjutkan lagi tugas pengabdiannya dalam rangka "memanusikan" manusia sesamanya. (Sondak, 2002:19-20).

Dalam nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* ini terkandung nilai-nilai dasar dalam kehidupan yang bisa berfungsi sebagai pendorong, pengendali kehidupan, baik dalam mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup, maupun untuk pengembangan dirinya. Oleh karena itu semakin siswa memiliki pemahaman yang baik terhadap nilai budaya ini, maka semakin tinggi pula rasa toleransinya terhadap orang lain.

6. Pengaruh Nilai Budaya *Mapalus* terhadap Pengembangan Sikap Toleransi Siswa

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel nilai budaya *Mapalus* terhadap sikap toleransi siswa memiliki koefisien korelasi sebesar 0.545 dan berada pada kategori sedang, sementara itu pengaruhnyanya adalah sebesar 2,56%. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka didapat kesimpulan bahwa nilai budaya *Mapalus* memiliki pengaruh signgifikan terhadap pengembangan sikap toleransi siswa

Hasil penelitian ini mempertegas pendapat Umbas (2011) yang mengatakan bahwa Mapalus sebagai Local Spirit and Local Wisdom Masyarakat Minahasa/Sulawesi Utara yang terpatri dan berkohesi didalamnya: 3 (tiga) jenis hakekat dasar pribadi manusia dalam kelompoknya, yaitu: Touching Hearts, Teaching Mind, and Transforming Life. Mapalus adalah hakekat dasar dan aktivitas kehidupan orang Minahasa / Sulawesi Utara yang terpanggil dengan ketulusan hati nurani yang mendasar dan mendalam (touching hearts) dengan

penuh kesadaran dan tanggung jawab menjadikan manusia dan kelompoknya (teaching mind) untuk saling menghidupkan dan mensejahterakan setiap orang dan kelompok dalam komunitasnya (transforming life). Sebagai sebuah sistem kerja memiliki nilai-nilai etos seperti, etos resiprokal, etos partisipatif, solidaritas, responsibilitas, gotong royong, good leadership, disiplin, transparansi, kesetaraan dan trust.

Kesimpulan di atas juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Th. Wawointana (2001) dengan judul: Pelestarian Mapalus Di Minahasa dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan Nasional: Suatu Tinjauan tentang Sistem Gotong-Royong pada Masyarakat di Kabupaten Minahasa, dimana salah satu kesimpulan yang dihasilkan adalah sistem budaya Mapalus hidup baik dalam masyarakat Minahasa (Sulawesi Utara) sejak zaman nenek moyang hingga dewasa ini. Kehidupannya itu berlangsung turun-temurun sebagai konvensi masyarakat dan menjadi perekat masyarakat untuk hidup harmonis dan penuh sikap toleransi terhadap masyarakat yang berasal dari latar belakang budaya, suku, ras, agama, dan bahasa yang berbeda dengan mereka.

7. Pengaruh Nilai Budaya *Torang Samua Basudara* terhadap Pengembangan Sikap Toleransi Siswa

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel nilai budaya *Torang Samua Basudara* terhadap sikap toleransi siswa memiliki koefisien korelasi sebesar 0.669 dan berada pada kategori kuat, sementara itu pengaruhnyanya adalah sebesar 21,90%. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka didapat kesimpulan bahwa nilai budaya *Torang Samua Basudara* memiliki pengaruh signgifikan yang paling tinggi terhadap pengembangan sikap toleransi siswa. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin siswa memiliki pengetahuan tentang esensi nilai yang terkandung dalam nilai budaya *Torang Samua Basudara*,

maka mereka akan lebih memiliki sikap toleransi terhadap sesamanya.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Semboyan *Torang Samua Basudara* yang berarti "Kita Semua Bersaudara" yang sudah sejak lama telah tumbuh dan berkembang sebagai nilai budaya masyarakat Sulawesi Utara dihayati dan diimplementasikan sepenuhnya oleh warga Nyiur Melambai/Sulawesi Utara, sehingga menjadi sebuah kearifan lokal yang kokoh dan penangkal dari berbagai potensi konflik, terutama konflik sosial tahun 1998-2000.

Torang Samua Basudara telah menjadi slogan yang sangat popular di Bumi Nyiur Melambai / Sulawesi Utara. Slogan ini bukan hanya slogan kosong, tetapi talah menjadi bagian hidup dari masyarakat Sulawesi Utara. Ini terbukti dari kondusifnya keamanan, kerukunan, dan harmoni masyarakat Sulawesi Utara. Prinsip Torang Samua Basudara menjadi identitas Sulawesi Utara yang secara perlahan telah menjadi perhatian secara nasional dan internasional.

Prinsip Torang Samua Basudara mengedepankan supremasi toleransi yang merupakan fondasi paling mendasar untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan masyarakat. Masyarakat Sulawesi Utara merupakan masyarakat multi demensi yang terbentuk dari berbagai kepercayaan, suku, dan budaya yang berbeda. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai corak, dan sifat yang berbeda sesuai dengan tingkat pendidikan, pergaulan dan pengalamannya. Aneka pengalaman, pendidikan, budaya membentuk karakter setiap orang. Adalah tidak mungkin memaksakan selera kita kepada orang lain. Yang mungkin adalah setiap pribadi menyesuaikan diri dengan orang lain.

Berkaitan dengan kuatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya *Torang Samua Basudara* ini dibuktikan dengan penelitian Engelbert Lumowa (2000) dengan judul: *Pola Pembinaan Generasi Muda Dalam Upaya Peningkatan Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Ketahanan*

Nasional: Suatu Studi di Kotamadia Manado Propinsi Sulawesi Utara yang menghasilkan kesimpulan bahwa pembinaan generasi muda, oleh lembaga pemerintah cukup baik dan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya gejolak sosial yang dilakukan oleh generasi muda, sehingga kerukunan masyarakat dapat ditingkatkan dan dibina serta terpelihara dengan baik. Hubungan antar umat beragama memang tergolong baik, terbukti dengan adanya kerukunan hidup, terpeliharanya stabilitas keamanan masyarakat. Suasana rukun dan damai boleh tercipta karena masyarakat dan etnik yang golongan agama mempraktekkan nilai-nilai budaya nasional seperti: saling menghargai, menghormati, toleransi, kebersamaan, gotongroyong, musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan. Nilai-nilai boleh terwujud dengan persaudaraan, sebagaimana yang tercermin dalam semboyan "Torang Samua Basudara", yang sekarang ini sudah menjadi falsafah atau pandangan hidup masyarakat beragama di Kotomadia Manado khususnya, dan di Propinsi Sulawesi Utara pada umumnya. Nilai persaudaraan atau kekerabatan, baik yang terjadi karena keturunan darah maupun karena perkawinan adalah nilai budaya luhur yang menyatukan dan mengikat segenap anggota masyarakat dalam pola hidup yang terbuka dan penuh pengertian.

Integrasi masyarakat Sulawesi Utara terjaga lewat semboyan *Torang Samua Basudara* yang sekaligus telah menjadi nilai budaya yang diturunkan secara turun temurun. Hal ini dapat dilihat dari dari bentuk-bentuk kelompok sosial yang ada, baik yang terbentuk berdasarkan: kekerabatan akibat pertalian darah, perkawinan, mata pencaharian, dan lingkungan tempat tinggal. Keberadaan semua kelompok sosial dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda, dianggap sebagai wadah pertemuan dan wahana komunikasi untuk memperkokoh solidaritas bangsa dengan

didasari oleh rasa kebersamaan, kerukunan, senasib sepenanggungan, dan rasa sebangsa.

8. Pengaruh Pembelajaran PKn terhadap Sikap Toleransi Siswa

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel pembelajaran PKn terhadap sikap toleransi siswa memiliki koefisien korelasi sebesar 0,179 dan berada pada kategori sangat rendah, sementara itu pengaruhnyanya adalah sebesar 1,35%. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka didapat kesimpulan bahwa pembelajaran PKn kendati sangat rendah memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan sikap toleransi siswa. Hal ini dengan jelas memperlihatkan bahwa pembelajaran PKn yang menyangkut persiapan, pelaksanaan langkahlangkah pembelajaran, dan evaluasi harus dilakukan dengan lebih baik lagi agar pengembangan sikap toleransi siswa bisa lebih baik.

Dalam penelitian ini pengaruh pembelajaran PKn terhadap sikap toleransi siswa memang berada dalam kategori sangat rendah, karena pembelajaran PKn yang diteliti dalam penelitian ini yaitu lebih terfokus pada pembelajaran PKn yang menginternalisasikan nilai budaya masyarakat Sulawesi Utara.

Kendati pengaruhnya kecil, tetapi hasil penelitian ini tetap memperkuat pendapat Depdiknas (2003:7) yang mengatakakan: "Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945". Sementara itu Komalasari (2011:88) mengatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan beresensikan pendidikan nilai, sehingga Pendidikan Kewarganegaraan harus memberikan perhatiannya kepada pengembangan nilai, moral, dan sikap perilaku siswa. Sejalan dengan pendapat di atas Budimansyah dan Suryadi (2008:68) mengatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "value-based education" harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Konfigurasi atau kerangka sistematik PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut: Pertama, PKn secara kurikuler dirancang subjek pembelajaran sebagai yang bertujuan mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulai, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Kedua, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Ketiga, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (content embedding values) dan pengalaman belajar (learning experience) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Berdasarkan pendapat di atas, maka pembelajaran PKn berbasis nilai pada intinya bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kewarganegaraan siswa yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan sikap toleransi siswa. Kompetensi kewarganegaraan oleh Branson (1998) dibagi menjadi 3, yaitu: 1) Civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara; 2) Civic skill

(kecakapan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan; dan 3) *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic knowledge*) berkaitan dengan materi substansi yang seharusnya diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pengetahuan ini bersifat mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintah dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat global.

Kecakapan Kewarganegaraan (Civic skill) merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, yang dimaksudkan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah berbangsa kehidupan dan bernegara. Kecakapan kewarganegaraan meliputi kecakapan-kecakapan intelektual (intellectual skills) dan kecakapan partisipasi (participation skills).

Watak kewarganegaraan (Civic disposition) mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasiorganisasi civil society. Pengalaman-pengalaman demikian membangkitkan pemahaman bahwasanya hendaknya demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab dari tiap individu. Karakter privat seperti bertanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berfikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses (Branson, 1998).

9. Pangaruh Nilai Budaya Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, Torang Samua Basudara dan Pembelajaran PKn terhadap Sikap Toleransi Siswa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka diperoleh kesimpulan bahwa pengaruh bersama nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, Torang Samua Basudara* dan pembelajaran PKn terhadap pengembangan sikap toleransi siswa adalah sebesar 50,1% dan 49,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Dari hasil tersebut dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik pemahaman siswa terhadap nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus*, dan *Torang Samua Basudara* makin tinggi pula tingkat sikap toleransi siswa. Demikian pula semakin pembelajaran PKn dipersiapkan dengan baik oleh guru, semakin baik pula tingkat sikap toleransi siswa.

Hasil penelitian ini memperkuat prinsip aliran psikologi behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh tokohtokoh behavioristik yang diantaranya adalah Edward Thorndike, Jhon Broadus Watson, Clark L. Hull, Edwin Guthrie, dan B.F Skinner (Supardan, 2011:457). Prinsip dasar aliran psikologi behaviorisme ini mengatakan bahwa perubahan perilaku atau sikap seseorang ditentukan oleh wawasan atau pengetahuan yang ia pelajaran. Atau dengan kata lain aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar (Stimulus-Respon). Jika dihubungkan dengan hasil penelitian ini, maka perkembangan sikap toleransi siswa amat dipengaruhi oleh semakin tingginya

pengetahuan atau pemahaman siswa terhadap nilai-nilai budaya yang bisa diperolehnya di sekolah atau di masyarakat.

Sementara itu Menurut Yusuf dan Nurihsan (2007:20), faktor yang mempengaruhi perkembang kepribadian atau sikap seseorang secara garis besar dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor hereditas (*genetika*) dan faktor lingkungan (*environment*). Berkaitan dengan faktor lingkungan penulis membaginya lagi menjadi lingkungan keluarga, kebudayaan dan sekolah.

Lingkungan pendidikan meliputi: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat (sosial). Tujuan pendidikan di keluarga, yakni terbentuknya mental, sikap serta penonjolan tingkah laku yang positif dan membangun, bukan saja dalam lingkungan keluarga tetapi di setiap lingkungan di mana ia berada. Peranan Sekolah/ Perguruan Tinggi, jika dilihat dari sudut sosial dan spiritual, berfungsi mengembangkan sikap mental yang hubungannya dengan norma-norma kehidupan di kampus dan di lingkungan masyarakat. Dengan demikian jenis lingkungan sangat menentukan dan memberi pengaruh terhadap pembentukan sikap, penerimaan, tingkah laku, dan toleransi setiap mahasiswa terhadap berbagai kemajemukan (etnis, organisasi, dan agama). Hal tersebut mengindikasikan bahwa jenis lingkungan pendidikan tidak bisa diabaikan sebagai faktor penting mengukur toleransi di kalangan siswa.

Menurut Mulyana (2004:141), sejak lama Ki Hajar Dewantara telah memproklamirkan adanya tiga lingkungan pendidikan yang disebut tri Pusat-pendidikan. Tiga lingkungan itu adalah sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dalam program pengembangan pendidikan nasional ketiganya menjadi wilayah garapan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sering disebut lingkungan pendidikan formal, informal, dan nonformal.

Sejalan dengan pendapat Ki Hajar Diwantara di atas dan dalam kaitannya dengan tujuan PKn untuk membina seorang waraganegara menjadi warganegara yang cerdas, maka pembelajaran PKn di sekolah juga harus dilakukan secara komprehensif dalam berbagai lingkungan pendidikan (sekolah, masyarakat, dan keluarga). Ketiga lingkungan pendidikan itu berperan penting bagi keberhasilan pendidikan anak. Lingkungan keluarga adalah pendidikan informal yang berjalan secara alamiah antar orang tua dan anak. Lingkungan sekolah adalah lingkungan pendidikan formal yang dibentuk secara sengaja dan dilembagakan yang di dalamnya terjadi hubungan guru dan siswa. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan pendidikan nonformal yang penyelenggaraannya melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. (Mulyana, 2004:149).

Sayangnya, jika kita menilik peran ketiga lingkungan tersebut dalam pendidikan PKn di Indonesia, maka kita akan menemukan bahwa ketiganya belum menjadi kekuatan utama dalam pembelajaran PKn. Hal ini tentunya disebabkan oleh berbagai faktor, terutama derasnya arus globalisasi yang menyebabkan pergeseran peran ketiga lembaga pendidikan tersebut. Dampak dari tidak berperannya ketiga lembaga pendidikan ini dalam konteks Indonesia ialah kecenderungan di masyarakat yang muncul dengan mempersalahkan PKn sebagai sumber segala permasalahan di negara kita. PKn dituding tidak berhasil menjalankan perannya dalam menghasilkan warga negara yang good and smart. Oleh karena itu jelas bahwa dalam konteks Indonesia dewasa ini, maka peran ketiga lembaga tersebut dalam pengembangan PKn secara komprehensif belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa ada faktor lain di luar nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, Torang Samua Basudara* dan pembelajaran PKn yang mempengaruhi perkembangan sikap toleransi siswa, yaitu

sebesar 49,1%. Menurut penelitian Raihani (2011) yang berjudul "A Whole-School Approach: A Proposal for Education for Tolerance in Indonesia" menemukan bahwa dalam konteks pengembangan sikap toleransi siswa dimensinya tidak hanya mengenai kurikulum eksplisit dan buku pelajaran, tetapi juga tentang sekolah secara menyeluruh. Upaya untuk meneliti dan menyempurnakan kurikulum mata pelajaran sekolah yang menanamkan pendidikan toleransi ini patut diberi penghargaan, tetapi untuk mengakomodasi kompleksitas sifat pendidikan nilai, maka penting adanya pemahamanan tentang sekolah secara menyeluruh. Bagi Raihani ada 6 elemen sekolah yang sangat mempengaruhi tingginya sikap toleransi siswa, yaitu: visi dan kebijakan kepemimpinan dan manajemen, kurikulum dan pengajaran, kapasitas dan kebudayaan, kegiatan para siswa, dan kolaborasi dengan masyarakat luas.

B. Penutup

Nilai budaya Si Tou Timou Tumo Tou mengandung makna filosofis dan pengakuan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, tapi kurang diakomodir oleh guru PKn sebagai sumber pembelajaran. Nilai budaya Mapalus mengandung nilai dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, tapi kurang diakomodir oleh guru PKn sebagai sumber pembelajaran. Nilai budaya Torang Samua Baudara atau diartikan sebagai "Kita Semua Bersaudara" mengandung nilai luhur bahwa semua manusia yang mendiami bumi Indonesia ini adalah saudara yang harus diperlakukan dengan baik dan hak dan kewajibannya harus dihormati serta diperlakukan secara adil, tapi tidak diakomodir oleh guru PKn sebagai sumber pembelajaran. Masyarakat Sulawesi Utara hidup dalam suasana harmonis dan penuh toleransi karena diilhami oleh nilai budaya dominan seperti: Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, Torang Samua Basudara. Semakin tinggi pemahaman siswa terhadap nilai-nilai yang terkandung

dalam nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* maka semakin tinggi pula sikap toleransi siswa terhadap sesamanya yang berbeda. Semakin tinggi pemahaman siswa terhadap nilai budaya Mapalus, maka akan semakin tinggi pula sikap toleransinya. Pembelajaran PKn sebagai benteng dalam pembentukan karakter bangsa (National and Character Building) harus selalu mengakomodir esensi nilai-nilai budaya lokal. Nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, Torang Samua Basudara* dan pembelajaran PKn adalah elemen penting dalam pengembangan sikap toleransi siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2011). Memusnahkan Akar Kebencian Antarsesama. [Online]. Tersedia: http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/03/03/memusnahkan-akar-kebencian-antarsesama/(8 September 2012).
- Al Muchtar, S. (2004). *Pengembangan Berpikir dan Nilai dalam Pendidikan IPS*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Anggraeni, L. (2009). Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural dalam Memupuk Nasionalisme Siswa (Studi Kasus di SMA Santo Aloysius Bandung. Tesis UPI. Tidak Diterbitkan.
- Assegaf, A. (2001). "Memahami Sumber Konflik Antariman", dalam *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakrta: Institut Dian/Interfidei.
- Ayatrohaedi. (1986). *Kepribadian Budaya Bangsa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Azra, A. (2002). Konflik Baru antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum. (2010).

 Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Jakarta:

 Kementrian Pendidikan Nasional.
- Baidhawy, Z. (2006). *Ber-Islam Di Era Multikulturalisme*. [Online]. Tersedia: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=589 (15 Oktober 2010).
- Branson, M. S. (1998). The Role of Civic Education: A Forthcoming
 Education Policy Task Force Position Paper from the
 Communitarian Network. [Online]. Tersedia:
 http://www.civiced.org/papers/articles_role.html
- Budimansyah, D dan Suryadi, A. (2004). *Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru*. Jakarta: Genesindo.

- Budimansyah, D. (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D. dan Suryadi, K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Busri Endang. (2009). "Mengembangkan Sikap Toleransi dan Kebersamaan di Kalangan Siswa. Dalam *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan* (J-VIP). Vol 1, No 1. 89-105. [Online]. Tersedia: http://

 jurnal.untan.ac.id/index.php/index/search/titles?searchPage=5 [22 Agustus 2012].
- Cogan, J. J. and Derricott, R. (1998). *Citizenship for 21st Century: an International Perpektif on Education*. London: Cogan Page.
- Creswell, J. W. (2008). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Creswell, J. W.. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daniah D. Nilai Kearifan Lokal Didong Dalam Upaya Pembinaan Karakter Peserta Didik. Pionir: Jurnal Pendidikan. 2019;8(1).
- Dimyati dan Mudjiono. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta; 2009.
- Djahiri, A.K. (1996). *Menelusuri Dunia Afektif.* Bandung: Lab. Pengajaran PMP IKIP Bandung.
- Elmubarok, Z. (2008). *Membumikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Endang, B. (2009). "Mengembangkan Sikap Toleransi dan Kebersamaan di Kalangan Siswa. Dalam *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan* (J-VIP). Vol 1, No 1. 89-105. [Online]. Tersedia: http://

- jurnal.untan.ac.id/index.php/index/search/titles?searchPage=5 [22 Agustus 2012].
- Erikson, E. H. (1989). *Identitas dan Siklus Hidup Manusia. Bunga Rampai Penerjamah: Agus Cremes.* Jakarta: PT. Gramedia
- Fallon, L. M. et al. (2012). "Consideration of Culture and Context in School-Wide Positive Behavior Support: A Review of Current Literature" Dalam Journal of Positive Behavior Interventions 14:209 [Online] Tersedia: http://pbi.sagepub.com/content/14/4/209 [03 September 2012]
- Frenkel, J. R. (1977). *How To Teach about Values an Analiting Approach*. New Jersey: Prentice Hall.
- Gara, N. (2009). "Membina Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal: Potret Pemeliharaan Kerukunan di Sulawesi Utara," dalam *Memelihara Kerukunan Melalui Pendidikan Multikultural*. Jakarta: Kedeputian Bidang Koordinasi Pendidikan, Agama dan Aparatur Negara.
- Geertz, C. (1975). *The Interpretation Of Cultures.* London: Hutchinson.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Kewaragnegaraan untuk Perguruan Tinggi.* Yogyakarta: Paradigma.
- Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan.* Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. (1990). Sejarah Teori Antropologi II. Jakarta: UI Press.
- Koentjaraningrat. (1993). Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional. Jakarta: UI Press.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Anthropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Komalasari, K. (2008). Pengaruh Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kompetensi Kewarganegaraan. (Disertasi). UPI Bandung.
- Komalasari, K. (2011). *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Krishnamurti, J. (1982). Bebas Kekerasan. Malang: Yayasan Krishnamurti.
- Lonto, A. L. (2000). Peran Elit Agama dalam Membina Kerukunan Hidup Antarumat Beragama di Kota Manado. Tesis UGM. Tidak Diterbitkan.
- Lumowa, E. (2000). Pola Pembinaan Generasi Muda Dalam Upaya Peningkatan Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Ketahanan Nasional: Suatu Studi di Kotamadia Manado Propinsi Sulawesia Utara). Tesis UGM. Tidak Diterbitkan.
- Magdalena I, Haq AS, Ramdhan F. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar Negri Bojong 3 Pinang. Bintang. 2020;2(3):418–30.
- Marfai, M. A. (2012). *Pengantar Etika Lingkungan Dan Kearifan Lokal.* Yogyakarta: Dadjah Mada University Press.
- Muhaimin. (1996). Srategi Belajar Mengajar. Surabaya: Citra Media.
- Muldoon, R. *et al.* (2011). "The conditions of tolerance" Dalam *Journal Politics Philosophy Economics* 11:322 [Online]. Tersedia: http://ppe.sagepub.com/content/11/3/322 [03 september 2012]
- Muldoon, R. *et al.* (2011). "The conditions of tolerance" Dalam *Journal Politics Philosophy Economics* 11:322 [Online]. Tersedia: http://ppe.sagepub.com/content/11/3/322 [03 september 2012]
- Mulyana, R. (2004). *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.

- Munch, R. and Smelser, N. J. (1992). *Theory of Culture*. California: University Of California Press.
- Nasikun. (2006). Sistem Sosial Indonesia, Yoyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Ohoitimur, Y. (2002). "Membangun Masyarakat Basis Multikultural: Beberapa Gagasan Dasar Tentang Ideal Masyarakat Baru," Media: Jurnal Filsafat Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. 1/1 (Januari 2002).
- Ohoitimur, Y. (2004). Beragama Dalam Masyarakat: Antara Rindu dan Gelisah. Jakarta: Garba Marina, 2004.
- Pangalila T, Mantiri J, Biringan J. Nilai Moral yang Terkandung dalam Semboyan Torang Samua Basudara Sebagai Sumber Toleransi. Jurnal Moral Kemasyarakatan. 2019;3(2):71–7.
- Pangalila T, Mantiri J, Umar M. The Role of Mapalus Local Wisdom in Building the Tolerant Attitudes of the Tomohon City Community. In: 2nd International Conference on Social Science (ICSS 2019). At; 2019. p. 711–4.
- Pangalila T, Mantiri J. The role of Tomohon society's local wisdom in developing tolerance attitudes. International Journal of Engineering and Advanced Technology. 2019 May 1;8(5):366–72
- Pangalila T. Pengaruh internalisasi nilai budaya Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus dan Torang Samua Basudara Dalam Pembelajaran PKn Terhadap Peningkatan Sikap Toleransi Siswa: Penelitian Survey Terhadap Siswa SMA di Kota Tomohon-Sulawesi Utara. [Bandung]: Universitas Pendidikan Indonesia; 2013.
- Pangalila, T. (2010). "Multikulturalisme dan Implikasinya dalam Hubungan antar Umat Beragama di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Jurusan Geografi FIS Unima*. 2/2 (Desember 2010).

- Panikkar, R. (1994). *Dialog Intra Religius*. Terj. J. Dwi Helly Purnomo dan P. Puspobinatmo. Yogyakarta: Kanisius.
- Poerwanto, H. (2010). Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanto (2010). Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan: Pengembangan dan Pemanfaatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raihani. (2011). "A whole-school approach: A proposal for education for tolerance in Indonesia." Dalam *Theory and Research in Education* 9:23 [Online]. Tersedia: http://tre.sagepub.com/ [25 Maret 2012].
- Rizki, A. (2011). Fenemena Kekerasan Atas Nama Agama di Indonesia yang Berujung Pada Tindak Terorisme. [Online]. Tersedia: http://www.alxy.co.cc/2011/03/fenemena-kekerasan-atas-nama-agama-di.html (8 September 2012).
- Salaki RJ. Membangun karakter generasi muda melalui budaya mapalus suku minahasa. Jurnal Studi Sosial. 2014;Vol.1(November):47–52.
- Sartini. (2006). *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah kajian Filsafati*. [Online]. Tersedia: http://filsafat.ugm.ac.id, [14 Mei 2013].
- Sarwono, J. (2011). Path Analysis. Jakarta: Alex Media Computindo.
- Senduk, W. (2000). Ekonomi Tamber. Manado: Lentra Minahasa.
- Slameto. (2003). Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soelaeman, M. M. (2010). *Ilmu Budaya Dasar: Suatau Pengantar.*Bandung: Rafika Aditama.
- Somantri, N. (1976). Metode Mengajar Civics. Jakarta: Erlangga.

- Sondak, A. J. (2002). Si Tou Timou Tumou Tou (Tou Minahasa): Refleksi atas Nilai-nilai Manusia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sujana IG. P. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) dalam Perspektif Reformasi. Widyasrama. 2015;25 (1).
- Sulistiani S. Model Pembelajaran Berbasis Budaya Lokal dalam Membentuk Jiwa Profetik-Patriotik Peserta Didik. In: Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III [Internet]. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan; 2017. p. 268–75. Available from: http://eprints.uad.ac.id/9791/
- Sumantri, E. (2008). An Outline of Citizenship and Moral Education in Major Countries of Southeast Asia. Bandung: The Indonesia University of Education.
- Sumario, Sumario, dkk. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan "Hakikat, Konsep dan Urgensi."* Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Supardan, D. (2011). *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Syamsiar, C. (2010). "Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia Sebagai Sumber Gagagan Berkarya Seni Rupa. Dalam *Jurnal ISI Surakarta*. Vol. 2. No. 1[Online]. Tersedia: "http://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/brikolase/article/view/414
- Taniredja, T. dan Mustafidah. (2011). *Penelitian Kuantitati: Sebuah Pengantar.* Bandung: Alfabeta.
- Tilaar HAR. Si Tou Timou Tumou Tou: suatu konsep pembangunan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan Minahasa menuju tinggal landas pembangunan. Manado; 1998.
- Tilaar, H. A. R. (1998). Si Tou Timou Tumou Tou: Suatu Konsep Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Pembangunan Minahasa Menuju Tinggal Landas Pembangunan.

- Manado: Makalah dibawakan dalam Diskusi Panel Pembangunan Minahasa Menuju Tahun 2000.
- Tilaar, H.A.R. (2004). Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Grasindo.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Togatorov, A. (2012). *Mengungkap akar Kekerasan dalam Masyarakat Multikultural Indonesia*. [Online]. Tersedia: http://www.armhando.com/2012/02/mengungkap-akar-kekerasan-dalam.html (8 September 2012).
- Turang, J. (1984). *Pembangunan Daerah <u>Minahasa</u> dengan Pertanian Inti Sistem Mapalus*. Manado: Yayasan Mapalus.
- Turang, J. (1997). *Profil Kebudayaan Minahasa*. Tomohon: Majelis Kebudayaan Minahasa.
- Umar, M. (2011). Proses Pembinaan Nilai-nilai Akhlak Mulia Pada Mahasiswa Muslim di Politeknik Pos Indonesia. Tesis UPI. Tidak Diterbitkan.
- Umbas V. Dynamic of Mapalus. Researcher of ICRES; 2011.
- Umbas, V. (2011). The Mapalus Way.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahab dan Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Wahana P, Mayasari ED. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Paradigma Pedagogi Reflektif (PPR) Pada Mata pelajaran PPKn terhadap Kesadaran Siswa akan Nilai Kedisiplinan, Cinta Tanah Air, Globalisasi, dan Demokrasi. Widya Dharma: Jurnal Kependidikan. 2016;28(2):124-44.

- Wawointana, T. (2001). Pelestarian Mapalus Di Minahasa Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan Nasional: Suatu Tinjauan Tentang Sistem Gotong-Royong Tolong-Menolong Pada Masyarakat Di Kabupaten Minahasa. Tesis UGM.
- Wenas, J. (2007). *Sejarah dan Kebudayaan Minahasa*. Manado: Institut Seni Budaya Sulawesi Utara.
- Widodo ST. Inovasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi Dan Sekolah Dasar Dalam Menghadapi Tantangan Era Disrupsi. Jurnal Proresif UNS. 2019;3(7):11.
- Winaputra, U. S. dan Budimansyah, D. (2010). *Civic Education:* Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjan UPI Bandung.
- Winarno. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai Lokal. Bandung: Makalah disajikan sebagai bahan proceeding untuk seminar nasional "Aktualisasi Pendidikan Karakter Bangsa" yang diselenggarakan Prodi PKn SPs UPI Bandung tanggal 15 Nopember 2010.
- Winarno. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara; 2012.
- Winataputra US. Posisi akademik pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan muatan/mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dalam konteks sistem pendidikan nasional. Jurnal moral kemasyarakatan. 2016;1(1):15–36.
- Winataputra. (2001). Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistematik Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS). Disertasi UPI. Tidak Diterbitkan.
- Wirutomo, K. dkk. (2011). Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: LabSosio dan UI Press.

- Yusuf, S. Dan Nurishsan J. (2007). *Teori Kepribadian*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- http://elearningpendidikan.com/pengertian-pendidikan-sebagai-proses-transformasi-budaya.html (2011).
- http://en.wikipedia.org/wiki/Tolerance
- http://fhspot.blogspot.com/2010/11/istilah-dan-definisi-civic-education.html
- http://happycristian.blogspot.com/2012/03/makna-di-balik-ungkapan-sitou-timou.html.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Poso
- http://sirwayans.wordpress.com/2012/05/23/torang-samuabasudara.
- http://sulawesiutara.net/kebudayaan-di-sulawesi-utara.html.
- http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fcb8b567941d/ke kerasan-atas-nama-agama-masih-meningkat
- http://www.psychologymania.com/2012/11/pengertian-kearifan-lokal.html
- http://www.studymode.com/essays/Clifford-Geertz-s-Description-Culture-140362.html

TENTANG PENULIS

Penulis 1



Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils. M.Pd. Lahir di Taratara 20 April 1983 adalah dosen di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado. Pada Tahun 2007, menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Filsafat pada Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng.

Pada Tahun 2013, menyelesaikan Program Magister Pendidikan Sekolah Pascasarjan Kewarganegaraan pada Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pada tahun 2018, menyesaikan Program Doktoral pada Program Studi Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Merdeka Malang. Saat ini penulis aktif membina kuliah: Pendidikan Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Karakter, Filsafat Pancasila, Etika Kewarganegaraan, Pendidikan Civis, Isu-isu Kontemporer PPKn, Perkembangan Mutahir PPKn. Penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang PPKn.

Penulis 2



Dr. Juliana Margareta Sumilat, S.Pd., MPd., CRP. Dilahirkan di Manado 21 Januari 1982 merupakan dosen tetap Universitas Negeri Manado semenjak tahun 2015 yang aktif melakukan Tri dharma perguruan tinggi. Juga sebagai Asesor BAN S/M Provinsi Sulawesi Utara dan asesor PPG Prajabatan Tahun 2022.

Penulis aktif mengajar pada prodi S1 PGSD, S2 PGSD dan Pendidikan Profesi GURU BInga PGSD. Beberapa mata kuliah yang diampuh adalah Pengembangan Kurikulum, Strategi Pembelajaran, media pembelajaran, Pengembangan Pembelajaran Matamatika di SD, KOnsep Geometri, pengukuran dan pembelajarannya di SD. Penulis yang menamatkan Kuliah S3 di UNJ Prodi Teknologi Pendidikan pada Tahun 2019 ini juga pernah menulis beberapa buku yang berisbn dan karya ilmiah diantaranya adalah Konsep Dasar Matematika, Media Pembelajaran Pada Masa Pandemi, Book Chapter: Improving the

creativity of students throught project based learning, The Utilization of Online Media in Calculation Operations Mathematics Learning in Elementary School Students, Development of Computer-Aided Media Operating Materials Calculate Integers, Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pembelajaran Tematik Siswa Sekolah Dasar, dll.

Penulis 3



Kosmas Sobon, S.Fil., M.Pd. Lahir di Bobu, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, pada 02 Maret 1983. Pada tahun 2010, menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Filsafat pada Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, kemudian melanjutkan studi ke jenjang Magister pada Program Sarjana Univesitas Negeri Manado

Program Studi S2 PGSD dan lulus pada tahun 2014. Sejak tahun 2016, diangkat menjadi dosen tetap di Universitas Katolik De La Salle Manado pada program studi S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Tahun 2018-2022, penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi S1 PGSD Universitas Katolik De La Salle Manado. Adapun beberapa mata kuliah yang diampu: Pengembangan Kurikulum SD, Statistika Pendidikan, Metodologi Penelitian Pendidikan, dan Manajemen Berbasis Sekolah.